



KAJIAN EFEKTIVITAS BANTUAN SOSIAL TERHADAP MASYARAKAT MISKIN DI PROVINSI ACEH

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ACEH
BAPPEDA ACEH
2024**

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat menyelesaikan laporan kajian yang berjudul "*Efektivitas Bantuan Sosial terhadap Masyarakat Miskin di Provinsi Aceh*". Laporan ini mengkaji upaya mengevaluasi implementasi program bantuan sosial dalam mengatasi kemiskinan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Tujuan utama dari kajian ini adalah menilai efektivitas program bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Provinsi Aceh, mengidentifikasi hambatan serta potensi jebakan kemiskinan yang memperlambat pengentasan kemiskinan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk memperkuat dampak program-program sosial tersebut.

Kami menyadari bahwa hasil kajian ini masih terdapat kekurangan. Namun tim telah berupaya dengan segala kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendapatkan bantuan dari banyak pihak dalam penyediaan dokumen atau sumber informasi serta masukan yang relevan dengan kajian ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak lain yang telah berpartisipasi dalam menyelesaikan penyusunan laporan akhir.

Selanjutnya, kami sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada tim yang telah melaksanakan kajian ini dengan baik. Kami berharap hasil kajian ini dapat bermanfaat semaksimal mungkin sebagai sumber data dan informasi yang berguna dalam merumuskan kebijakan strategis untuk meningkatkan efektivitas program bantuan sosial di Aceh. Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa mengiringi derap langkah dan niat baik kita dalam memberikan kontribusi nyata untuk kemajuan dan kesejahteraan Aceh ke depan.

Banda Aceh, Desember 2024
KEPALA BAPPEDA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH ACEH

Dr. H. T. AHMAD DADEK, SH, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19681129 199403 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Bantuan Sosial (Bansos) merupakan salah satu instrumen kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengurangi beban hidup masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada dalam garis kemiskinan atau kelompok rentan lainnya. Program bansos bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan perumahan, serta memberikan dukungan finansial yang dapat meringankan tekanan ekonomi masyarakat miskin. Seiring dengan meningkatnya tantangan sosial dan ekonomi, seperti ketimpangan pendapatan, pengangguran, dan krisis ekonomi global, peran bansos menjadi semakin penting dalam mengurangi dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat miskin.

Effektifitas bantuan sosial terhadap masyarakat miskin dianalisis berdasarkan empat (4) indikator, yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Selanjutnya dianalisis potensi jebakan kemiskinan yang membuat masyarakat miskin tidak bisa keluar dari lingkaran kemiskinan.

Karakteristik responden rata-rata dalam penelitian ini adalah berjenis kelamin perempuan, pendidikan lulusan SD/MI, status perkawinan adalah kawin, pekerjaan adalah ibu rumah tangga, petani sawah dan kebun, tidak mempunyai keahlian khusus, mempunyai tanggungan rata-rata 3 orang, mempunyai pendapatan rata-rata sebelum menerima bansos adalah Rp. 2.104.507,- dengan pengeluaran rata-rata adalah Rp. 2.124.676,-. Setelah menerima bansos pendapatan meningkat menjadi Rp. 2.447.561,- dan pengeluaran menjadi Rp. 2.134.056,-. Penambahan pendapatan setelah menerima bansos meningkat jauh lebih besar daripada pengeluaran setelah menerima bansos sehingga diasumsikan masyarakat terbantu dengan adanya bansos ini untuk sisi ketahanan pangan rumah tangganya.

Berdasarkan indikator pertama, ketepatan sasaran program, ditemukan bahwa bantuan sosial yang diberikan telah sampai pada individu atau kelompok yang memerlukan. Jenis bantuan adalah PKH, BPNT, Sembako, KIP, dan Disabilitas. Namun ada juga masyarakat yang merasa bahwa bantuan sosial yang mereka terima tidak sesuai dengan apa yang diperlukan. Bantuan yang diharapkan adalah bantuan yang produktif sehingga bisa mendapatkan pendapatan yang lebih banyak. Selain itu responden juga menginginkan bantuan pendidikan yang lebih banyak untuk keperluan anak-anak sekolah.

Kemudian berdasarkan indikator kedua, sosialisasi program, responden mengaku paham dengan bansos yang diterima yang berasal dari Kementerian Sosial tapi pemahaman ini terjadi setelah mereka mendapatkan bantuan, bukan sebelumnya. Selanjutnya dikatakan tidak ada sosialisasi yang dilakukan mengenai bansos sehingga masyarakat merasa bahwa literasi bansos yang mereka peroleh masih sangat minim.

Selanjutnya berdasarkan indikator ketiga, tujuan program, masyarakat merasakan bahwa tujuan program bansos untuk peningkatan daya beli masyarakat sudah terpenuhi, terutama untuk keperluan bahan pokok kebutuhan sehari-hari dan juga tambahan untuk pendidikan walau belum sepenuhnya mencukupi. Namun responden menilai bahwa program bansos yang selama ini mereka dapatkan belum bisa memberikan kekuatan untuk keluar dari kemiskinan karena jumlah bantuan yang diberikan masih sangat sedikit jumlahnya dan terkadang bisa saja terhenti tiba-tiba tanpa mereka tau penyebabnya. Masyarakat merekomendasikan agar bantuan sosial bisa diberikan lebih banyak untuk keperluan pendidikan sekolah karena hal itu merupakan investasi di masa mendatang yang bisa menjadi peluang untuk bisa keluar dari kemiskinan. Selain itu, masyarakat juga meminta bansos yang produktif sehingga jika ada masyarakat yang mempunyai keahlian dalam berwirausaha UMKM, bisa menjadi pendapatan potensial di masa mendatang.

Berdasarkan indikator keempat, pemantauan program, masyarakat menyatakan tidak ada pengevaluasian program bansos yang dilakukan oleh Pihak dinas sosial atau desa. Pertemuan hanya bersama petugas TKSK untuk program bansos saja. Selain itu, masyarakat menilai bantuan sosial yang disalurkan selama ini masih belum sepenuhnya transparan dan partisipatif. Hal ini disebabkan karena ada masyarakat yang tidak layak juga menerima bansos dan tidak ada pelibatan masyarakat secara berkala dalam pemantauan bansos.

Potensi jebakan kemiskinan dilihat dari kondisi geografis, ketersediaan fasilitas publik, akses sumber daya alam, dan bencana alam. Dari semua indikator tersebut didapati bahwa kondisi geografis di pedesaan dan perkotaan, untuk seluruh akses fasilitas publik bisa dijangkau dengan baik. Akses sumber daya alam juga bisa didapat oleh seluruh masyarakat. Dari seluruh wilayah survei, ditemui hanya sebanyak 35,54 persen KPM memiliki lahan pertanian/ pekebunan, memiliki usaha atau aset yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan. Hal ini menunjukkan KPM tersebut memiliki potensi cukup besar untuk keluar dari kemiskinan yang selama ini melingkupi kehidupan mereka, asalkan mereka mendapatkan intervensi yang tepat. Sedangkan KPM lainnya bekerja sebagai buruh tani/kebun dan tidak memiliki aset produktif akan akan lebih sulit untuk keluar dari jebakan kemiskinan. apalagi jika dilihat dari Tingkat Pendidikan, para buruh tani/kebun yang tidak memiliki lahan produktif tersebut ternyata hanya memiliki rata-rata tingkat Pendidikan yang rendah.

Selama ini desa memiliki instrumen pengentasan kemiskinan berupa program bantuan langsung Tunai (BLT) desa. Syarat utama penerima BLT desa adalah rumah tangga yang bukan KPM bansos yang disalurkan oleh Kementerian social. Namun bagi aparat desa, jumlah dana yang tersedia untuk program BLT desa kurang memadai untuk mengentaskan kemiskinan. selain jumlah dana BLT desa yang tidak besar, BLT desa lebih fokus pada upaya menjaga daya beli masyarakat yang tidak produktif seperti lansia, dan kelompok disabilitas.

Pemerintah daerah di wilayah survei tidak memiliki program bansos regular seperti yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Walau daerah memiliki program bansos namun minimnya anggaran daerah menjadi penyebab ketidakmampuan daerah melaksanakan program bansos regular. Selama ini pemda melalui Dinas Sosial dan Baitul Mal menjalankan program bansos insidental. Kedua institusi ini menjalankan program dalam berbagai bentuk seperti bantuan modal usaha, bantuan untuk fakir dan miskin, bantuan alat untuk kelompok disabilitas, dan bantuan lainnya sesuai asnaf.

Walaupun memiliki program dengan irisan tujuan yang besar, hingga saat ini Dinas Sosial dan Baitul Mal belum merujuk pada sumber data penerima manfaat. Dinas Sosial menggunakan DTKS sebagai rujukan dan Baitul Mal menggunakan daftar calon penerima dana ZIS yang diusulkan dari Baitul Mal Desa. Hal ini menyebabkan kurang optimalnya dampak yang dihasilkan dari upaya pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan.

Sebagai rekomendasi tindak lanjut diharapkan pemerintah perlu menetapkan satu sumber data yang berkaitan dengan target sasaran program bansos yang bisa digunakan sebagai database penduduk miskin dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hal ini bisa dilakukan dengan terus berkoordinasi lintas instansi dan melakukan pemadanan data dengan data kemiskinan nasional, seperti DTKS, P3KE, dan Regsosek. Pemadanan data diharapkan bisa menghasilkan data tunggal dengan mengesampingkan kepentingan instansi manapun. Ketepatan saran dan satu data yang digunakan akan mempermudah pemerintah daerah merumuskan dan menetapkan langkah strategis dalam menurunkan angka kemiskinan di Aceh melalui pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Selanjutnya perlu terus melakukan sosialisasi program bantuan sosial yang efisien dan efektif untuk meningkatkan literasi bansos kepada masyarakat. Setelah itu perlu banyak memberikan jenis bantuan sosial yang bisa meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan penciptaan program padat karya yang bisa meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Kemudian evaluasi berkelanjutan untuk bantuan sosial harus dilakukan untuk menjaga keefektifan bansos kepada masyarakat miskin.

Aparatur desa perlu menyusun program kegiatan yang bisa meningkatkan produktivitas warga seperti pelatihan bisnis, mengembangkan UMKM sesuai potensi desa, serta menghidupkan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Desa juga harus mengupayakan agar belanja dana desa dapat dilakukan di desa sendiri sehingga perputaran uang di desa menjadi lebih panjang, serta mengupayakan hasil kegiatan dana desa dapat dinikmati sebesar mungkin oleh penduduk desa.

Pemerintah daerah perlu melakukan inovasi pada setiap tahap pembangunan. Perencanaan yang baik, terukur, dan memiliki tujuan yang jelas harus disertai dengan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai setiap program yang ditetapkan. Tantangan terbesar adalah minimnya anggaran belanja daerah sehingga alokasi dana untuk pengentasan

kemiskinan juga sangat kecil. Oleh sebab itu, Pemda sebaiknya fokus pada program kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas SDM penduduk miskin. Koordinasi antar SKPK serta dengan instansi yang sama di provinsi merupakan cara terbaik untuk mengkapitalisasi sumber daya pemerintah dan memanfaatkan sumber daya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Jika penduduk miskin mempunyai SDM yang lebih baik maka akan lebih mudah mendorong mereka untuk memulai usaha yang lebih produktif dari kondisi sebelumnya.

3.7	Potensi Jebakan Kemiskinan (Poverty Trap).....	113
3.7.1.	Kondisi Geografis dan Ketersediaan Fasilitas Publik.....	114
3.7.2	Tata Kelola dan Implementasi Desa untuk Bansos.....	125
3.7.3	Potensi Jebakan Kemiskinan.....	129
BAB IV	KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT	133
4.1	Kesimpulan.....	133
4.2	Rencana Tindak Lanjut	135
DAFTAR PUSTAKA.....		137

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Perbandingan Persentase Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia	40
Gambar 2.2	Capaian Indikator TPB/SDGs Tahun 2021	43
Gambar 3.1	Angka Kemiskinan Aceh dan Indonesia Tahun 2007-2024 (%).....	56
Gambar 3.1	Angka Kemiskinan Aceh dan Indonesia Tahun 2007-2024 (%).....	56
Gambar 3.2	Jenis Kelamin Responden.....	67
Gambar 3.3	Pekerjaan Utama Responden Sebelum Bansos.....	67
Gambar 3.4	Pekerjaan Utama Responden Setelah Bansos	68
Gambar 3.5	Pekerjaan Sampingan Responden Sebelum Bansos	69
Gambar 3.6	Pekerjaan Sampingan Setelah Bansos	69
Gambar 3.7	Keahlian Responden	71
Gambar 3.8	Pendidikan Responden	72
Gambar 3.9	Status Perkawinan Responden	72
Gambar 3.10	Jumlah Tanggungan Responden.....	73
Gambar 3.11	Jenis Bantuan Sosial yang Tersedia	75
Gambar 3.12	Pengelompokan Bantuan Sosial yang Diterima	75
Gambar 3.13	Kelayakan Menerima Bantuan Sosial	76
Gambar 3.14	Kesesuaian Bansos yang Diterima (Persen).....	77
Gambar 3.15	Bantuan Sosial yang Diharapkan (Orang).....	77
Gambar 3.16	Pemahaman Jenis Bansos	79
Gambar 3.17	Sumber Bansos yang Diketahui oleh Responden	79
Gambar 3.18	Sosialisasi Bantuan Sosial.....	80
Gambar 3.19	Sumber Informasi Bansos (Persen)	81
Gambar 3.20	Bansos dan Peningkatan Daya Beli	83
Gambar 3.21	Bansos dan Kemiskinan (Persen).....	84
Gambar 3.22	Pengevaluasian Bantuan Sosial	85
Gambar 3.23	Kesesuaian Aturan Penyaluran Bansos	86
Gambar 3.24	Kualitas Tanah.....	117
Gambar 3.25	Bencana Alam	119
Gambar 3.26	Infrastruktur Jalan	122
Gambar 3.27	Ketersediaan Air Bersih	124
Gambar 3.28	Prinsip Transparansi dalam Tata Kelola Bansos	126
Gambar 3.29	Prinsip Partisipasi dalam Tata Kelola Bansos.....	127
Gambar 3.30	Prinsip Kepentingan Umum dalam Tata Kelola Bansos	128
Gambar 3.31	Prinsip Kebaikan dalam Tata Kelola Bansos	129
Gambar 3.32	Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2022 dan 2024	130
Gambar 3.33	Potensi Poverty Trap.....	131

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Penerima, Anggaran Bansos Pangan, Jumlah dan Garis Kemiskinan Kabupaten Aceh Tengah.....	59
Tabel 3.2	Penerima, Anggaran Bansos Pangan, Jumlah dan Garis Kemiskinan Kabupaten Bener Meriah.....	60
Tabel 3.3	Penerima, Anggaran Bansos Pangan, Jumlah dan Garis Kemiskinan Kabupaten Aceh Barat Daya.....	61
Tabel 3.4	Penerima, Anggaran Bansos Pangan, Jumlah dan Garis Kemiskinan Kabupaten Nagan Raya	62
Tabel 3.5	Penerima, Anggaran Bansos Pangan, Jumlah dan Garis Kemiskinan Kabupaten Bireun	63
Tabel 3.6	Penerima, Anggaran Bansos Pangan, Jumlah dan Garis Kemiskinan Kabupaten Pidie Jaya.....	64
Tabel 3.7	Lokasi Penelitian	66
Tabel 3.8	Pendapatan dan Pengeluaran Responden	70
Tabel 3.9	Kesesuaian Penyaluran Bansos dengan Aturan (Orang).....	86
Tabel 3.10	Ketersediaan Fasilitas Pendidikan (Persen)	120
Tabel 3.11	Ketersediaan Fasilitas Kesehatan (Persen)	121
Tabel 3.12	Distribusi responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Kepemilikan Lahan/Usaha	132

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persoalan kemiskinan masih menjadi persoalan yang belum memiliki penuntasan yang berkelanjutan. Banyak kajian tentang kemiskinan, namun belum memberikan dampak yang signifikan dalam penurunan kemiskinan. SMERU (2002) bekerjasama dengan BKPK (Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) menulis Buku Panduan tentang Paket Informasi Dasar Penanggulangan Kemiskinan, menyebutkan bahwa ada empat strategi dalam mengentaskan kemiskinan. *Pertama*, Kebijakan dan Program untuk Membuka Peluang atau Kesempatan Bagi Orang Miskin; *Kedua*, Kebijakan dan Program untuk Memberdayakan Kelompok Miskin; *Ketiga*, Kebijakan dan Program yang Melindungi Kelompok Miskin; dan *Keempat*, Kebijakan dan Program untuk Memutus Pewarisan Kemiskinan Antar Generasi melalui Hak Anak dan Peranan Perempuan.

Selanjutnya Presiden melalui Inpres No. 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi nol atau dikenal dengan istilah *zero extreme poverty* pada tahun 2024. Hal ini sesuai dengan tujuan salah satu indikator tujuan pembangunan berkelanjutan, tepatnya tujuan pertama dalam mencapai negara tanpa kemiskinan. Berbagai strategi juga diberikan, yaitu: (1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial dan subsidi yaitu kelompok program/kegiatan; (2) peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat; dan (3) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar.

Seluruh strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat selanjutnya diikuti oleh setiap provinsi dalam upayanya mengurangi angka kemiskinan. Berbagai bantuan sosial dan jaminan sosial diberikan

kepada masyarakat yang sudah teridentifikasi miskin. Mulai dari bantuan pangan dan non pangan, bantuan tunai dan non-tunai, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan pemberdayaan ekonomi yang dikemas dalam nama bantuan yang beraneka ragam. Seluruh bantuan sosial ini direncanakan bisa memberikan peningkatan daya beli masyarakat dan menciptakan kemandirian masyarakat.

Penelitian ini ingin melihat sejauh mana efektivitas bantuan sosial yang sudah diberikan kepada masyarakat miskin. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan tingkat pencapaian hasil, yang dikaitkan dengan konsep efisiensi (Rompas, 2018). Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagian cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan output yang dapat dicapai. Efektivitas berkaitan dengan ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program.

Ketepatan sasaran program yang dilaksanakan adalah seberapa sesuai program bantuan sosial yang direncanakan dengan tujuan yang diinginkan (Pramanik, 2020). Di dalam ketepatan sasaran program ini akan dianalisis kesesuaian sasaran program kepada masyarakat sebagai penerima bantuan sosial. Kemudian sosialisasi program yang bertujuan memberi pemahaman dan informasi kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat yang ditargetkan. Sosialisasian program ini sangat penting, karena bisa memberi pemahaman terhadap masyarakat jenis bantuan sosial yang disediakan oleh pemerintah. Setelah itu, masyarakat bisa memilih jenis bantuan sosial apa saja yang bisa didapat dan mana yang tidak. Selanjutnya tujuan program yang perlu dinilai dengan melihat pencapaian visi dan misi suatu program dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan program bantuan sosial adalah membantu masyarakat miskin dalam hal peningkatan kemampuan daya beli sehingga mampu keluar dari lingkaran kemiskinan yang ada. Terakhir, pemantauan program yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan program dengan tujuan mendapatkan kesesuaian

antara aturan yang dibuat oleh pemerintah dengan pelaksanaan bantuan sosial yang sebenarnya.

Selanjutnya, perlu ditinjau apakah program bantuan sosial mampu mengangkat kehidupan masyarakat untuk keluar dari jebakan kemiskinan. Jebakan kemiskinan, sebuah fenomena yang kompleks dan memiliki banyak sisi, merupakan siklus yang terus berlanjut di mana individu atau masyarakat tidak dapat keluar dari kemiskinan terlepas dari upaya mereka. Mengidentifikasi indikator jebakan ini dan mengembangkan langkah-langkah efektif untuk mengatasinya merupakan langkah penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin.

Indikator-indikator jebakan kemiskinan sangat beragam dan sering kali saling terkait. Faktor-faktor biofisik dan geografis yang merugikan, seperti kualitas tanah yang buruk, akses yang terbatas terhadap sumber daya alam, dan paparan terhadap bencana alam, dapat menghambat kemajuan ekonomi dan menyulitkan seseorang untuk berinvestasi pada sumber daya yang dibutuhkan untuk melepaskan diri dari lingkaran kemiskinan (Sachs & McCord, 2008). Selain itu, kurangnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya dapat semakin memperburuk situasi, menjebak individu dalam lingkaran setan kekurangan (Lwanga-Ntale & McClean, 2004).

Tata kelola pemerintahan daerah yang tidak efektif dan implementasi kebijakan yang buruk juga dapat berkontribusi terhadap bertahannya perangkap kemiskinan (Lwanga-Ntale & McClean, 2004). Faktor-faktor seperti tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, ketimpangan, dan sektor pertanian yang lemah semakin memperparah masalah ini (Rivera, 2020).

Mengukur secara akurat tingkat dan tingkat keparahan jebakan kemiskinan sangat penting untuk merancang intervensi yang efektif. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah analisis kemiskinan berbasis aset, yang mengkaji akumulasi dan distribusi aset rumah tangga dari waktu

ke waktu (Carter & Barrett, 2006). Metode ini dapat membantu membedakan antara bentuk-bentuk kemiskinan yang bersifat sementara dan persisten, serta mengidentifikasi adanya perangkap kemiskinan.

Pendekatan lainnya adalah dengan menggunakan ukuran kemiskinan kelas Foster-Greer-Thorbecke, yang dapat diperluas untuk menangkap sifat kemiskinan yang bersifat struktural dan berjangka panjang (Carter & Barrett, 2006). Mengatasi jebakan kemiskinan membutuhkan pendekatan multifaset yang menggabungkan pertumbuhan ekonomi berorientasi pasar dengan intervensi yang ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat termiskin (Sachs & McCord, 2008).

Mempromosikan kewirausahaan dan mendukung usaha kecil dapat menjadi strategi yang efektif karena dapat menciptakan peluang ekonomi dan menumbuhkan kemandirian (Moradi et al., 2020). Berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial juga dapat membantu memutus rantai kemiskinan antargenerasi (Lwanga-Ntale & McClean, 2004).

Memperkuat tata kelola pemerintahan lokal dan menerapkan kebijakan yang efektif untuk mengatasi akar masalah kemiskinan, seperti ketidaksetaraan dan infrastruktur yang buruk, merupakan hal yang krusial untuk solusi yang berkelanjutan (Lwanga-Ntale & McClean, 2004).

Bantuan luar negeri dan bantuan pembangunan dapat memainkan peran penting dalam membiayai intervensi yang tidak dapat dibiayai sendiri oleh negara-negara miskin, tetapi sumber daya ini harus diarahkan ke negara-negara yang memiliki tata kelola yang baik dan program-program yang berbasis bukti (Sachs & McCord, 2008).

Dengan memahami indikator-indikator jebakan kemiskinan, mengembangkan alat ukur yang kuat, dan menerapkan serangkaian solusi yang komprehensif, para pembuat kebijakan dan praktisi pembangunan

dapat bekerja untuk memberantas tantangan yang terus berlanjut ini dan menciptakan masa depan yang lebih adil dan sejahtera bagi semua.

Penelitian ini ingin melihat sejauh mana efektivitas bantuan sosial yang sudah diberikan kepada masyarakat miskin. Penelitian ini akan menyasar masyarakat yang menerima program bantuan sosial baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Kabupaten/kota. Data yang digunakan akan mengacu pada data DTKS yang bersumber dari Dinas Sosial Provinsi Aceh dan data penerima ZIS yang bersumber dari Baitul Mal.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Kajian Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Aceh mengacu kepada landasan yuridis formal sebagai berikut:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan
2. Perpres No, 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
3. Permensos No. 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai
4. Permensos No. 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako
5. Permendagri No. 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang Bersumber dari APBD
6. Permensos No. 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Departemen Sosial.
7. Inpres 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
8. Pergub Aceh No. 20 tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa Kepada Anak Yatim, Piatu, dan/atau Yatim Piatu Dalam Wilayah Aceh
9. Pergub Aceh No. 119 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pedoman Belanja

Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh

10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Aceh

1.3 Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud, tujuan dan sasaran Penyusunan Kajian Efektivitas Bantuan Sosial terhadap Masyarakat Miskin di Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

A. Maksud

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya untuk:

1. Mengidentifikasi efektivitas bantuan sosial terhadap masyarakat miskin dari berbagai program yang sudah dilakukan di Provinsi Aceh.
2. Identifikasi potensi terjadinya *poverty trap* sehingga menghambat upaya pengentasan kemiskinan di aceh

B. Tujuan

Tujuan Penyusunan Kajian Efektivitas Bantuan Sosial terhadap Masyarakat Miskin adalah:

1. Melakukan identifikasi terhadap efektivitas berbagai program bantuan sosial yang sudah dilakukan di Provinsi Aceh yang berkaitan dengan keberhasilan dan hambatan yang ada.
2. Mengkaji adanya potensi *poverty trap* di Aceh sehingga dapat dirumuskan rekomendasi untuk efektivitas bantuan sosial terhadap masyarakat miskin di Aceh.

C. Sasaran

Sasaran yang perlu dicapai dalam penyusunan kajian efektivitas penghapusan kemiskinan ekstrem diantaranya sebagai berikut:

1. Teridentifikasi efektivitas program bantuan sosial yang telah dilakukan di Aceh kepada masyarakat miskin, meliputi indikator efektivitas, keberhasilan dan hambatan yang ada.

2. Terciptanya rekomendasi kepada pengambil kebijakan terhadap upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka efektivitas bantuan sosial kepada masyarakat miskin di Provinsi Aceh.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kajian Efektivitas Bantuan Sosial terhadap Masyarakat Miskin di Provinsi Aceh yaitu:

A. Lingkup Administratif

Lingkup wilayah dalam pelaksanaan kegiatan adalah wilayah Provinsi Aceh dengan mengambil sampel kabupaten/kota yang persentase penerima bantuan program bantuan sosial paling banyak dan paling sedikit. Adapun kabupaten yang disurvei adalah Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Bireuen, dan Pidie Jaya. Untuk mendapatkan informasi yang lebih presisi, peneliti mendistribusi sampel pada 3 (tiga) area. Pembagian area dilakukan dengan kriteria jarak dari pusat pemerintahan/ibukota kabupaten, Karakteristik penerima bansos di daerah sekitar pusat pemerintahan daerah dengan wilayah survei adalah Kabupaten aceh tengah dan Bener Meriah. Area kedua adalah daerah pedesaan yang jauh dari pusat kota/pusat pemerintahan. Untuk wilayah pedesaan terpilih Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Nagan Raya. area ketiga adalah area yang berada di sub-urban. Daerah sub-urban yang dipilih adalah Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Pidie Jaya.

B. Lingkup Substansi

1. Pengkajian terhadap kondisi terkini wilayah dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin;
2. Mengidentifikasi efektivitas bantuan sosial kepada masyarakat miskin;
3. Pengidentifikasi potensi jebakan kemiskinan (*poverty trap*) dalam upaya terhambatnya penanggulangan kemiskinan

4. Penganalisaan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan dalam pengoptimalan perencanaan, penerima, dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN

2.1 Pembangunan Ekonomi dan Kemiskinan

2.1.1 Tujuan Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan proses yang kompleks yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada peningkatan angka pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), tetapi juga mencakup berbagai aspek sosial yang lebih luas, seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, dan pemerataan distribusi kekayaan. Menurut Todaro dan Smith (2011), pembangunan ekonomi dapat diukur tidak hanya dari segi angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan manusia, seperti berkurangnya angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup.

Beberapa aspek terkait dengan tujuan Pembangunan ekonomi, yaitu;

1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini mencakup peningkatan kualitas hidup individu dan keluarga melalui peningkatan pendapatan, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan perumahan yang layak.

2. Pengurangan Kemiskinan

Pembangunan ekonomi yang inklusif berfokus pada pengurangan kemiskinan. Strategi pengentasan kemiskinan sering melibatkan pemberdayaan masyarakat, penyediaan pekerjaan yang layak, serta reformasi sosial yang menjamin distribusi pendapatan yang lebih merata.

3. Pemerataan Pembangunan

Tujuan pembangunan ekonomi juga mencakup pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Dalam banyak negara berkembang, terdapat ketimpangan yang signifikan antara kawasan kaya dan miskin, yang dapat memperburuk ketegangan sosial dan menghambat stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, distribusi manfaat pembangunan yang adil di seluruh wilayah menjadi hal yang sangat penting. Selain itu, pemerataan pembangunan mencakup pemberian akses yang setara kepada layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lainnya.

4. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah salah satu tujuan utama dalam menghadapi tantangan global, seperti perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Dalam konteks ini, pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya alam dan keberlangsungan hidup masyarakat dalam jangka panjang.

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan mencakup penerapan teknologi ramah lingkungan, efisiensi energi, serta perlindungan terhadap ekosistem. Dengan mempromosikan ekonomi hijau, diharapkan pembangunan ekonomi dapat berjalan seiring dengan pelestarian alam dan pencapaian tujuan pembangunan sosial yang inklusif.

5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pembangunan ekonomi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, salah satu tujuan utama pembangunan ekonomi adalah meningkatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk mempersiapkan angkatan kerja yang lebih kompetitif di pasar global. Pendidikan yang lebih baik akan menghasilkan tenaga kerja yang terampil, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan daya saing suatu negara.

6. Mencapai Keadilan Sosial

Pembangunan ekonomi juga bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial. Keadilan sosial yaitu tercapainya distribusi sumber daya yang lebih adil, tidak hanya dalam hal kekayaan, tetapi juga kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses sosial dan politik. Ketimpangan sosial yang tinggi dapat menghambat pembangunan ekonomi karena dapat memicu ketidakstabilan sosial, ketidakadilan hukum, dan diskriminasi.

Keadilan sosial dapat tercapai melalui kebijakan yang mendorong pemerataan kesempatan, seperti kebijakan afirmatif, pengurangan kesenjangan gender, dan perlindungan hak-hak minoritas.

Tujuan Pembangunan Ekonomi dari Sudut Pandang Global, Regional ASEAN, dan Nasional

a. Sudut Pandang Global

Dalam Tujuan dan Target ini, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) menetapkan visi yang sangat ambisius dan transformasional. PBB membayangkan dunia yang bebas dari kemiskinan, kelaparan, penyakit, dan kekurangan, di mana semua kehidupan dapat berkembang. PBB membayangkan dunia yang bebas dari rasa takut dan kekerasan. Sebuah dunia dengan literasi universal. Sebuah dunia dengan akses yang adil dan universal terhadap pendidikan berkualitas di semua tingkatan, terhadap perawatan kesehatan dan perlindungan sosial, di mana kesejahteraan fisik, mental, dan sosial terjamin. Dunia di mana PBB menegaskan kembali komitmennya terkait hak asasi manusia untuk mendapatkan air minum dan sanitasi yang aman dan di mana terdapat peningkatan kebersihan; dan di mana makanan cukup, aman, terjangkau, dan bergizi. Dunia di mana habitat manusia aman, tangguh, dan berkelanjutan, serta di mana terdapat akses universal terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan.

PBB membayangkan sebuah dunia yang menghormati hak asasi manusia dan martabat manusia secara universal, supremasi hukum, keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi; menghormati ras, etnis, dan keanekaragaman budaya; dan kesempatan yang sama yang memungkinkan realisasi penuh potensi manusia dan berkontribusi pada kemakmuran bersama. Dunia yang berinvestasi pada anak-anaknya dan di mana setiap anak tumbuh bebas dari kekerasan dan eksploitasi. Sebuah dunia di mana setiap perempuan dan anak perempuan menikmati kesetaraan gender sepenuhnya dan semua hambatan hukum, sosial dan ekonomi untuk pemberdayaan mereka telah dihilangkan. Dunia yang adil, setara, toleran, terbuka, dan inklusif secara sosial, di mana kebutuhan mereka yang paling rentan terpenuhi.

PBB membayangkan sebuah dunia di mana setiap negara menikmati pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkesinambungan, serta pekerjaan yang layak bagi semua. Sebuah dunia di mana pola konsumsi dan produksi serta penggunaan semua sumber daya alam - dari udara ke darat, dari sungai, danau dan akuifer ke samudra dan laut - berkelanjutan. Sebuah dunia di mana demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik dan supremasi hukum serta lingkungan yang mendukung di tingkat nasional dan internasional, sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan, termasuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, pembangunan sosial, perlindungan lingkungan, serta pemberantasan kemiskinan dan kelaparan. Pembangunan dan penerapan teknologi yang peka terhadap iklim, menghargai keanekaragaman hayati, dan tangguh. Sebuah dunia di mana umat manusia hidup selaras dengan alam dan di mana satwa liar dan spesies hidup lainnya dilindungi.

UNDP berharap pada tahun 2025 dapat membantu memberdayakan 100 juta penduduk miskin, terpinggirkan, dan terkucilkan agar dapat keluar dari kemiskinan dan kerentanan multidimensi yang terus-menerus. UNDP akan menerapkan pendekatan sistem yang menangani kemiskinan

multidimensi, berinvestasi pada aset, layanan, dan perlindungan sosial di berbagai sektor. UNDP akan mendorong penciptaan lapangan kerja, perlindungan sosial dan jaring pengaman sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan “kelompok menengah yang hilang”, individu-individu yang rentan yang bekerja di sektor informal, dengan fokus pada perempuan, yang 85 persen di antaranya di negara-negara berkembang berada dalam pekerjaan informal. Organisasi ini akan bekerja sama dengan mitra seperti ILO untuk membuat kasus bisnis bagi perlindungan sosial sebagai investasi sumber daya manusia untuk melindungi individu dari guncangan dan meningkatkan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan mitra seperti ILO dan UNICEF, organisasi ini akan meningkatkan keterlibatan dalam pemberdayaan ekonomi kaum muda, dengan fokus pada pekerjaan yang layak bagi kaum muda, pekerjaan ramah lingkungan, kewirausahaan sosial, dan melindungi pekerja informal.

UNDP akan terus bekerja sama dengan pemerintah menuju kerangka kerja pembiayaan nasional terpadu yang menyelaraskan pembiayaan publik dan swasta dengan Tujuan; dan dengan kementerian keuangan dan bank sentral untuk mengintegrasikan Tujuan ke dalam kerangka kerja anggaran dan pajak nasional serta regulasi sektor swasta. Melalui proses pembiayaan pembangunan G20 dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNDP akan bekerja untuk memastikan bahwa Tujuan-tujuan tersebut diintegrasikan ke dalam reformasi sistem keuangan global.

UNDP akan bekerja sama dengan Pemerintah dan sektor swasta untuk memobilisasi keuangan dalam skala besar, mengembangkan jalur investasi yang selaras dengan Tujuan dan mengarahkan aliran modal ke jalur investasi negara tersebut melalui SDG Investor Platform dan alat dan layanan pembiayaan berorientasi Tujuan, seperti instrumen utang negara dan Standar Dampak TPB untuk dana ekuitas, obligasi, dan perusahaan swasta. Contoh terbaru dari dukungan UNDP untuk mengkatalisasi modal investasi yang signifikan termasuk obligasi senilai hampir \$5 miliar yang selaras

dengan Tujuan yang diterbitkan oleh Bank Pembangunan Baru dan Pemerintah Indonesia dan Meksiko.

Untuk mewujudkan SDGs dan Agenda 2030, UNDP mendukung negara-negara menuju tiga arah perubahan:

- Transformasi struktural, termasuk transisi hijau, inklusif, dan digital, bekerja sama dengan negara-negara di luar penyelesaian tantangan pembangunan langsung untuk mendukung perubahan dalam sistem dan struktur yang mendasari pembangunan negara. Pandemi merupakan kesempatan untuk menata ulang pembangunan dan mempercepat transformasi sistem menuju model yang lebih inklusif, akuntabel, dan berkelanjutan. Bergantung pada konteks suatu negara, fokus transisi menuju ekonomi hijau dan inklusif akan bervariasi, mulai dari meningkatkan produktivitas ekonomi hingga mendorong transisi pembangunan berkelanjutan melalui inovasi dan kreativitas. Dalam semua kasus, tata kelola yang efektif sangat penting untuk mencapai transformasi tersebut dan mencegah pembalikan arah;
- Tidak meninggalkan siapa pun di belakang, pendekatan berbasis hak yang berpusat pada pemberdayaan, inklusi, kesetaraan, agensi manusia, dan kemampuan pembangunan manusia yang mengakui bahwa kemiskinan dan ketidaksetaraan bersifat multidimensi;
- Membangun ketangguhan, memperkuat kapasitas negara, lembaga, dan masyarakat untuk mencegah, memitigasi, dan merespons berbagai risiko, termasuk krisis, konflik, bencana alam, iklim, dan guncangan sosial dan ekonomi.

b. Sudut Pandang Regional ASEAN

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) memiliki beberapa tujuan untuk pembangunan ekonomi, termasuk:

- Integrasi ekonomi: Membentuk pasar tunggal dan basis produksi, serta mengintegrasikan ASEAN secara penuh ke dalam ekonomi global
- Wilayah yang kompetitif: Menciptakan kawasan ekonomi yang stabil, makmur, dan berdaya saing tinggi
- Pembangunan yang merata: Memastikan pembangunan ekonomi yang merata
- Pergerakan bebas: Memfasilitasi pergerakan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan modal
- Perlindungan dan promosi investasi: Melindungi dan mempromosikan investasi

MEA didirikan pada tahun 2003. Beberapa tujuan lain dari ASEAN meliputi: Mempercepat pertumbuhan ekonomi, Mendorong kemajuan sosial, Mendorong pengembangan budaya, dan Mendorong perdamaian dan stabilitas regional. Beberapa inisiatif lain yang terkait dengan pembangunan ekonomi ASEAN meliputi:

- Ekonomi melingkar. Mengadaptasi model bisnis sirkular untuk menciptakan peluang bisnis dan kredit karbon sukarela
- Ekonomi biru. Mengembangkan basis data lembaga dan pakar yang bekerja pada isu ekonomi biru
- Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Mendukung pengembangan UMKM, yang berkontribusi terhadap lapangan kerja, PDB, dan ekspor nasional.

c. Sudut Pandang Nasional

Tujuan Pertama dari SDGS Indonesia adalah Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Manapun dengan target sebagai berikut:

- Target 1.1: Pada tahun 2030 mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari \$1.25 per hari.

- Target 1.2: Pada tahun 2030 mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.
- Target 1.3: Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.
- Target 1.4: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.
- Target 1.5: Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.
- Target 1.6: Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.
- Target 1.7: Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.

2.1.2 Kemiskinan

2.1.2.1 Kemiskinan Absolut

Konsep kemiskinan absolut berkaitan dengan standar hidup layak minimum di suatu wilayah pada periode tertentu. Dalam konsep ini, seseorang dianggap miskin jika kehidupan orang tersebut dianggap lebih rendah dari standar hidup layak. Kemiskinan absolut dapat dipahami sebagai perbedaan antara tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Menurut konsep kemiskinan absolut, seseorang dianggap miskin jika ia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum, seperti makanan, pakaian, kesehatan, perumahan, dan pendidikan, yang diperlukan untuk memungkinkan standar hidup yang layak dan bekerja secara optimal. Kebutuhan primer minimum biasanya diterjemahkan ke dalam ukuran finansial, mengingat banyaknya dimensi yang harus dipenuhi untuk menggambarkan kehidupan yang layak.

Salah satu keuntungan dari konsep kemiskinan absolut adalah kemampuannya untuk dibandingkan antar periode dan wilayah, asalkan definisi kemiskinan yang digunakan tidak berubah. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, kehidupan dianggap miskin atau tidak tergantung pada struktur rumah tangga. Menurut Biro Sensus Amerika Serikat, jumlah pendapatan minimum untuk keluarga dengan empat anggota tanpa anak di bawah usia 18 tahun untuk dianggap tidak miskin pada tahun 2010 adalah US\$22.541. Sementara itu, untuk keluarga beranggotakan enam orang (empat orang dewasa dan dua anak), jumlah pendapatan minimum adalah US\$22.162 per tahun. Dengan menggunakan standar ini, tingkat kemiskinan adalah 15,1% pada tahun 2014, meningkat dari 14,3% pada tahun 2010. Definisi kemiskinan yang tidak berubah membuat konsep kemiskinan absolut dapat digunakan untuk menilai apakah kebijakan pengentasan kemiskinan berhasil atau tidak.

Menurut World Bank (2020), garis kemiskinan internasional yang digunakan untuk mengukur kemiskinan absolut adalah USD 1,90 per hari berdasarkan purchasing power parity (PPP). Garis kemiskinan ini menggambarkan jumlah pendapatan yang dibutuhkan untuk membeli barang dan jasa dasar yang diperlukan untuk bertahan hidup di berbagai negara, disesuaikan dengan daya beli lokal. Populasi yang menjadi acuan adalah konsumsi rata-rata di 15 negara termiskin di dunia, yaitu Malawi, Mali, Ethiopia, Sierra Leone, Niger, Uganda, Gambia, Rwanda, Guinea-Bissau, Tanzania, Tajikistan, Mozambik, Chad, Nepal, dan Ghana. Tujuan Bank Dunia dalam menetapkan definisi kemiskinan adalah untuk membandingkan tingkat kemiskinan di antara negara-negara, yang akan mempengaruhi alokasi distribusi bantuan keuangan untuk memerangi kemiskinan global.

Pendekatan kemiskinan absolut ini tidak mempertimbangkan perbedaan standar hidup antar negara atau daerah, dan lebih fokus pada pencapaian akses terhadap kebutuhan dasar yang diperlukan agar seseorang bisa bertahan hidup secara fisik. Oleh karena itu, kemiskinan absolut sering digunakan untuk mengukur kemiskinan secara global, sehingga memungkinkan perbandingan antarnegara dan mengevaluasi pencapaian dalam mengurangi kemiskinan di tingkat dunia. Ciri-ciri Kemiskinan Absolut, yaitu:

1. Kekurangan Akses terhadap Kebutuhan Dasar

Salah satu ciri utama kemiskinan absolut adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Ini meliputi kebutuhan pangan yang cukup, tempat tinggal yang layak, pakaian yang memadai, serta akses ke layanan kesehatan dasar. Individu atau keluarga yang berada dalam kemiskinan absolut sering kali harus mengorbankan kebutuhan dasar demi bertahan hidup. World Bank (2020) menyatakan bahwa orang yang hidup di bawah garis kemiskinan absolut (misalnya, USD 1,90 per hari) tidak dapat

memperoleh makanan yang cukup, tempat tinggal yang layak, atau kebutuhan dasar lainnya.

2. Pengukuran Berdasarkan Garis Kemiskinan yang Tetap

Kemiskinan absolut diukur dengan menggunakan garis kemiskinan tetap yang ditetapkan secara internasional. Garis kemiskinan ini ditentukan berdasarkan purchasing power parity (PPP), yang disesuaikan dengan daya beli lokal. Garis kemiskinan ini mengukur jumlah pendapatan yang diperlukan untuk membeli barang dan jasa dasar di berbagai negara, yang memungkinkan perbandingan antarnegara atau kawasan.

3. Kehidupan dengan Sumber Daya yang Sangat Terbatas

Individu yang hidup dalam kemiskinan absolut memiliki sumber daya yang sangat terbatas, baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial. Mereka tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk mengatasi situasi darurat atau untuk berinvestasi dalam peningkatan kualitas hidup.

4. Keterbatasan dalam Mengakses Pendidikan dan Pelayanan Sosial

Salah satu ciri kemiskinan absolut adalah keterbatasan dalam akses terhadap pendidikan yang layak dan layanan sosial. Individu dalam kondisi ini mungkin tidak dapat mengakses pendidikan dasar yang memadai atau mendapatkan perawatan medis yang penting, yang pada gilirannya menghambat kemampuan mereka untuk memperbaiki kualitas hidup.

2.1.2.2 Kemiskinan Relatif

Garis kemiskinan relatif bergantung pada konsensus masyarakat mengenai kelompok termiskin dalam suatu populasi. Jika konsensus tercapai, maka garis kemiskinan dapat ditetapkan. Kemiskinan tidak hanya diukur berdasarkan standar absolut (seperti garis kemiskinan yang tetap), tetapi juga berdasarkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan atau akses terhadap layanan dan barang-barang dasar di dalam masyarakat.

Kemiskinan relatif dapat dijelaskan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum yang dianggap layak dalam suatu masyarakat tertentu. Artinya, meskipun individu tersebut mungkin memiliki cukup untuk bertahan hidup, mereka tetap berada dalam kondisi ketertinggalan dibandingkan dengan mayoritas anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan relatif ini seringkali dipengaruhi oleh ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, yang dapat mencakup ketimpangan pendapatan, pendidikan, akses kesehatan, dan kualitas perumahan.

Kemiskinan relatif sering diukur dengan menggunakan indikator distribusi pendapatan. Salah satu cara umum untuk mengukurnya adalah dengan menggunakan garis kemiskinan relatif yang biasanya ditetapkan pada persentase tertentu dari median pendapatan dalam suatu negara atau masyarakat. Misalnya, individu yang pendapatannya berada di bawah 50% atau 60% dari median pendapatan dianggap miskin secara relatif. Sebagai contoh, dalam sebuah negara, jika median pendapatan tahunan adalah \$30.000, maka seseorang yang memiliki pendapatan kurang dari \$15.000 per tahun bisa dianggap mengalami kemiskinan relatif. Meskipun mereka mungkin mampu memenuhi kebutuhan dasar, mereka masih akan mengalami kesulitan dalam memenuhi standar hidup yang lebih tinggi, seperti akses pendidikan berkualitas, perawatan kesehatan yang memadai, atau perumahan yang layak.

Townsend (1979) mengemukakan pandangannya tentang kemiskinan relatif, yang menekankan bahwa kemiskinan adalah fenomena sosial yang berkaitan dengan hak individu untuk menikmati kualitas hidup yang layak dalam konteks sosialnya. Dalam karyanya *Poverty in the United Kingdom* (1979), ia menekankan bahwa kemiskinan relatif bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah keterasingan sosial.

2.1.2.3 Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan langsung dan tidak langsung yang disebabkan oleh tatanan kelembagaan atau struktur sosial dalam masyarakat. Tatanan kelembagaan atau struktur sosial dapat diartikan sebagai aturan main yang berlaku (Nainggolan, 2012). Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah terkadang menyebabkan kemiskinan pada sebagian kelompok masyarakat. Kemiskinan ini disebabkan oleh terbatasnya atau bahkan tidak adanya akses kelompok miskin terhadap sumber daya pembangunan yang ada. kemiskinan struktural berakar pada sistem dan kebijakan yang menciptakan ketidakadilan dan ketimpangan dalam distribusi sumber daya. Individu atau kelompok yang terperangkap dalam kemiskinan struktural sering kali tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan posisi ekonomi mereka karena hambatan-hambatan yang bersifat sistemik dan terstruktur.

Menurut William Julius Wilson (1996), kemiskinan struktural adalah hasil dari perubahan sosial yang lebih luas yang memengaruhi kelompok-kelompok masyarakat tertentu, seperti hilangnya pekerjaan industri dan pergeseran struktur pasar tenaga kerja. Kemiskinan struktural sering kali tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor individu (misalnya, kurangnya keterampilan atau pendidikan), tetapi lebih kepada ketidaksetaraan yang terstruktur dalam sistem sosial dan ekonomi. Marx (1867) menjelaskan bahwa kemiskinan dan ketimpangan sosial adalah konsekuensi dari struktur ekonomi kapitalisme yang secara sistematis mendukung kekuasaan dan kekayaan di tangan kelas pemilik kapital, sementara menghambat kesempatan kelas pekerja untuk meningkatkan kehidupan mereka

2.1.2.4 Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau kelompok dalam masyarakat yang tidak ingin memperbaiki kehidupannya

meskipun sudah ada upaya dari pihak lain yang membantunya. Kemiskinan ini juga bisa disebabkan oleh tradisi. Sebagai contoh, sistem warisan yang menyebabkan pembagian lahan, sehingga kepemilikan lahan per keluarga semakin kecil dari generasi ke generasi.

Kemiskinan kultural sering kali digunakan untuk menjelaskan fenomena kemiskinan yang berakar pada norma dan nilai budaya yang mendukung atau memperparah ketidaksetaraan sosial, yang pada gilirannya menghalangi kesempatan kelompok tertentu untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Konsep ini menyoroti peran budaya dan identitas sosial dalam pembentukan kondisi ekonomi dan sosial, dan sering dikaitkan dengan pandangan bahwa individu atau kelompok yang terjebak dalam kemiskinan mungkin dianggap tidak memiliki "budaya" yang mendukung kesuksesan sosial dan ekonomi dalam masyarakat dominan.

Lewis (1961) menjelaskan bahwa budaya kemiskinan adalah pola nilai-nilai yang dipegang oleh individu dalam masyarakat miskin, yang menghalangi mereka untuk memanfaatkan peluang ekonomi dan sosial yang ada, serta membuat mereka merasa tak berdaya untuk mengubah keadaan mereka. Meskipun konsep kemiskinan kultural memberikan wawasan penting tentang hubungan antara budaya dan kemiskinan, banyak kritik terhadap pandangan ini. Michael Harrington (1962) dan John Kenneth Galbraith (1967), berpendapat bahwa penekanan yang berlebihan pada budaya kemiskinan dapat mengabaikan faktor-faktor struktural dan sistemik yang sebenarnya lebih dominan dalam menciptakan kemiskinan, seperti ketidaksetaraan ekonomi, kebijakan publik yang tidak adil, dan kurangnya akses terhadap pendidikan atau pekerjaan yang layak.

2.1.2.5 Kemiskinan berdasarkan Waktu

Kemiskinan berdasarkan waktu merujuk pada konsep kemiskinan yang membedakan antara kemiskinan jangka pendek (atau sementara)

dan kemiskinan jangka panjang (atau permanen). Pemahaman ini memperhatikan bagaimana individu atau kelompok menghadapi kemiskinan dalam durasi yang berbeda, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti dinamika ekonomi, kebijakan sosial, dan perubahan dalam kehidupan individu atau kelompok tersebut.

1. Kemiskinan Jangka Pendek (Temporer)

Kemiskinan jangka pendek mengacu pada situasi di mana individu atau keluarga mengalami kemiskinan sementara, tetapi kemungkinan untuk keluar dari kemiskinan tersebut lebih tinggi. Faktor-faktor seperti kejadian tak terduga, krisis ekonomi jangka pendek, atau penurunan sementara dalam pendapatan bisa menyebabkan kondisi kemiskinan ini. Namun, dengan adanya dukungan sosial atau perubahan kondisi ekonomi, individu atau keluarga ini dapat mengatasi kemiskinan mereka dalam waktu yang relatif singkat. Sen (1999) menyatakan bahwa kemiskinan sering kali terkait dengan keterbatasan kebebasan, namun dalam konteks jangka pendek, banyak individu bisa mengatasi kemiskinan melalui akses yang lebih baik ke peluang ekonomi dan kebijakan sosial yang mendukung.

2. Kemiskinan Jangka Panjang (Permanen)

Sebaliknya, kemiskinan jangka panjang atau permanen menggambarkan kondisi di mana individu atau kelompok terjebak dalam kemiskinan selama periode waktu yang panjang, atau bahkan sepanjang hidup mereka. Faktor-faktor yang berperan dalam kemiskinan jangka panjang termasuk keterbatasan akses terhadap pendidikan, ketidaksetaraan dalam peluang pekerjaan, serta kebijakan sosial dan ekonomi yang tidak memadai. Dalam banyak kasus, kemiskinan ini sering kali diturunkan antar generasi, menciptakan perangkap kemiskinan yang sulit untuk dipecahkan tanpa perubahan struktural yang signifikan. Wilson (1996) berpendapat bahwa kemiskinan yang terjadi dalam jangka panjang sering kali terkait dengan hilangnya pekerjaan di daerah perkotaan, yang mengarah pada terperangkapnya kelompok-kelompok tertentu dalam kemiskinan.

Kemiskinan jangka panjang dapat memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi suatu kelompok secara terus-menerus.

2.1.2.6 Persistensi Kemiskinan (*Persistent Poverty*)

Kemiskinan persisten merujuk pada kondisi di mana individu atau keluarga yang terperangkap dalam kemiskinan tidak memiliki cukup sumber daya atau akses untuk memperbaiki kondisi mereka dalam jangka panjang. Mereka cenderung terjebak dalam siklus kemiskinan yang berulang, di mana faktor-faktor struktural dan kebijakan sosial yang ada tidak memberikan cukup dukungan atau kesempatan untuk keluar dari kondisi tersebut.

Jencks (1972) berpendapat bahwa kemiskinan persisten adalah kondisi di mana individu atau kelompok yang lahir dalam keadaan miskin terus-menerus terperangkap dalam lingkaran kemiskinan tersebut karena ketidaksetaraan struktural yang ada, baik dalam sistem pendidikan, pasar kerja, maupun akses terhadap sumber daya lainnya. Wilson (1996) juga berpendapat bahwa kemiskinan persisten terjadi ketika perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial menciptakan kondisi di mana sebagian besar penduduk miskin tidak memiliki kesempatan untuk keluar dari kemiskinan karena hilangnya pekerjaan yang layak dan ketidaksetaraan kesempatan. Kemiskinan persisten disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait, antara lain:

1. Ketidaksetaraan Ekonomi: Kurangnya distribusi kekayaan yang adil sering menyebabkan sebagian besar kelompok masyarakat terjebak dalam kemiskinan, terutama mereka yang tidak memiliki akses terhadap pekerjaan yang baik atau sumber daya yang memadai.
2. Keterbatasan Pendidikan dan Keterampilan: Akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas membuat generasi berikutnya tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi mereka.

3. Perubahan Ekonomi Struktural: Hilangnya pekerjaan industri dan beralihnya ekonomi ke sektor lain yang tidak menyediakan peluang yang setara bagi mereka yang kurang terdidik atau tidak memiliki keterampilan khusus.
4. Perangkap Kemiskinan Antargenerasi: Kemiskinan sering kali diturunkan dari generasi ke generasi, di mana anak-anak dari keluarga miskin cenderung memiliki akses terbatas terhadap pendidikan dan kesempatan kerja, yang mengarah pada kelanjutan kemiskinan dalam jangka panjang.

2.1.2.7 Kemiskinan Siklikal (*Cyclical Poverty*)

Kemiskinan siklikal merujuk pada kondisi di mana individu, keluarga, atau kelompok masyarakat mengalami kemiskinan berulang-ulang sebagai akibat dari faktor-faktor ekonomi atau sosial yang terjadi secara periodik atau musiman. Kemiskinan jenis ini tidak permanen, tetapi muncul dan hilang dalam siklus yang berulang, tergantung pada perubahan dalam kondisi ekonomi, seperti fluktuasi pasar tenaga kerja, perubahan harga barang dan jasa, atau bencana alam.

Kemiskinan siklikal berhubungan dengan fluktuasi ekonomi yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas dan siklus bisnis. Abegaz menyoroti pentingnya kebijakan ekonomi yang stabil untuk memitigasi dampak siklikal terhadap kelompok miskin.

2.1.2.8 Kemiskinan Musiman (*Seasonal Poverty*)

Kemiskinan musiman adalah jenis kemiskinan yang terjadi secara berulang setiap tahun pada waktu-waktu tertentu, biasanya terkait dengan fluktuasi musiman dalam pendapatan atau pekerjaan. Fenomena ini banyak ditemukan di sektor-sektor ekonomi yang bergantung pada musim

atau siklus tertentu, seperti pertanian, perikanan, perdagangan musiman, atau pariwisata. Selama periode tertentu dalam setahun, individu atau keluarga yang bergantung pada pekerjaan musiman atau hasil pertanian musiman mungkin mengalami kekurangan pendapatan, sementara pada musim lainnya, mereka bisa mendapatkan penghasilan yang cukup.

Kemiskinan musiman terjadi ketika individu atau keluarga yang bergantung pada sektor-sektor yang sangat dipengaruhi oleh musim atau siklus tertentu dalam setahun, seperti pertanian atau perikanan, mengalami kesulitan ekonomi yang berulang pada saat tidak ada pekerjaan atau pendapatan yang tersedia. Dalam banyak kasus, fenomena ini terjadi karena pendapatan musiman yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar selama musim off-season (musim tanpa pekerjaan).

2.1.2.9 Kemiskinan Tidak Terduga (*Accidental Poverty*)

Kemiskinan tak terduga adalah jenis kemiskinan yang terjadi secara tiba-tiba atau tak terduga, sering kali disebabkan oleh peristiwa atau kejadian yang berada di luar kendali individu atau kelompok. Penyebabnya bisa berupa kecelakaan, penyakit mendalam, perubahan drastis dalam ekonomi keluarga, atau kejadian tak terdugalain yang menyebabkan seseorang atau keluarga tiba-tiba kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Wilson (2024) mengemukakan bahwa kemiskinan tak terduga sering kali dipicu oleh penyakit serius yang menyebabkan pengeluaran medis yang tinggi dan hilangnya pendapatan karena ketidakmampuan bekerja. Gupta (2022) juga mengemukakan bagaimana bencana alam dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan tak terduga, di mana individu yang sebelumnya berada dalam lapisan sosial-ekonomi yang lebih baik, tiba-tiba kehilangan rumah dan mata pencaharian mereka.

Berbeda dengan kemiskinan struktural atau siklikal, yang berhubungan dengan faktor ekonomi atau sosial yang lebih lama dan

sistemik, kemiskinan tak terduga biasanya bersifat sementara dan dapat segera membaik dengan bantuan eksternal atau perubahan keadaan.

Penyebab Accidental Poverty

- Kecelakaan atau Penyakit Serius: Individu yang mengalami kecelakaan atau penyakit serius yang menghambat kemampuan mereka untuk bekerja sering kali terjerumus dalam kemiskinan tak terduga, terutama jika mereka tidak memiliki asuransi atau cadangan keuangan.
- Kehilangan Pekerjaan Mendadak: Perubahan dalam pasar tenaga kerja, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) massal atau penutupan perusahaan, dapat membuat seseorang yang sebelumnya berada dalam kelas menengah jatuh ke dalam kemiskinan.
- Bencana Alam: Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, atau kebakaran dapat menghancurkan harta benda dan sumber penghasilan seseorang dalam waktu singkat, menyebabkan mereka terjerumus dalam kemiskinan yang tidak terduga.
- Perubahan Ekonomi Tiba-tiba: Ketidakstabilan ekonomi, seperti resesi ekonomi atau krisis keuangan, dapat menyebabkan penurunan pendapatan bagi banyak individu yang sebelumnya tidak rentan terhadap kemiskinan.

2.1.2.10 Jebakan Kemiskinan (*Poverty Trap*)

Jebakan kemiskinan (*poverty trap*) adalah situasi di mana individu, keluarga, atau kelompok masyarakat terperangkap dalam kondisi kemiskinan, meskipun ada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Faktor-faktor seperti rendahnya pendapatan, pendidikan, kesehatan yang buruk, atau kurangnya akses terhadap peluang ekonomi dapat menciptakan lingkaran setan yang menghambat kemajuan sosial-ekonomi. Ketika seseorang atau keluarga terperangkap dalam kemiskinan, mereka tidak memiliki sumber daya atau akses yang cukup untuk keluar dari kondisi

tersebut, yang akhirnya memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

Sachs (2005) menjelaskan bahwa poverty trap terjadi ketika seseorang atau komunitas memiliki pendapatan yang sangat rendah sehingga mereka tidak dapat berinvestasi pada kesehatan, pendidikan, atau sektor lain yang dapat membantu meningkatkan pendapatan mereka di masa depan. Ini menciptakan kondisi di mana kemiskinan menjadi siklus yang terus berulang.

2.2 Belanja Pemerintah dan Kemiskinan

Belanja pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam upaya mengurangi kemiskinan, terutama di negara-negara berkembang. Berbagai bentuk belanja pemerintah, seperti belanja sosial (transfer tunai, bantuan sosial), belanja pada sektor kesehatan dan pendidikan, serta pembangunan infrastruktur, sering kali dijadikan instrumen untuk mengurangi ketidaksetaraan dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Namun, efektivitas belanja pemerintah dalam mengurangi kemiskinan bergantung pada beberapa faktor, termasuk desain kebijakan, distribusi anggaran, serta efisiensi administrasi dan pelaksanaannya.

2.2.1 Efektivitas Belanja Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan

Salah satu bentuk utama belanja pemerintah yang berfokus pada pengurangan kemiskinan adalah belanja sosial, yang mencakup transfer tunai, program bantuan pangan, subsidi energi, dan bantuan sosial lainnya. Program ini bertujuan untuk langsung meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin dan rentan.

Menurut Ravallion dan Datt (2002), transfer tunai langsung dan bantuan sosial dapat secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan,

terutama jika dana tersebut dialokasikan dengan tepat kepada kelompok yang paling membutuhkan. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun efektivitasnya bisa bervariasi, secara keseluruhan, program bantuan sosial yang tepat sasaran memiliki dampak besar dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan kemiskinan.

Belanja pemerintah dalam bidang pendidikan dan kesehatan adalah dua sektor penting lainnya yang dapat mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang. Pendidikan yang lebih baik meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, sedangkan akses ke layanan kesehatan yang lebih baik mengurangi beban penyakit yang bisa menghalangi orang untuk bekerja atau belajar. Menurut Filmer (2008), pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan sangat penting dalam meningkatkan mobilitas sosial dan membantu individu keluar dari kemiskinan. Dalam konteks pendidikan, investasi dalam pendidikan dasar dan pendidikan tinggi memberikan peluang lebih baik bagi generasi berikutnya untuk keluar dari kemiskinan. Selain itu, belanja pemerintah untuk memperbaiki sarana dan prasarana kesehatan dapat membantu mengurangi biaya kesehatan bagi masyarakat miskin yang sering kali tidak mampu mengakses layanan medis, sehingga membantu mereka mempertahankan produktivitas dan penghasilan yang lebih tinggi.

Selain belanja sosial langsung dan sektor manusia, belanja pemerintah dalam infrastruktur—termasuk jalan, air bersih, listrik, dan konektivitas berperan besar dalam menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat miskin. Infrastruktur yang lebih baik memungkinkan akses lebih besar terhadap pasar, pendidikan, dan layanan kesehatan, yang dapat meningkatkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Menurut Duflo, Dupas, dan Kremer (2015), peningkatan infrastruktur dasar, seperti penyediaan air bersih dan sanitasi yang lebih baik, dapat meningkatkan kualitas hidup secara signifikan dan mengurangi beban kemiskinan, terutama di daerah pedesaan.

2.2.2 Strategi Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan

2.2.2.1 Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia: Perspektif dan Implementasi

Pengentasan kemiskinan adalah tantangan besar bagi banyak negara, termasuk Indonesia, yang memiliki populasi lebih dari 270 juta jiwa dan tingkat ketimpangan sosial-ekonomi yang cukup tinggi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah kemiskinan, baik melalui kebijakan makroekonomi, pemberdayaan masyarakat, maupun program-program bantuan sosial. Berikut adalah beberapa strategi utama yang diterapkan pemerintah Indonesia dalam pengentasan kemiskinan:

1. Peningkatan Akses terhadap Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan dan kesehatan adalah dua sektor yang sangat berpengaruh terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Pendidikan yang lebih baik meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membuka peluang kerja dengan gaji yang lebih baik, sementara kesehatan yang baik meminimalkan pengeluaran keluarga untuk biaya pengobatan dan meningkatkan produktivitas kerja.

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP): Program ini memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin untuk memastikan mereka dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala masalah biaya. Melalui KIP, anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan bantuan untuk membeli buku, alat tulis, dan membayar biaya sekolah, sehingga mendorong angka partisipasi sekolah yang lebih tinggi di kalangan keluarga kurang mampu (BPS, 2023).

Program Indonesia Sehat: Program ini, yang termasuk dalam jaminan kesehatan nasional (JKN), berupaya memastikan bahwa masyarakat miskin mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang lebih baik. Dengan bantuan biaya kesehatan, masyarakat miskin tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk pengobatan yang dapat membebani keuangan mereka.

Program ini juga mengurangi risiko kemiskinan akibat biaya pengobatan yang tinggi (Sachs, 2005).

2. Program Bantuan Sosial Langsung

Salah satu strategi paling langsung dalam mengurangi kemiskinan adalah melalui program bantuan sosial langsung. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan beberapa program bantuan sosial yang bertujuan untuk memberikan bantuan langsung kepada keluarga miskin, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Program Keluarga Harapan (PKH): PKH adalah program bantuan sosial bersyarat yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin dengan syarat mereka memenuhi kewajiban tertentu, seperti memastikan anak-anak mereka bersekolah dan mendapatkan pemeriksaan kesehatan. PKH tidak hanya meringankan beban ekonomi keluarga, tetapi juga mendorong mereka untuk berinvestasi pada kesehatan dan pendidikan anak-anak mereka. Ini adalah contoh conditional cash transfer (CCT) yang terbukti efektif dalam mengurangi kemiskinan di berbagai negara, termasuk Indonesia (Fiszbein & Schady, 2009).

3. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

BPNT memberikan bantuan dalam bentuk bahan pangan kepada keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi kerawanan pangan di kalangan keluarga miskin. BPNT sangat relevan dalam situasi krisis atau bencana alam, di mana kelompok miskin rentan terhadap kekurangan pangan (Kementerian Sosial, 2020).

4. Pemberdayaan Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja

Strategi pengentasan kemiskinan juga perlu mencakup pemberdayaan ekonomi yang mengarah pada penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Tanpa penciptaan lapangan kerja yang inklusif dan peningkatan produktivitas, bantuan sosial hanya akan memberikan solusi jangka pendek.

Program Kartu Prakerja: Salah satu inisiatif penting adalah Kartu Prakerja, yang memberikan pelatihan keterampilan dan insentif keuangan kepada pencari kerja dan pekerja yang terdampak pandemi COVID-19. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan individu agar mereka lebih kompetitif di pasar kerja, serta mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial (Kementerian Ketenagakerjaan, 2020).

Pemberdayaan UMKM: Pemerintah juga berfokus pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan memberikan pelatihan, akses pembiayaan, dan pemasaran. Dengan mengembangkan UMKM, diharapkan ada penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal, yang juga akan berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan. Bantuan kepada UMKM juga mendorong ekonomi lokal dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan (Rodrik, 2008).

5. Pengembangan Infrastruktur dan Akses Layanan Dasar

Pembangunan infrastruktur yang merata dan peningkatan akses terhadap layanan dasar adalah komponen penting dalam strategi pengentasan kemiskinan. Dengan infrastruktur yang baik, terutama di daerah terpencil, masyarakat miskin dapat memperoleh akses yang lebih baik ke pasar, layanan kesehatan, dan pendidikan.

Program Infrastruktur Desa: Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Dana Desa, yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur di tingkat desa, seperti jalan, air bersih, sanitasi, dan fasilitas kesehatan. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Infrastruktur yang lebih baik membuka akses yang lebih luas bagi warga desa untuk berpartisipasi dalam ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup mereka (Tavares & Wacziarg, 2001).

Pembangunan Infrastruktur Digital: Di era digital, akses internet menjadi penting untuk pendidikan, pekerjaan, dan perdagangan. Program

pemerintah yang berfokus pada pembangunan infrastruktur digital di daerah terpencil bertujuan untuk mengurangi ketimpangan akses teknologi dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat miskin di daerah tersebut (Eichhorn, 2004).

6. Perbaikan Kebijakan dan Penguatan Kapasitas Pemerintahan

Agar strategi-strategi pengentasan kemiskinan ini efektif, penting untuk memiliki kebijakan yang koheren dan terintegrasi, serta pengawasan yang ketat. Salah satu tantangan terbesar dalam pengentasan kemiskinan adalah implementasi program yang tidak tepat sasaran atau birokrasi yang rumit.

Perbaikan Sistem Data dan Penargetan: Penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah langkah penting untuk memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran. Tanpa data yang akurat dan sistem penargetan yang efisien, bantuan sosial bisa jatuh ke tangan yang tidak berhak atau tidak mencapai kelompok yang membutuhkan.

Pengawasan dan Akuntabilitas: Peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan sosial sangat penting untuk mencegah penyelewengan dan korupsi. Pemerintah perlu mengembangkan sistem pengawasan yang transparan dan melibatkan masyarakat dalam pemantauan program (World Bank, 2014).

2.2.2.2 Perdebatan Efektivitas Belanja Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan

Belanja pemerintah telah lama menjadi instrumen utama dalam kebijakan publik untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di banyak negara, termasuk Indonesia, pemerintah mengalokasikan sebagian besar anggaran untuk berbagai program pengentasan kemiskinan. Namun, efektivitas dari belanja pemerintah ini sering kali menjadi bahan perdebatan. Sementara beberapa studi menunjukkan bahwa belanja sosial dapat mengurangi tingkat kemiskinan, lainnya berpendapat bahwa alokasi anggaran yang kurang tepat

dan pengelolaan yang buruk justru tidak efektif dalam mencapainya. Secara teori, belanja pemerintah dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan melalui dua jalur utama:

- Pengeluaran sosial langsung, seperti bantuan sosial, pendidikan, dan layanan kesehatan, yang memberikan bantuan langsung kepada kelompok miskin.
- Investasi dalam infrastruktur dan pembangunan ekonomi, yang bertujuan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Ravallion, 2004; Tavares & Wacziarg, 2001).

Isu-isu utama terkait efektivitas belanja pemerintah terhadap kemiskinan

a. Isu Efisiensi dan Alokasi Anggaran

Di banyak negara, termasuk Indonesia, program-program pengentasan kemiskinan sering kali tidak mencapai sasaran atau memiliki dampak yang terbatas karena masalah dalam penargetan (*targeting errors*) dan pengelolaan yang buruk (Besley & Kanbur, 1993). Contohnya, dalam beberapa kasus, bantuan sosial justru diberikan kepada keluarga yang tidak membutuhkan, sementara mereka yang benar-benar miskin tidak mendapat manfaat. Studi oleh Deaton (2010) menunjukkan bahwa meskipun banyak negara mengalokasikan anggaran besar untuk program pengentasan kemiskinan, program-program tersebut sering tidak dapat mengurangi ketimpangan secara signifikan karena masalah dalam perencanaan dan implementasi. Efisiensi belanja pemerintah dapat terhambat oleh birokrasi yang kompleks, penyalahgunaan dana, dan kurangnya transparansi.

b. Ketergantungan pada Bantuan Sosial

Bantuan sosial yang besar berpotensi menciptakan ketergantungan jangka panjang, mengurangi insentif bagi penerima manfaat untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja atau untuk meningkatkan keterampilan mereka. Clemens & Viscusi (2017) berargumen

bahwa bantuan sosial yang terlalu besar tanpa program pendampingan justru dapat memperburuk kondisi sosial ekonomi kelompok miskin, menciptakan siklus kemiskinan yang lebih lama. Namun, Fiszbein & Schady (2009) menunjukkan bahwa jika program dirancang dengan tepat, dengan pelatihan keterampilan dan dukungan bagi pengembangan usaha kecil, bantuan sosial dapat menjadi langkah transisi yang efektif untuk meningkatkan mobilitas sosial. Bantuan sosial bisa menjadi jaring pengaman sementara bagi mereka yang terjebak dalam kemiskinan, selama ada kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi jangka panjang.

c. Pengaruh Infrastruktur terhadap Pengentasan Kemiskinan

Investasi dalam infrastruktur (seperti jalan, listrik, air bersih) sering dianggap sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi kemiskinan. Belanja pemerintah dalam proyek infrastruktur dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan akses ke pasar, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, beberapa studi menunjukkan bahwa infrastruktur saja tidak cukup untuk mengurangi kemiskinan tanpa adanya kebijakan yang terintegrasi dan pelaksanaan yang baik. Eichhorn (2004) menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang tidak dibarengi dengan akses yang memadai terhadap pendidikan dan kesehatan sering kali gagal memberikan manfaat signifikan bagi kelompok miskin.

2.2.2.3 Komitmen Indonesia dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Kebijakan penghapusan kemiskinan ekstrem merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pemerintah menerapkan tiga strategi berupa penurunan beban keluarga miskin, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan untuk menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2024.

Upaya untuk menurunkan beban keluarga miskin dilakukan melalui program-program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH)

dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Selanjutnya upaya kedua yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah melaksanakan Program Padat Karya antara lain untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, seperti Program yang dijalankan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang memfasilitasi masyarakat sangat miskin di Indonesia untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan lebih. Selain itu, program-program lain, termasuk Pahlawan Ekonomi Nusantara dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), ditujukan untuk mendukung pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja. Selanjutnya upaya ketiga dalam upaya mengurangi kantong-kantong kemiskinan memerlukan kerja sama lintas sektoral antar Lembaga, karena memerlukan penyediaan infrastruktur dari berbagai sektor. Implementasi ketiga strategi tersebut telah membantu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia, dari 1,74 persen pada September 2022 menjadi 1,12 persen pada Maret 2023 (Kemenko PMK, 2023).

Seperti tertuang di dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, diperlukan keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antar kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Selanjutnya, Bapak Presiden menginstruksikan untuk:

1. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antarkementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
2. Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi:
 - a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
 - b. Peningkatan pendapatan masyarakat; dan

- c. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Selanjutnya, beberapa penugasan khusus kepada kementerian/kelembagaan adalah sebagai berikut:

A. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk:

- a. menetapkan lokasi prioritas dan target pencapaian penghapusan kemiskinan ekstrem tiap tahun;
- b. menetapkan kebijakan sumber dan jenis data yang digunakan dalam implementasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- c. penyiapan data penerima dengan nama dan alamat (bg name bg address) sasaran penghapusan kemiskinan ekstrem, bersama Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Badan Pusat Statistik;
- d. menetapkan pedoman umum pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- e. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian program kementerian/lembaga dalam upaya menurunkan beban pengeluaran masyarakat dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan;
- f. mengoordinasikan dukungan program penghapusan kemiskinan ekstrem yang melibatkan partisipasi nonpemerintah; dan
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi secara terpadu bersama dengan kementerian/lembaga terkait.

B. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan kementerian/Lembaga dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan produktivitas dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

C. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menyusun pedoman umum pelaksanaan program penghapusan kemiskinan ekstrem bersama kementerian/lembaga paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Instruksi Presiden dikeluarkan.

D. Menteri Keuangan untuk:

- a. menyiapkan alokasi anggaran dan sinergi pendanaan dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. memberikan dukungan yang dapat dilakukan melalui insentif kepada daerah yang berkinerja baik dalam penurunan tingkat kemiskinan.

E. Menteri Dalam Negeri untuk:

- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap kebijakan Gubernur dan Bupati/Wali Kota terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- b. memfasilitasi pemerintah daerah dalam penyusunan program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta pengalokasian anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan Nomor Induk Kependudukan, nama, dan alamat (by Nomor Induk Kependudukan, by name, dan by address) melalui sinkronisasi data kependudukan dengan data penerima bantuan kemiskinan ekstrem;
- c. memfasilitasi pemberian hak akses data kependudukan untuk melakukan verifikasi dan validasi berbasis Nomor Induk Kependudukan, nama, dan alamat (by Nomor Induk Kependudukan, by name, dan by address);
- d. memfasilitasi penerbitan Nomor Induk Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota; dan
- e. memberikan penghargaan bagi daerah yang berhasil dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

F. Menteri Sosial untuk:

- a. melakukan verifikasi dan validasi dalam rangka memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai data dasar dan sumber utama dalam penetapan penerima manfaat program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- b. menyalurkan bantuan sosial dan melakukan pemberdayaan ekonomi kepada target sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan hasil asesmen; dan
- c. mengelola data penyaluran bantuan sosial serta data kondisi para penerima manfaat.

G. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk:

- a. menyediakan dan mengelola data Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem;
- b. menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dan program padat karya; dan
- c. membina dan menggerakkan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama yang mengelola dana bergulir masyarakat miskin ekstrem serta unit usaha berkaitan ketahanan pangan nabati dan hewani.

H. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk:

- a. melakukan evaluasi, pengkajian, dan penyempurnaan kebijakan, program, dan anggaran di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- b. menyiapkan ketersediaan air bersih, sanitasi, dan penataan lingkungan; dan
- c. memberikan bantuan perbaikan rumah dan/atau pembangunan rumah baru serta relokasi pemukiman bagi keluarga miskin ekstrem.

I. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk memberikan fasilitasi akses pembiayaan, akses pasar, serta pendampingan dan pelatihan bagi koperasi dan usaha mikro dalam meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem.

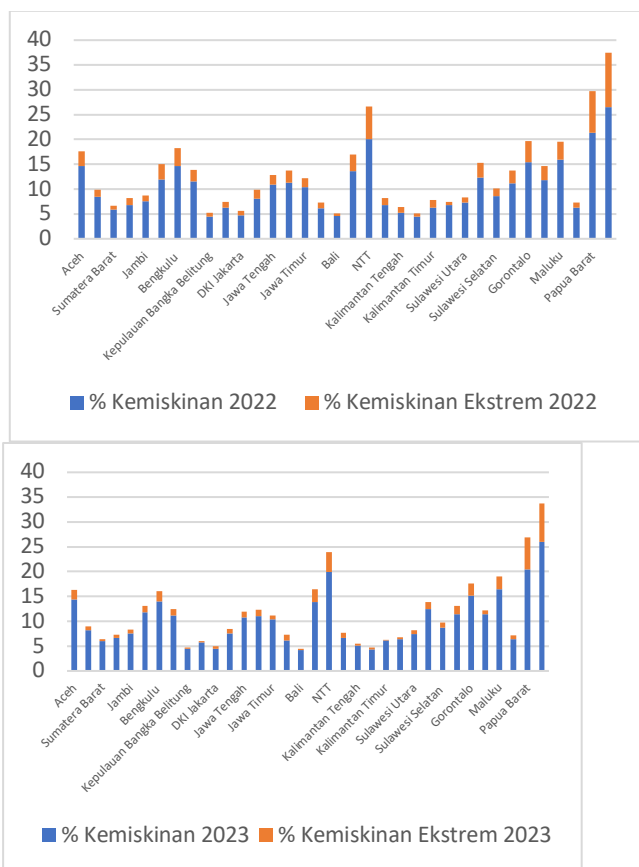
J. Menteri Pertanian untuk:

- a. memberdayakan petani yang tergolong keluarga miskin ekstrem;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana pertanian kepada kelompok tani;
- dan

melakukan upaya produksi komoditas pertanian untuk mencapai ketersediaan dan keterjangkauan pangan.

Menjelang akhir tahun 2023, Kondisi kemiskinan ekstrem di Indonesia mengalami penurunan dari 2,46 menjadi 1,46% atau menurun 1 persen dari kondisi tahun 2022. Pada tahun 2022, terdapat 6 Provinsi dengan persentase kemiskinan ekstrem di bawah 1%, namun pada tahun 2023, terjadi peningkatan yang cukup signifikan menjadi 18 Provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem di bawah 1%.

Gambar 2.1 Perbandingan Persentase Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia



Sumber: BPS, 2024

Komitmen pemerintah dalam mengejar target kemiskinan nol (*zero poverty*) perlu dilakukan upaya-upaya intervensi melalui 3 strategi yang sudah dimandatkan dalam Inpres No. 4 Tahun 2022. Selain itu, strategi pentahelix melalui kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Daerah, Akademisi, Organisasi Masyarakat, dan Media Massa, diharapkan dapat memperkuat upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem khususnya dan menurunkan angka kemiskinan pada umumnya.

2.2.2.4 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia dalam Kemiskinan

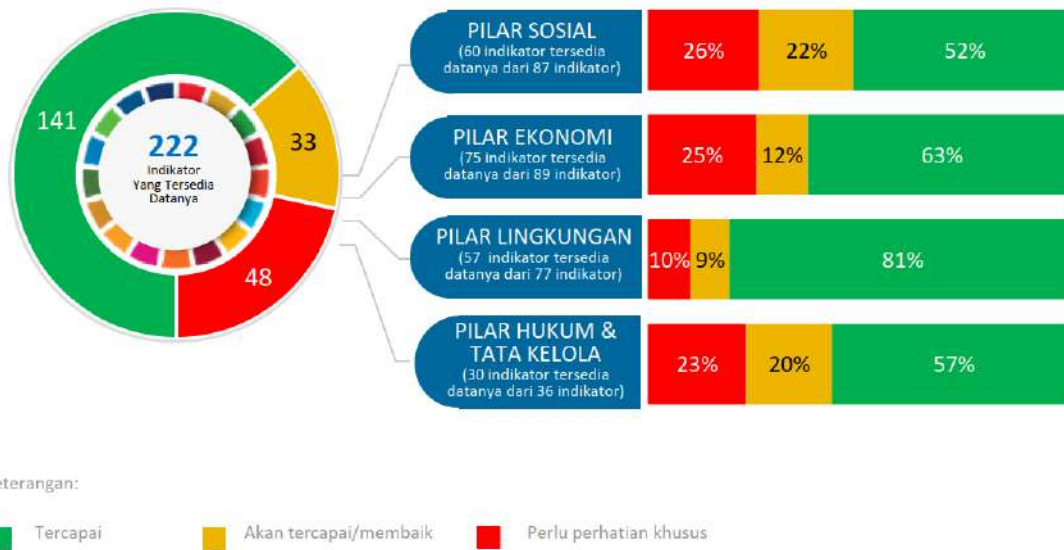
Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) di Indonesia telah memasuki tahun keenam pasca ditetapkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 yang kini diperbaharui dengan Perpres Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Salah satu amanat Perpres tersebut adalah penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) 2021-2024 dan pelaporannya. Laporan Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs Tahun 2021 ini merupakan laporan evaluasi pelaksanaan tahun pertama dari RAN TPB/SDGs periode 2021–2024.

Pada tahun 2021, pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia masih berada dalam fase pandemi yang dimulai sejak Maret 2020. Selama masa pandemi, pencapaian beberapa target dan indikator TPB/SDGs mengalami koreksi angka capaiannya dan bahkan sebagian koreksi ini cukup dalam. Misalnya, angka kemiskinan nasional kembali meningkat menjadi *double digit* setelah sebelumnya (2019) pertamakalinya dalam sejarah bisa diturunkan mencapai *single digit*. Ini membuat tingkat kemiskinan kembali ke situasi tiga tahun sebelumnya dan angka ketimpangan (rasio gini) meningkat. Berbagai upaya pengendalian pandemi—khususnya pembatasan pergerakan (mobilitas) orang dan sebagian barang—mengakibatkan dampak sosial, kultural, dan ekonomi secara signifikan.

Namun demikian, pada Pembukaan *SDGs Annual Conference* 2021, Presiden menegaskan bahwa meski tantangan untuk mencapai target TPB/SDGs semakin berat dengan adanya pandemi COVID-19, tantangan ini tidak boleh menyurutkan semangat dan tidak boleh menurunkan target SDGs. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya mesti dilakukan dengan berbagai inovasi, mencari cara-cara baru, dan mengupayakan terobosan-terobosan baru untuk melakukan lompatan dalam mencapai target TPB/SDGs. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas menyiapkan orkestrasi nasional yang berkelanjutan, melibatkan semua pemangku kepentingan publik, guna mengejar percepatan pencapaian target TPB/SDGs sampai 2030.

Berdasarkan analisis dari 222 indikator TPB/SDGs yang tersedia datanya pada laporan ini, sekitar 63% atau 141 indikator telah mencapai target yang ditetapkan pada RAN 2021-2024 untuk tahun 2021. Jika ditambahkan dengan 15% atau 33 indikator yang menunjukkan tren membaik atau akan tercapai, maka terdapat sekitar 78% indikator TPB/SDGs yang telah tercapai dan mengalami kemajuan menuju pencapaian yang lebih baik. Akan tetapi, kita perlu memfokuskan upaya pada indikator yang memerlukan perhatian khusus yang mencakup sekitar 22% atau 48 indikator.

Gambar 2.2 Capaian Indikator TPB/SDGs Tahun 2021



Sumber: <https://sdgs.bappenas.go.id/product/ran-2021-2024-lampiran-i-rencana-aksi-nasional>

Jika dilihat pencapaian pada setiap pilar, seluruh pilar pembangunan TPB/SDGs telah menunjukkan kemajuan yang baik dalam pencapaian target tahun 2021. Kemajuan yang cukup progresif dapat kita lihat pada pilar pembangunan lingkungan dan ekonomi. Namun demikian, masih terdapat 67 indikator yang datanya tidak tersedia sehingga belum dapat dinilai kemajuan pencapaiannya pada tahun 2021. Data yang belum tersedia ini terbagi menjadi 3 (tiga) kategori: (a) data yang capaian tahun 2021 belum disampaikan atau belum selesai dihitung sebanyak 29 indikator; (b) data yang belum pernah dilaporkan sama sekali sebanyak 22 indikator; dan (c) data yang survei pengumpulan datanya tidak dilaksanakan pada tahun 2021 sebanyak 16 indikator. Untuk itu, diperlukan inovasi penguatan data statistik dasar dan sektoral untuk monitoring dan evaluasi TPB/SDGs yang lebih komprehensif.

Memasuki Decade of Action pencapaian Agenda 2030, komitmen pencapaian TPB/SDGs semakin kuat melibatkan para pihak, tidak hanya pemerintah tetapi juga non-pemerintah, baik di tingkat nasional maupun

daerah hingga desa. Kepemilikan bersama yang tumbuh semakin kuat ini merupakan hasil dari penerapan prinsip inklusif, partisipatif, dan transparan dalam pelaksanaan TPB/SDGs selama ini. Berbagai pendekatan dan instrumen kebijakan yang dikembangkan selama lima tahun terakhir menjadi acuan pengarusutamaan TPB/SDGs dalam dokumen perencanaan pembangunan dan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan baik pemerintah maupun nonpemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, telah disusun Peta Jalan TPB/SDGs 2030, Metadata Indikator TPB/SDGs yang telah diterbitkan dalam dua edisi, Rencana Aksi Nasional (RAN), laporan tahunan, dan laporan kepada PBB yang disampaikan melalui Voluntary National Review (VNR).

Komitmen pelaksanaan SDGs di tingkat lokal terwujud dengan telah ditetapkannya Rencana Aksi Daerah (RAD) di 31 provinsi, sementara 3 (tiga) provinsi lainnya masih berproses. Pelaporan di tingkat global juga telah dilengkapi oleh Voluntary Sub-national Review dan Voluntary Local Review (VLR) dari beberapa provinsi dan kota. Upaya pelokalan SDGs di tingkat paling bawah ditunjukkan dengan diluncurkannya SDGs Desa oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2020. Melalui SDGs Desa, program, kegiatan, dan pengukuran pencapaian target-target TPB/SDGs dikembangkan sesuai kondisi masyarakat yang sangat beragam.

Keterlibatan pemangku kepentingan nonpemerintah diwujudkan melalui pembentukan SDGs Center/Network/Hub yang saat ini terdapat di 25 Perguruan Tinggi di tingkat berbagai daerah. Peran filantropi dan pelaku usaha juga meningkat ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah asosiasi serta dalam program dan kegiatan yang berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, semakin banyak perusahaan yang menyampaikan

Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) untuk menunjukkan kontribusinya dalam pelaksanaan TPB/SDGs Indonesia. Upaya ini juga diikuti juga oleh filantropi. Selanjutnya, melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, program-program TJSL BUMN dilaksanakan berdasarkan empat pilar utama TPB/SDGs yaitu sosial, lingkungan, ekonomi, serta hukum dan tata kelola.

Keterlibatan dan kontribusi organisasi kemasyarakatan juga berperan signifikan, melalui pelaksanaan berbagai program yang mampu menjangkau hingga ke masyarakat dan seluruh pelosok Indonesia. Keterlibatan dan tingginya komitmen pemangku kepentingan nonpemerintah dapat dilihat dari jumlah institusi yang telah menyampaikan rencana program dan kegiatannya pada RAN TPB/SDGs periode 2021-2024 yaitu sebanyak 132 institusi.

Dari hasil capaian yang dipublikasikan oleh BPS, capaian SDGs untuk kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri kemiskinan ekstrim termasuk kemiskinan absolut
2. Menurunkan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional berdasarkan perkotaan dan pedesaan
3. Meningkatkan persentase penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial
4. Menurunkan persentase penduduk yang hidup dalam kemiskinan multidimensi ekstrim.
5. Menjamin hak atas lahan dan akses keuangan di daerah pedesaan dan menjamin sistem pertanian yang tahan terhadap perubahan iklim dan bencana.
6. Mitigasi bencana alam akibat iklim maupun bukan iklim menurut daerah perkotaan dan pedesaan.

2.3 Kebijakan Bantuan Sosial di Berbagai Negara

1. Studi Kasus: Efektivitas Belanja Pemerintah di Brasil - Program Bolsa Família

Bolsa Família adalah salah satu program bantuan sosial terbesar di Brasil yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Program ini memberikan bantuan tunai langsung kepada keluarga miskin, dengan syarat-syarat tertentu seperti keharusan untuk memastikan anak-anak mereka bersekolah dan menerima vaksinasi. Program ini diluncurkan pada tahun 2003 dan telah mendapat pengakuan internasional sebagai model keberhasilan dalam pengurangan kemiskinan. Studi oleh Soares et al. (2010) menunjukkan bahwa Bolsa Família memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan di Brasil, dengan peningkatan konsumsi rumah tangga di kalangan keluarga penerima manfaat dan pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh World Bank (2017), program ini berhasil mengurangi kemiskinan ekstrem di Brasil dengan meningkatkan konsumsi rumah tangga miskin dan memfasilitasi akses mereka terhadap layanan dasar. Ini juga menunjukkan bahwa program ini tidak hanya memberikan bantuan sementara, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan jangka panjang dengan memutus siklus kemiskinan antar-generasi.

2. Studi Kasus: Efektivitas Belanja Pemerintah di Meksiko - Program Oportunidades

Program Oportunidades (dikenal sebagai Prospera) adalah program bantuan tunai bersyarat yang diluncurkan di Meksiko pada tahun 1997 dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin. Program ini memberikan transfer tunai kepada keluarga miskin dengan syarat mereka memastikan anak-anak

mereka tetap bersekolah dan mendapatkan pemeriksaan kesehatan rutin. Penelitian oleh Skoufias (2001) menunjukkan bahwa Oportunidades berkontribusi besar dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan tingkat partisipasi anak-anak dalam pendidikan, dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Secara keseluruhan, program ini telah terbukti berhasil dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial di Meksiko.

Selain itu, evaluasi lebih lanjut yang dilakukan oleh J-PAL (2017) menemukan bahwa program ini membantu keluarga miskin untuk berinvestasi dalam pendidikan dan kesehatan anak-anak mereka, yang pada gilirannya membantu mereka keluar dari kemiskinan dalam jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan dan kesehatan merupakan kunci dalam memutus siklus kemiskinan.

2. Studi Kasus: Efektivitas Belanja Pemerintah di India - Program MGNREGA (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act)

MGNREGA adalah program yang diluncurkan oleh pemerintah India pada tahun 2005 dengan tujuan untuk memberikan jaminan pekerjaan bagi keluarga miskin di pedesaan India. Program ini menjamin bahwa setiap rumah tangga miskin akan mendapatkan 100 hari kerja setiap tahun dengan upah minimum, yang ditujukan untuk memperbaiki infrastruktur pedesaan, seperti pembangunan jalan, pengelolaan air, dan konservasi tanah. Penelitian yang dilakukan oleh Duflo et al. (2013) menunjukkan bahwa MGNREGA memiliki dampak positif dalam mengurangi kemiskinan di pedesaan India, dengan meningkatkan pendapatan keluarga miskin, memperbaiki ketahanan pangan, dan memberikan akses kerja yang lebih stabil bagi perempuan.

Evaluasi lebih lanjut oleh Chaudhury & Hammer (2020) mengungkapkan bahwa meskipun ada tantangan dalam hal implementasi dan penyaluran dana, MGNREGA tetap efektif dalam mengurangi

kemiskinan struktural di pedesaan dengan memberikan stabilitas pendapatan dan memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan.

3. Studi Kasus: Efektivitas Belanja Pemerintah di Kenya - Program Cash Transfer untuk Lansia

Di Kenya, program cash transfer untuk lansia diluncurkan untuk membantu keluarga miskin, terutama yang tidak mampu lagi bekerja. Program ini memberikan bantuan tunai langsung kepada warga lanjut usia yang berada di bawah garis kemiskinan. Studi oleh Handley et al. (2014) menemukan bahwa program ini memiliki dampak yang sangat positif dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memberikan stabilitas bagi keluarga yang tergantung pada orang tua yang lanjut usia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transfer tunai bersyarat dapat sangat efektif dalam memberikan dukungan kepada kelompok yang sangat rentan, seperti lansia. Program ini juga menunjukkan bagaimana belanja pemerintah yang tepat sasaran dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan lain dan memberikan keamanan sosial kepada kelompok rentan.

2.4 Kebijakan Bantuan Sosial di Indonesia

Kebijakan bantuan sosial (bansos) di Indonesia dirancang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu, khususnya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, meluncurkan berbagai program bansos sebagai respons terhadap masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial. Beberapa kebijakan bansos di Indonesia yang paling dikenal meliputi program-program yang bertujuan untuk mengurangi beban hidup masyarakat miskin, serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Berikut adalah beberapa kebijakan bansos utama di Indonesia:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

- Deskripsi: PKH adalah program bansos bersyarat yang ditujukan kepada keluarga miskin dan rentan miskin. Program ini memberikan bantuan finansial kepada keluarga yang memenuhi syarat, dengan kewajiban untuk mengikuti beberapa persyaratan, seperti memastikan anak-anak mereka bersekolah dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar.
- Tujuan: Meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan, sehingga bisa memutuskan rantai kemiskinan antar generasi.
- Sasaran: Keluarga dengan anggota yang masih bersekolah, ibu hamil, anak balita, atau lansia, serta penyandang disabilitas.

2. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

- Deskripsi: BPNT merupakan salah satu bentuk bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk barang kebutuhan pokok, bukan uang tunai. Keluarga penerima manfaat (KPM) diberikan kartu yang dapat digunakan untuk membeli sembako di e-warung atau agen yang telah bekerja sama dengan pemerintah.
- Tujuan: Meningkatkan ketahanan pangan keluarga miskin dan mengurangi kemiskinan. BPNT membantu keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka dengan harga yang lebih terjangkau.
- Sasaran: Keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan teridentifikasi sebagai penerima bantuan.

3. Program Indonesia Pintar (PIP)

- Deskripsi: PIP adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada anak-anak dari keluarga miskin untuk membantu biaya pendidikan mereka, mulai dari SD hingga perguruan tinggi. PIP mencakup bantuan langsung tunai yang disalurkan kepada siswa atau orang tua siswa.

- Tujuan: Meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, dan mencegah anak putus sekolah.
- Sasaran: Siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin yang terdaftar dalam DTKS.

4. Bantuan Subsidi Upah (BSU)

- Deskripsi: BSU adalah program bantuan sosial yang memberikan bantuan langsung berupa subsidi upah bagi pekerja yang terdampak oleh pandemi COVID-19, dengan tujuan untuk membantu pekerja mempertahankan daya beli dan mengurangi dampak ekonomi dari krisis.
- Tujuan: Meringankan beban pekerja dengan memberikan tambahan pendapatan, khususnya di tengah situasi ekonomi yang sulit akibat pandemi.
- Sasaran: Pekerja dengan gaji di bawah batas tertentu, terutama mereka yang bekerja di sektor formal.

5. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

- Deskripsi: JKN adalah program jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, yang bertujuan untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada seluruh masyarakat Indonesia, dengan tarif yang terjangkau.
- Tujuan: Menjamin seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan akses kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.
- Sasaran: Warga negara Indonesia, terutama mereka yang tidak mampu membayar biaya kesehatan, dengan prioritas pada keluarga miskin dan rentan miskin.

6. Bantuan Sosial Tunai (BST)

- Deskripsi: BST adalah bantuan langsung tunai yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung masyarakat yang terdampak langsung oleh situasi darurat, seperti pandemi COVID-19 atau bencana alam.

- Tujuan: Membantu masyarakat yang kehilangan pendapatan atau menghadapi kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar selama masa krisis.
- Sasaran: Keluarga miskin dan rentan miskin yang terdampak oleh bencana atau krisis, dan tercatat dalam DTKS.

7. Bantuan Stimulus Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

- Deskripsi: Program ini memberikan bantuan modal kepada usaha mikro dan kecil yang terdampak oleh pandemi atau krisis ekonomi, untuk membantu mereka bertahan dan melanjutkan operasional usaha.
- Tujuan: Meningkatkan kemampuan dan ketahanan ekonomi UMKM agar dapat bertahan dan berkembang, serta menciptakan lapangan pekerjaan baru.
- Sasaran: Pemilik usaha mikro dan kecil yang terdampak langsung oleh pandemi atau kondisi ekonomi lainnya.

8. Bantuan Rumah Layak Huni (BSR)

- Deskripsi: Bantuan ini diberikan untuk memperbaiki rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin. Rumah yang dimaksud adalah rumah yang tidak memenuhi syarat kelayakan seperti atap bocor, dinding rapuh, atau tidak memiliki fasilitas sanitasi yang memadai.
- Tujuan: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dengan memperbaiki kondisi tempat tinggal mereka, sekaligus meningkatkan kesehatan dan kenyamanan.
- Sasaran: Keluarga miskin atau rentan miskin yang tinggal di rumah tidak layak huni.

9. Bantuan Sosial untuk Penyandang Disabilitas

- Deskripsi: Pemerintah Indonesia juga menyediakan berbagai bentuk bantuan sosial khusus untuk penyandang disabilitas, baik berupa bantuan tunai atau bantuan alat bantu.

- Tujuan: Memberikan akses yang lebih besar bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan.
- Sasaran: Penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DTKS dan memenuhi kriteria.

10. Kartu Prakerja

- Deskripsi: Kartu Prakerja adalah program yang dirancang untuk membantu masyarakat dalam memperoleh pelatihan dan keterampilan baru agar bisa mendapatkan pekerjaan atau memulai usaha. Program ini mencakup pelatihan daring dan insentif bagi peserta.
- Tujuan: Meningkatkan keterampilan tenaga kerja Indonesia, baik untuk mereka yang ingin masuk ke dunia kerja ataupun untuk mereka yang ingin meningkatkan kemampuan wirausaha.
- Sasaran: Warga negara Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas, terutama yang tidak sedang bersekolah atau kuliah, serta mereka yang sedang mencari pekerjaan.

11. Program Bantuan Tunai untuk Lansia dan Ibu Hamil

- Deskripsi: Beberapa daerah atau kabupaten/kota di Indonesia menjalankan program bantuan sosial khusus untuk lansia dan ibu hamil, terutama untuk membantu biaya kesehatan dan kebutuhan sehari-hari.
- Tujuan: Meningkatkan kesejahteraan lansia dan ibu hamil dengan memberikan bantuan langsung tunai.
- Sasaran: Lansia yang tidak memiliki penghasilan tetap dan ibu hamil dari keluarga miskin.

Kebijakan bantuan sosial di Indonesia sangat beragam dan mencakup berbagai sektor, mulai dari pangan, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi. Program-program tersebut dirancang untuk membantu masyarakat miskin dan rentan miskin, mengurangi ketimpangan sosial, dan memitigasi dampak bencana atau krisis ekonomi. Semua program

ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih merata di seluruh Indonesia.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Bansos di Aceh: Kondisi terkini dan Pelaksanaannya

Kebijakan pemberian bantuan sosial pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005. Saat itu, pemerintah Indonesia menghadapi tantangan kenaikan harga minyak dunia yang cukup tinggi sehingga membebani subsidi negara untuk bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah Indonesia menyadari kemampuan APBN tidak cukup kuat untuk menopang subsidi BBM yang melonjak akibat kenaikan harga minyak dunia. Namun mengurangi subsidi BBM akan berdampak pada kenaikan harga barang terutama bahan pangan, meningkatkan biaya produksi dan mengurangi daya beli masyarakat yang akan berujung pada peningkatan jumlah penduduk miskin. Oleh sebab itu, pemerintah menerbitkan kebijakan pemberian bantuan sosial sebagai upaya mengurangi beban subsidi BBM dan menjaga daya beli masyarakat sehingga tidak merosot menjadi penduduk miskin.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2005 tentang Implementasi Bantuan Langsung Tunai bagi Rumah Tangga Miskin, Pemerintah Indonesia meluncurkan bansos bernama bantuan langsung tunai atau BLT. Program bantuan sosial ini, ditujukan kepada sekitar 19 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan nominal yang disalurkan sebesar Rp 100.000 per bulan. Kala itu, program BLT mampu menjadi solusi dalam mencegah lonjakan angka kemiskinan Indonesia. Walau program BLT bersifat sementara namun efeknya sangat terasa, karena pendapatan dan daya beli masyarakat terjaga sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil.

Pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia kemudian menginisiasi Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini ditujukan untuk keluarga miskin, yang memiliki anak berusia 0-15 tahun, dan ibu yang sedang hamil. Berbeda dibandingkan BLT, PKH merupakan program bantuan untuk keluarga miskin dengan syarat harus menyekolahkan anak dan melakukan

cek kesehatan rutin. pada Juni 2013, Pemerintah Indonesia kembali menjalankan dua kebijakan bansos, yakni Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM). Dua program ini digulirkan, untuk menanggulangi kemerosotan daya beli akibat kebijakan pemerintah yang kembali menaikkan harga BBM.

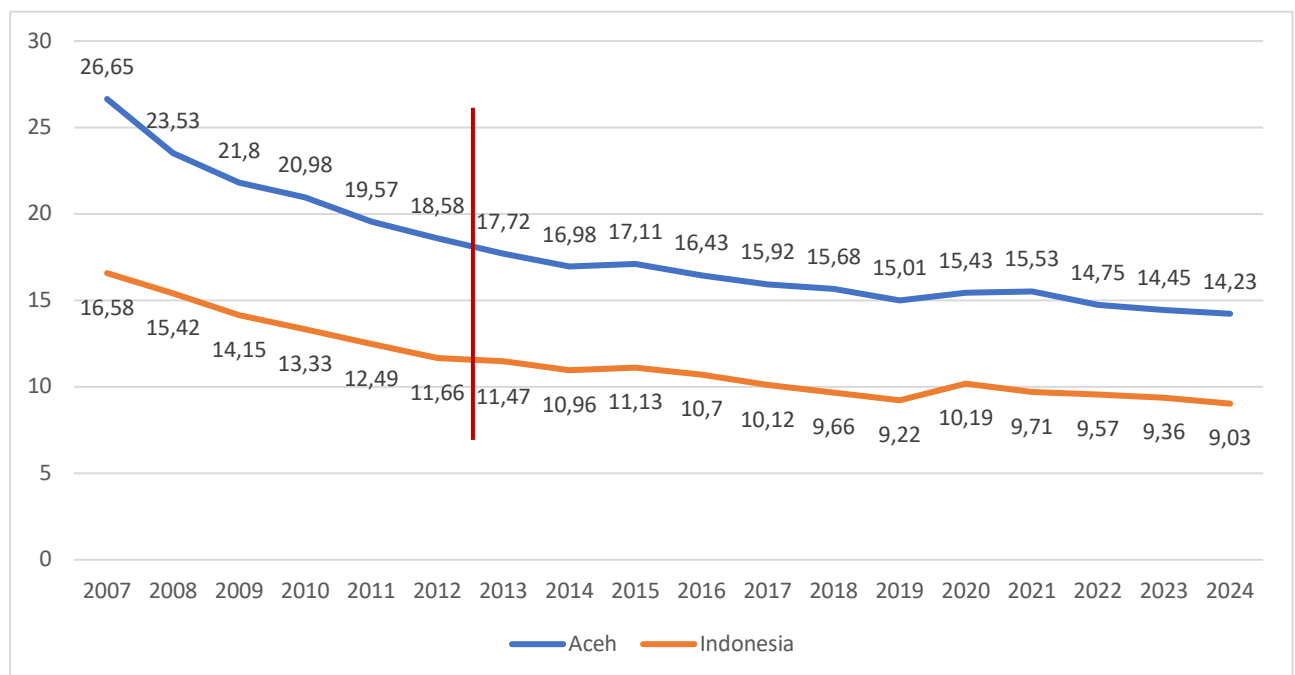
Pada tahun berikutnya, Pemerintah Indonesia semakin gencar melahirkan berbagai program bansos yang penerimanya diidentifikasi melalui berbagai kartu bansos. Kartu bansos tersebut antara lain adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai identitas keluarga kurang mampu, Kartu HP (SIM card) yang berisi uang elektronik untuk akses ke Simpanan Keluarga Sejahtera. Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai identitas penerima bantuan program indonesia pintar, dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai identitas penerima manfaat program Indonesia sehat.

Dalam masa covid-19, pemerintah Indonesia semakin banyak menyalurkan bansos dalam berbagai jenis program. Masyarakat menerima bansos melalui program-program seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU), BLT BBM, BLT UMKM, BLT Dana Desa (BLT-DD), BLT Pedagang Kaki Lima dan Warung, BLT Minyak Goreng, serta BLT El Nino. Kemudian, ada pula Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diberikan kepada KPM berupa kartu keluarga sejahtera yang salah satunya dapat digunakan di e-warung terdekat.

Kebijakan pembagian bansos cukup efektif dalam menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Dalam rentang 17 tahun angka kemiskinan turun dari 16,58 persen menjadi 9,03 persen. Demikian halnya dengan tingkat kemiskinan di Aceh, juga mengalami penurunan. Penurunan persentase penduduk miskin di Aceh bahkan melebihi kondisi di tingkat nasional tingkat perbedaan penurunan yang sangat besar. Namun demikian, persentase penduduk miskin Aceh masih jauh di atas nasional.

Penurunan angka kemiskinan di Aceh diduga karena mulai berjalannya program unggulan seperti Jaminan Kesehatan, Aceh, Beasiswa anak yatim, Dana Gampong dan beasiswa Luar negeri serta program daerah lainnya disamping masih adanya kegiatan rehab-rekon pasca tsunami. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan persentase penduduk selama periode 2007 – 2012 mencapai 8,07 persen atau turun rata-rata sekitar 1,61 persen per tahun. Namun sejak tahun 2013, penurunan jumlah penduduk miskin bergerak melandai. Rata-rata penurunan persentase penduduk miskin di periode 2013 – 2024 hanya berkisar 0,363 persen pertahun.

Gambar 3.1 Angka Kemiskinan Aceh dan Indonesia Tahun 2007-2024 (%)



Sumber: www.bps.go.id

Lambatnya penurunan angka kemiskinan Hal ini sangat kontras dengan pertumbuhan jumlah bansos yang dikucurkan pemerintah Indonesia dalam periode yang sama. Program bansos yang melimpah seolah tidak

mampu berperan sebagai katalisator percepatan penurunan angka kemiskinan Aceh. Hal inilah yang memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas bansos dalam pengentasan kemiskinan di Aceh.

3.2 Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat eksplorasi dengan mengkombinasikan data skunder dan data primer. Data sekunder berasal dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Selanjutnya data primer didapat dari hasil wawancara dengan masyarakat penerima bansos yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), keuchik atau aparatur desa yang mewakili, dan OPD terkait, yaitu Dinas Sosial, Baitul Mal, dan Bappeda di setiap kabupaten.

Untuk ketepatan dalam melakukan wawancara, perlu dilakukan penyusunan instrumen analisis yang dijabarkan dalam berbagai pertanyaan dalam bentuk kuesioner. Penyusunan instrumen ini dimulai dari *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para peneliti, akademisi, Dinas Sosial, Baitul Mal, dan Bappeda. Selanjutnya dipilih kabupaten yang menjadi sampel penelitian, dengan pertimbangan daerah yang banyak dan sedikit untuk jumlah penerima bansos.

Setelah instrumen dalam bentuk kuesioner selesai, metode survey dilaksanakan dengan cara wawancara secara mendalam kepada masyarakat yang masuk dalam DTKS sebagai penerima bansos. Selanjutnya dilakukan wawancara dengan keuchik atau perangkat desa lainnya. Akhirnya dilakukan FGD dengan instansi-instansi yang terkait dalam penyaluran bantuan sosial.

Pada populasi yang heterogen dan berukuran besar agar diperoleh sampel yang representatif, maka proses penarikan sampel dapat dilakukan dengan cara *multistage random sampling* (sampel acak berperingkat). *Multistage random sampling* adalah cara pengambilan sampel dengan menggunakan kombinasi dari 2 (dua) atau lebih metode pengambilan sampel

yang berbeda. *Multistage sampling* tidak hanya memilih semua elemen dari cluster, tetapi beberapa elemen yang dipilih bisa dilakukan dengan cara acak.

Untuk pemilihan daerah penelitian, dipilih kabupaten dengan membagi 3 zona, yaitu zona tengah (Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah), zona barat (Kabupaten Aceh Barat Daya dan Nagan Raya); dan zona timur (Kabupaten Bireuen dan Pidie Jaya). Sedangkan untuk kecamatan dipilih yang paling dekat dan jauh dengan ibukota kabupaten. Selanjutnya pemilihan desa akan dilakukan dengan mengambil jumlah penerima bansos yang paling banyak dan yang paling sedikit. Untuk pengambilan responden yang diwawancarai dipilih secara acak dengan mempertimbangkan akses kemudahan mencapai responden.

3.3 Hasil Penelitian

3.3.1 Gambaran Umum Penelitian

3.3.2 Kondisi Umum Wilayah Penelitian

3.3.2.1 Kabupaten Aceh Tengah

Kabupaten Aceh Tengah adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh dengan ibukota Takengon. Pada akhir tahun 2023, jumlah penduduk Aceh Tengah adalah 227.168 jiwa. Kabupaten Aceh Tengah merupakan dataran tinggi dengan ketinggian antara 200 – 2.600 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah sebesar 4.454,50 km². Kabupaten Aceh Tengah memiliki 14 kecamatan dan 295 gampong. Gambaran untuk jumlah penerima bansos, jumlah anggaran bansos, jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Penerima, Anggaran Bansos Pangan, Jumlah dan Garis Kemiskinan Kabupaten Aceh Tengah

No	Uraian/Tahun	2020	2021	2022	2023
1	Rencana Jumlah KPM Bansos Pangan (KK)	16.090	15.343	120.723	98.198
2	Realisasi Jumlah KPM Bansos Pangan (KK)	17.874	13.788	117.227	95.639
3	Rencana Anggaran Bansos Pangan (Rp)	3.218.000.000	46.510.000.000	41.477.200.000	39.430.600.000
4	Realisasi Anggaran Bansos Pangan (Rp)	3.574.800.000	39.365.200.000	40.415.400.000	38.379.000.000
5	Garis Kemiskinan (Rp)	492.227	505.933	533.810	584.863

Sumber: Data BPS, 2024

Kabupaten Aceh Tengah menunjukkan trend yang meningkat untuk jumlah penerima KPM, anggaran, garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin. Aceh Tengah mempunyai realisasi jumlah penerima KPM paling tinggi di tahun 2022. Namun, peningkatan tersebut tidak diikuti dengan realisasi anggaran. Jumlah penduduk miskin mengalami penurunan di tahun 2022.

3.3.2.2 Kabupaten Bener Meriah

Kabupaten Bener Meriah merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah. Pada akhir tahun 2023, jumlah penduduk Bener Meriah sebanyak 175.781 jiwa. Luas wilayah 1.454,09 km² terdiri dari 10 Kecamatan dan 233 desa. Gambaran untuk jumlah penerima bansos, jumlah anggaran bansos, jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Penerima, Anggaran Bansos Pangan, Jumlah dan Garis Kemiskinan Kabupaten Bener Meriah

No	Uraian/Tahun	2020	2021	2022	2023
1	Rencana Jumlah KPM Bansos Pangan (KK)	13.981	11.37	59.43	37.636
2	Realisasi Jumlah KPM Bansos Pangan (KK)	11.799	10.19	56.577	35.491
3	Rencana Anggaran Bansos Pangan (Rp)	2.796.200.000	32.289.600.000	21.608.400.000	15.209.000.000
4	Realisasi Anggaran Bansos Pangan (Rp)	2.359.800.000	27.715.400.000	20.703.200.000	14.340.000.000
5	Garis Kemiskinan (Rp)	457.916	476.074	512.111	551.868
6	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	28.38	28.69	27.93	28.19

Sumber: Data BPS, 2024

Sama dengan Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah juga menunjukkan trend yang meningkat untuk jumlah penerima KPM, anggaran, garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin. Bener Meriah mempunyai realisasi jumlah penerima KPM paling tinggi di tahun 2022 (56.577 KK). Peningkatan tersebut tidak diikuti dengan realisasi anggaran yang meningkat, malah menurun dibandingkan dengan tahun 2021. Demikian juga dengan jumlah penduduk miskin yang seharusnya juga meningkat akibat meningkatnya jumlah KPM Bansos Pangan namun mengalami penurunan di tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021. Sama dengan Aceh Tengah, secara teori jika jumlah penerima KPM meningkat karena jumlah penduduk miskin yang meningkat maka akan diikuti dengan anggaran bansos pangan yang meningkat.

3.3.2.3 Kabupaten Aceh Barat Daya

Kabupaten Aceh Barat Daya Aceh Barat Daya atau yang sering disingkat ABDYA merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan. Pada akhir tahun 2023, jumlah penduduk Aceh Barat Daya sebanyak 154.800 jiwa. Kabupaten ini mempunyai 9 kecamatan dan 152 gampong, Gambaran untuk jumlah penerima bansos, jumlah anggaran bansos, jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Penerima, Anggaran Bansos Pangan, Jumlah dan Garis Kemiskinan Kabupaten Aceh Barat Daya

No	Uraian/Tahun	2020	2021	2022	2023
1	Rencana Jumlah KPM Bansos Pangan (KK)	13.475	14.985	120.816	100.425
2	Realisasi Jumlah KPM Bansos Pangan (KK)	15.616	13.466	116.264	96.716
3	Rencana Anggaran Bansos Pangan (Rp)	2.695.000.000	42.882.000.000	41.568.600.000	40.902.800.000
4	Realisasi Anggaran Bansos Pangan (Rp)	3.123.200.000	36.740.800.000	40.241.000.000	39.392.000.000
5	Garis Kemiskinan (Rp)	393.640	406.157	430.297	474.127
6	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	24.21	25.06	24	24.31

Sumber: Data BPS, 2024

Tidak jauh berbeda dengan Aceh Tengah dan Bener Meriah, jumlah KPM di Kabupaten Aceh Barat Daya di tahun 2022 juga mengalami peningkatan yang tidak diikuti oleh kenaikan anggaran. Sedangkan jumlah penduduk miskin mengalami penurunan di tahun 2022. Garis kemiskinan menunjukkan trend yang meningkat.

3.3.2.4 Kabupaten Nagan Raya

Kabupaten Nagan Raya adalah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat. Jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2024 adalah sebanyak 179.108 jiwa. Kabupaten ini memiliki 10 kecamatan dan 222 gampong. Gambaran untuk jumlah penerima bansos, jumlah anggaran bansos, jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Penerima, Anggaran Bansos Pangan, Jumlah dan Garis Kemiskinan Kabupaten Nagan Raya

No	Uraian/Tahun	2020	2021	2022	2023
1	Rencana Jumlah KPM Bansos Pangan (KK)	15.612	14.884	114.178	89.973
2	Realisasi Jumlah KPM Bansos Pangan (KK)	16.655	13.238	107.694	85.323
3	Rencana Anggaran Bansos Pangan (Rp)	3.122.400.000	44.095.600.000	39.236.400.000	36.199.200.000
4	Realisasi Anggaran Bansos Pangan (Rp)	3.331.000.000	36.440.000.000	37.264.200.000	34.279.000.000
5	Garis Kemiskinan (Rp)	493.121	508.801	544.300	594.374
6	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	29.99	30.71	29.63	29.78

Sumber: Data BPS, 2024

Tidak jauh berbeda dengan Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Aceh Barat Daya, Kabupaten Nagan Raya juga mempunyai jumlah KPM yang meningkat di tahun 2022, namun nilai anggaran yang menurun dan jumlah penduduk miskin yang juga menurun. Sedangkan untuk garis kemiskinan terus mengalami peningkatan.

3.3.2.5 Kabupaten Bireuen

Kabupaten Bireuen adalah wilayah pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara. Luas wilayah Kabupaten Bireun adalah 1.796,32 Km² (179.632 Ha), dengan ketinggian 0–2.637 meter di atas permukaan laut. Terbagi dalam 17 kecamatan dengan 609 gampong. Gambaran untuk jumlah penerima bansos, jumlah anggaran bansos, jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Penerima, Anggaran Bansos Pangan, Jumlah dan Garis Kemiskinan Kabupaten Bireun

No	Uraian/Tahun	2020	2021	2022	2023
1	Rencana Jumlah KPM Bansos Pangan (KK)	38.773	41.061	322.742	270.63
2	Realisasi Jumlah KPM Bansos Pangan (KK)	42.552	37.392	317.325	267.756
3	Rencana Anggaran Bansos Pangan (Rp)	7.754.600.000	120.211.200.000	110.712.200.000	108.946.600.000
4	Realisasi Anggaran Bansos Pangan (Rp)	8.510.400.000	100.644.800.000	109.043.800.000	107.735.800.000
5	Garis Kemiskinan (Rp)	410.203	422.685	451.163	486.667
6	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	62.42	63.02	60.29	59.21

Sumber: Data BPS, 2024

Hampir sama dengan Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Barat Daya, dan Nagan Raya, Kabupaten Bireuen juga mempunyai jumlah KPM yang meningkat di tahun 2022 namun jumlah penduduk miskin menurun. Nilai anggaran bansos pada tahun 2022 juga mengalami penurunan.

3.3.2.6 Kabupaten Pidie Jaya

Kabupaten Pidie Jaya adalah kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Pidie. Jumlah penduduk Pidie Jaya pada akhir tahun 2023 sebanyak 163.391 jiwa. Kabupaten ini mempunyai 8 kecamatan dan 222 gampong. Gambaran untuk jumlah penerima bansos, jumlah anggaran bansos, jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Penerima, Anggaran Bansos Pangan, Jumlah dan Garis Kemiskinan Kabupaten Pidie Jaya

No	Uraian/Tahun	2020	2021	2022	2023
1	Rencana Jumlah KPM Bansos Pangan (KK)	16.958	15.259	137.138	114.359
2	Realisasi Jumlah KPM Bansos Pangan (KK)	16.354	13.628	134.577	113.127
3	Rencana Anggaran Bansos Pangan (Rp)	3.391.600.000	44.317.600.000	47.130.400.000	46.038.400.000
4	Realisasi Anggaran Bansos Pangan (Rp)	3.270.800.000	37.075.400.000	46.289.000.000	45.538.000.000
5	Garis Kemiskinan (Rp)	481.308	495.254	523.239	572.452
6	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	31.39	31.79	30.41	30.74

Sumber: Data BPS, 2024

Hal yang sama dengan Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Bireuen, juga terjadi di Kabupaten Pidie Jaya. Jumlah KPM pada tahun 2022 mengalami peningkatan drastis dari 13.628 KK tahun 2021 menjadi 134.577 KK pada tahun 2022. Namun jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sedangkan garis kemiskinan mengalami peningkatan.

3.3.3 Lokasi Penelitian

Penetapan wilayah sebagai lokasi penelitian berdasarkan beberapa pertimbangan strategis sehingga 3 kawasan ini menjadi area yang representatif untuk dijadikan Lokasi sampel penelitian:

1. Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah

Aceh Tengah dan Bener Meriah merupakan kabupaten yang belum mampu menurunkan angka kemiskinannya (berdasarkan data DTKS per KK). Kabupaten Aceh Tengah, juga mencatat kenaikan pada tahun 2022 dari 36.224 menjadi 37.160 dengan selisih kenaikan sebesar 936 KK (peringkat keempat tertinggi). Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2021 mencatat jumlah penerima DTKS sebesar 29.646 KK meningkat secara signifikan menjadi 41.583 di tahun 2022 (selisih 11.937 KK). Dibandingkan kabupaten

lain, Bener Meriah merupakan kabupaten dengan selisih jumlah penerima DTKS tertinggi pada tahun 2022. Kedua kabupaten ini memiliki karakteristik geografis dan sosial ekonomi yang unik, seperti wilayah pegunungan yang lebih terpencil sehingga karakteristik perekonomian dan pendapatan penduduknya berbeda dengan wilayah perkotaan. Pemilihan ini memungkinkan penelitian untuk mengevaluasi efektivitas bantuan sosial di daerah dengan akses yang lebih sulit yang mungkin saja menimbulkan kesulitan dalam pemantauan bansos, sehingga memberikan wawasan yang berbeda dibandingkan dengan daerah perkotaan.

2. Kabupaten Aceh Barat Daya dan Nagan Raya

Kedua kabupaten ini berada di kawasan pesisir dengan dinamika perekonomian yang berbeda. Menurut data DTKS per KK, kedua kabupaten ini mampu menurunkan angka kemiskinannya walaupun dalam laju yang relative lambat. Upaya penurunan tersebut membuat kedua kabupaten ini menarik untuk dijadikan sampel lokasi penelitian dengan tantangan geografis, logistik, dan infrastruktur dalam pendistribusian bantuan sosial.

3. Kabupaten Bireun dan Pidie Jaya

Secara umum, kedua kabupaten ini memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Pidie Jaya merupakan urutan terbesar kedua (secara rata-rata setiap bulannya sepanjang tahun 2021 dan 2022) yang mampu dengan cepat menurunkan kemiskinan jika dilihat dari data DTKS per KK. Kemudian Bireuen merupakan salah satu kabupaten dengan selisih jumlah penerima DTKS tertinggi ketiga yang paling cepat menurunkan kemiskinan (berkurang 8.983 KK) pada Juni 2022. Kedua kabupaten ini merupakan wilayah yang mempunyai populasi yang cukup besar dan beragam karakteristiknya secara demografis di Provinsi Aceh.

Selengkapnya lokasi penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Lokasi Penelitian

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Jumlah Responden
1	Aceh Tengah	Bebesen	1. Simpang Empat	10
			2. Mongal	10
2	Bener Meriah	Bukit	1. Kute Lintang	10
			2. Uning Teritit	10
3	Aceh Barat Daya	Babahrot	1. Pantai Cermin	10
			2. Alue Jerjak	10
4	Nagan Raya	Darul Makmur	1. Blang Baro	10
			2. Tuwi Buya	11
5	Bireuen	Peusangan	1. Uteuen Bunta	10
			2. Alue Udeueng	10
6	Pidie Jaya	Bandar Baru	1. Balee Musa	10
			2. Cot Langien	10
J u m l a h				121

Sumber: Data Survey 2024

3.3.4 Karakteristik Responden

Pada bagian ini, disajikan informasi mengenai karakteristik responden yang terlibat dalam penelitian ini. Pemahaman mengenai profil responden sangat penting untuk memberikan gambaran yang jelas tentang latar belakang individu yang memberikan data, serta untuk menilai sejauh mana hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Karakteristik responden yang diungkapkan mencakup aspek-aspek demografis seperti jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, serta faktor-faktor lain yang relevan dengan topik penelitian ini. Dengan demikian, bagian ini bertujuan untuk memberikan konteks yang lebih dalam terhadap analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini.

1. Jenis Kelamin Responden

Responden dalam penelitian ini adalah 91 persen perempuan dan 9 persen laki-laki. Hal ini disebabkan karena bantuan sosial memang diprioritaskan kepada perempuan.

Gambar 3.2 Jenis Kelamin Responden

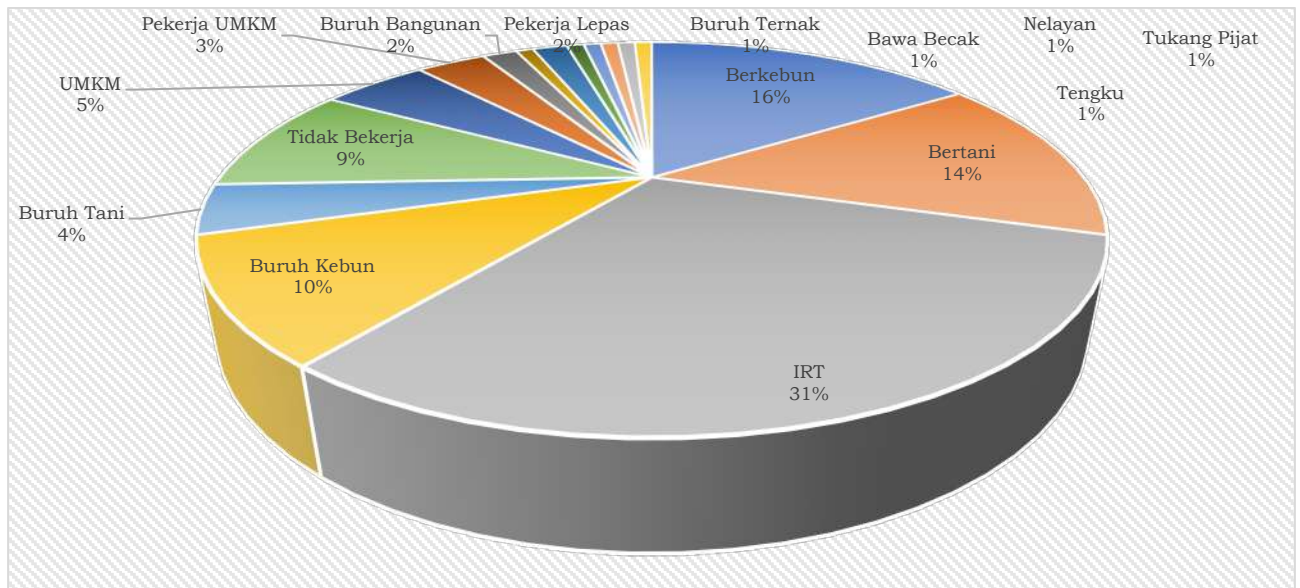


Sumber: Hasil Survei, 2024

2. Pekerjaan Responden

Pekerjaan utama rata-rata responden adalah ibu rumah tangga, petani kebun, petani sawah yang memiliki kebun dan sawah sendiri, juga sebagai buruh tani dan kebun. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini

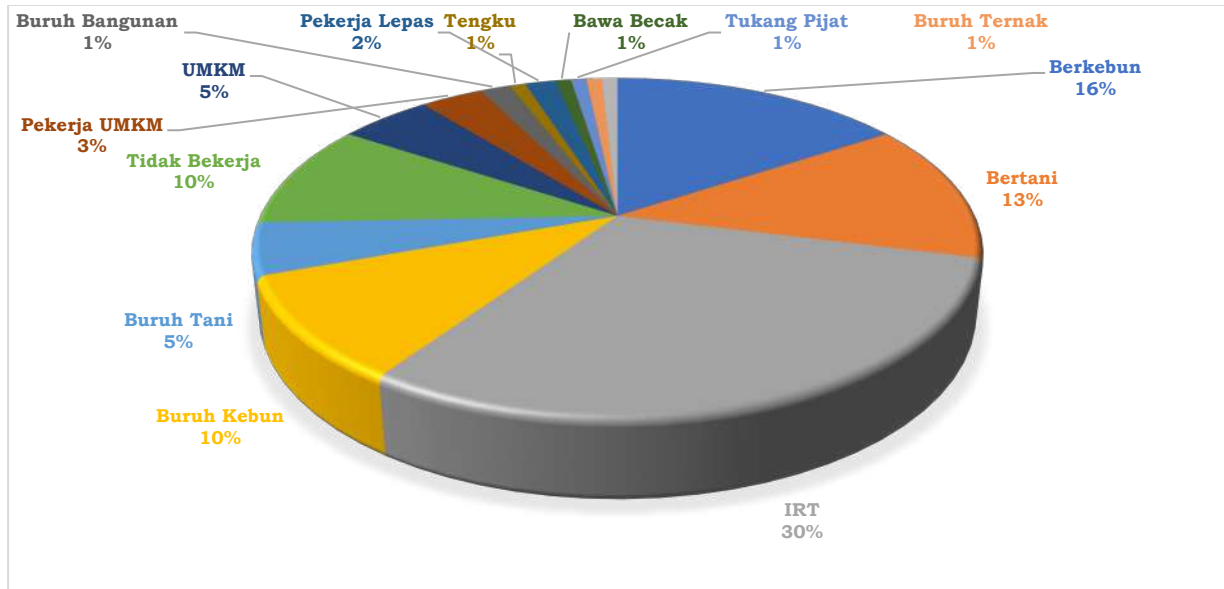
Gambar 3.3 Pekerjaan Utama Responden Sebelum Bansos



Sumber: Hasil Survei, 2024

Tidak berbeda dengan setelah mendapatkan bansos, tidak ada perubahan pekerjaan yang signifikan pada responden sebelum dan setelah mendapatkan bansos. Hal ini bisa dilihat pada gambar berikut.

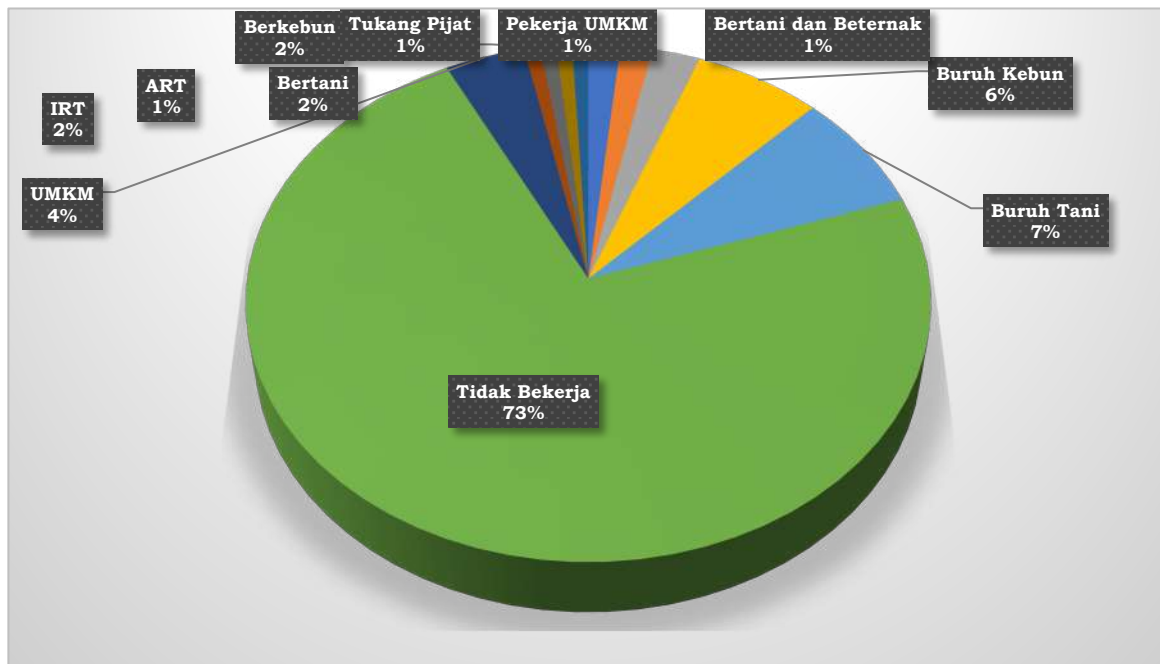
Gambar 3.4 Pekerjaan Utama Responden Setelah Bansos



Sumber: Hasil Survei, 2024

Untuk pekerjaan sampingan responden, sebanyak 73 persen responden tidak memiliki pekerjaan sampingan lain, selain pekerjaan utamanya yang disebutkan di atas. Ada beberapa responden yang mempunyai sawah dan kebun, kadang menjadi buruh tani dan kebun juga untuk pekerjaan sampingannya.

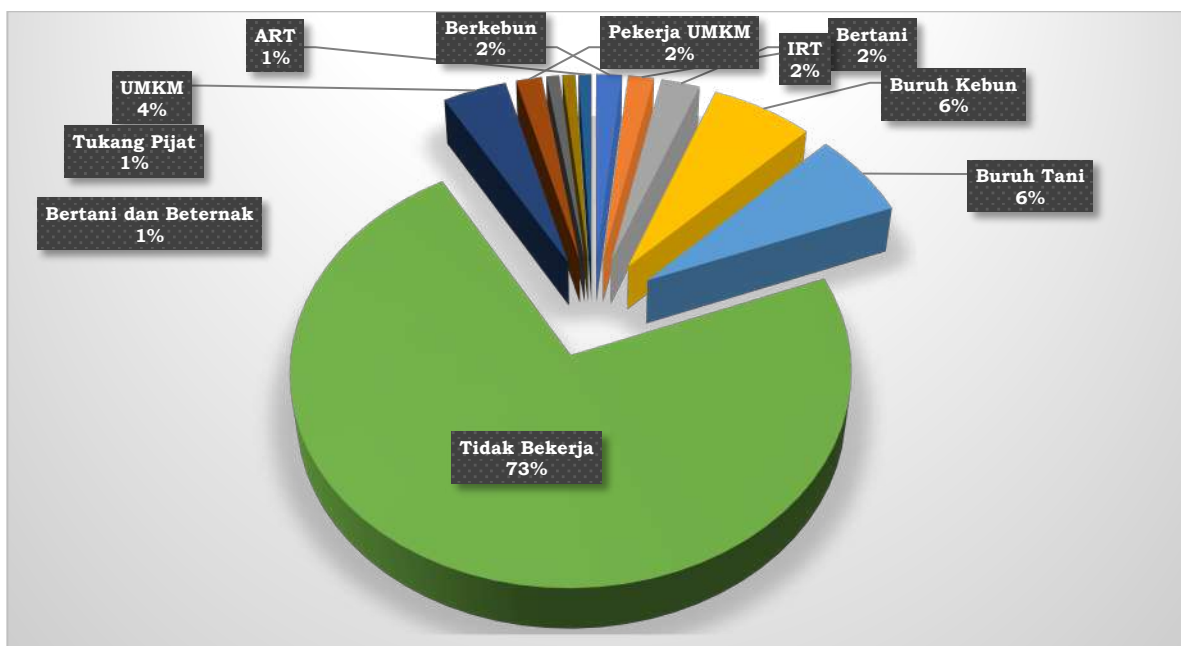
Gambar 3.5 Pekerjaan Sampingan Responden Sebelum Bansos



Sumber: Hasil Survei, 2024

Tidak ada perbedaan yang signifikan juga untuk pekerjaan sampingan responden baik sebelum menerima bansos atau setelah menerima bansos.

Gambar 3.6 Pekerjaan Sampingan Setelah Bansos



Sumber: Hasil Survei, 2024

3. Pendapatan dan Pengeluaran Responden

Pendapatan rata-rata dan pengeluaran responden sebelum bansos adalah Rp. 2.104.507,- dan Rp. 2.124.676,-. Dan setelah menerima bansos menjadi Rp. 2.447.561,- dan Rp. 2.134.056,-. Penambahan pendapatan sebelum dan setelah menerima bansos ternyata lebih besar daripada penambahan pengeluaran sebelum dan setelah menerima bansos. Hal ini menandakan bahwa kebutuhan responden memang sudah tinggi, sehingga ketika ada penambahan pendapatan hanya menambah pengeluaran sedikit. Jika dilihat dari jumlah pendapatan setelah bansos dengan pengeluaran setelah bansos, seharusnya rata-rata responden mempunyai tabungan sedikit, karena pendapatan rata-rata setelah bansos bisa diatas pengeluaran rata-rata sehingga bisa diasumsikan mempunyai tabungan. Namun jika dilihat dari nilai minimum pendapatan, terlihat bahwa terdapat responden yang tidak memiliki pendapatan. Hal ini terjadi untuk responden yang berumur tua, responden yang sakit permanen baik fisik atau psikis. Nilai maksimum pendapatan konsumen adalah Rp. 7.000.000 sebelum bansos dan meningkat menjadi Rp. 7.600.000 setelah menerima bansos.

Tabel 3.8 Pendapatan dan Pengeluaran Responden

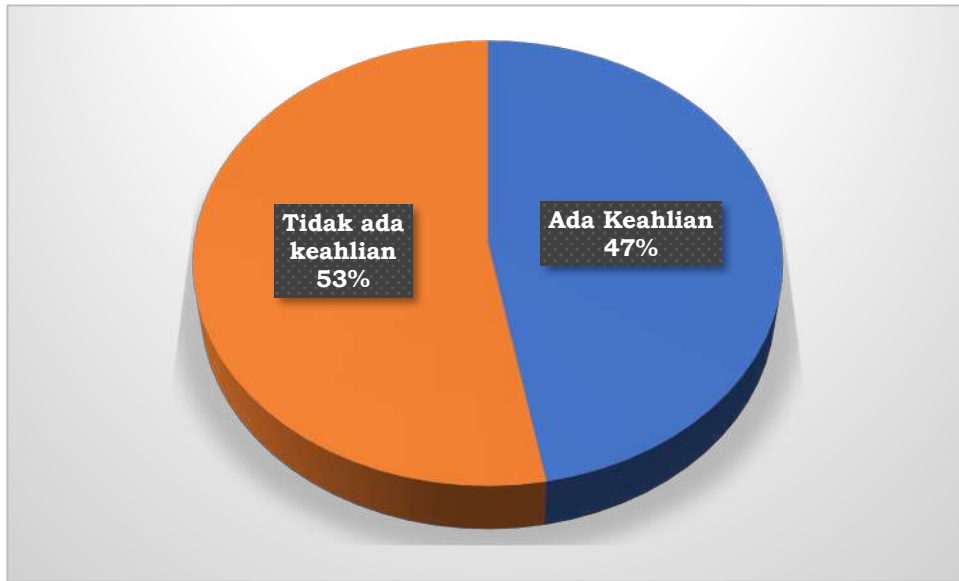
NO	Pendapatan		Pengeluaran	
	Sebelum Bansos	Sesudah Bansos	Sebelum Bansos	Sesudah Bansos
Rata-rata	Rp 2.104.507	Rp 2.447.561	Rp 2.124.676	Rp 2.134.056
Minimum	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Maksimum	Rp 7.000.000	Rp 7.600.000	Rp 7.886.000	Rp 7.886.000

Sumber: Hasil Survei, 2024.

4. Keahlian

Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata responden tidak mempunyai keahlian yang bisa dijadikan sebagai sumber peningkatan pendapatan yang lebih.

Gambar 3.7 Keahlian Responden

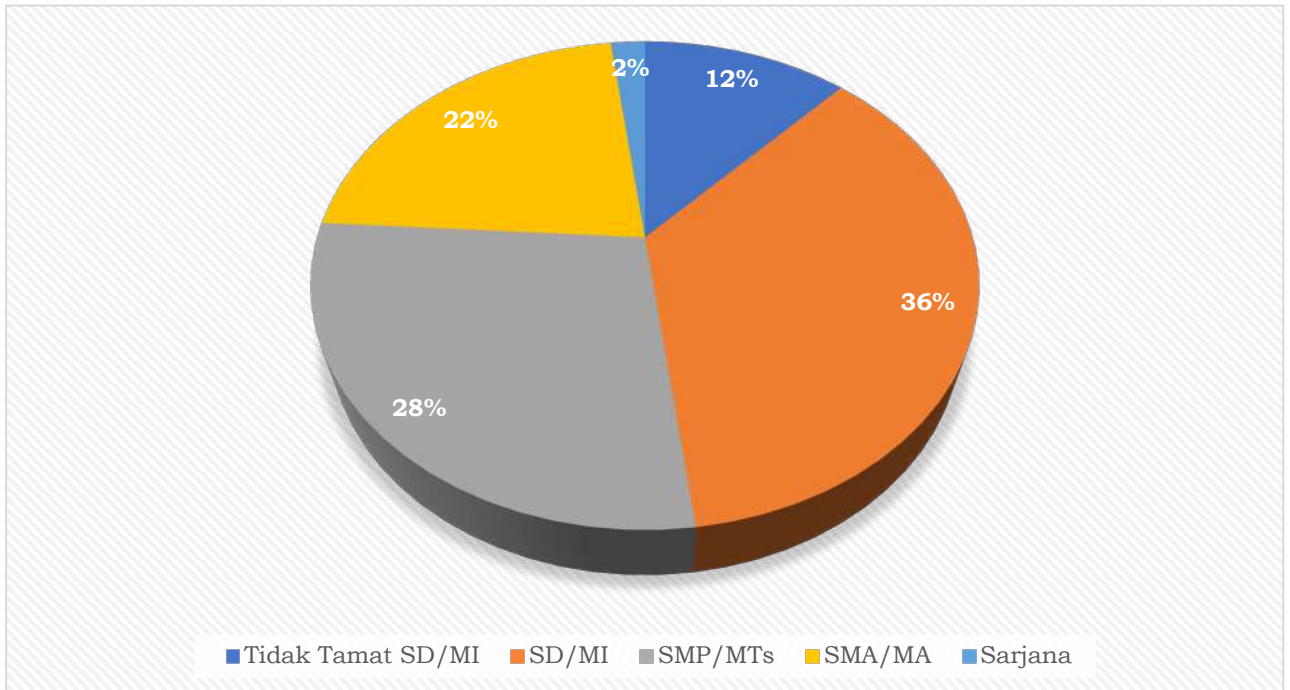


Sumber: Hasil Survei, 2024.

5. Pendidikan

Hasil penelitian mendapatkan bahwa rata-rata pendidikan responden adalah lulusan SD/MI (36 persen); lulusan SMP/MTs (28 persen); lulusan SMA/MA (22 persen); tidak tamat SD/MI (12 persen); dan sarjana (2 persen).

Gambar 3.8 Pendidikan Responden

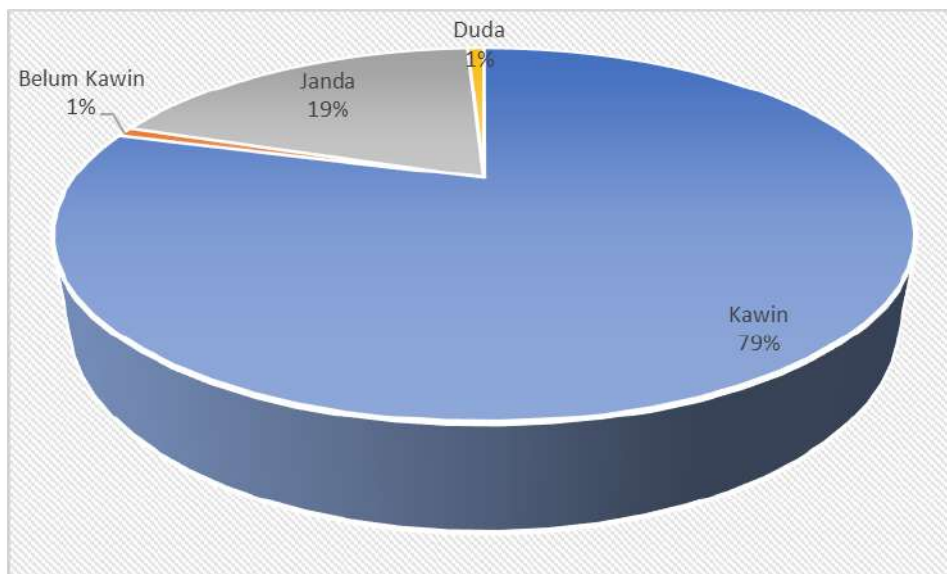


Sumber: Hasil Survei, 2024.

6. Status Perkawinan

Status perkawinan responden rata-rata adalah kawin (79 persen); janda (19 persen); duda (1 persen), dan duda (1 persen).

Gambar 3.9 Status Perkawinan Responden

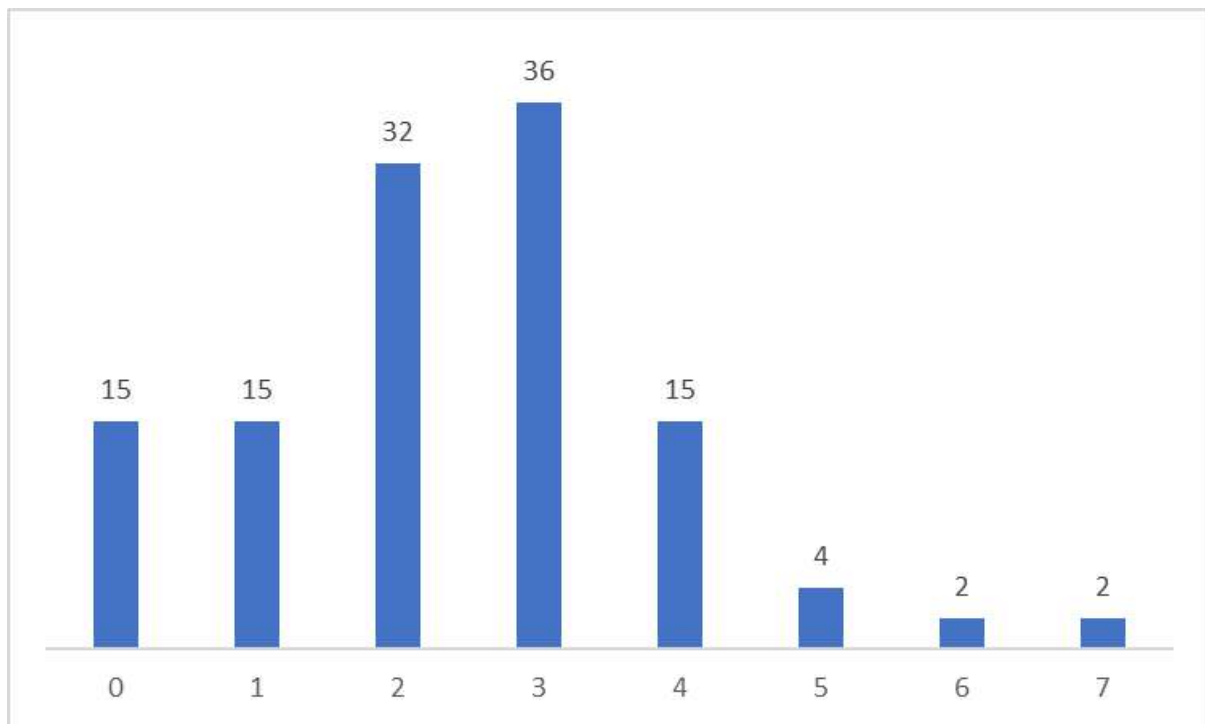


Sumber: Hasil Survei, 2024

7. Jumlah Tanggungan

Jumlah tanggungan rata-rata responden adalah 3 orang, sedangkan jumlah tanggungan minimum adalah 0 orang dan maksimum adalah 7 orang. Gambaran persentase jumlah tanggungan responden dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.10 Jumlah Tanggungan Responden



Sumber: Hasil Survei, 2024

Gambar di atas menjelaskan jumlah anak yang dimiliki oleh responden. Sebanyak 15 responden tidak memiliki tanggungan; 15 responden memiliki 1 tanggungan; 32 responden memiliki 2 tanggungan; 36 responden memiliki 3 tanggungan; 15 responden memiliki 4 tanggungan; 4 responden memiliki 5 tanggungan; 2 responden memiliki 6 tanggungan; dan 2 responden memiliki 7 tanggungan.

3.4 Efektivitas Bansos dalam Pengentasan Kemiskinan

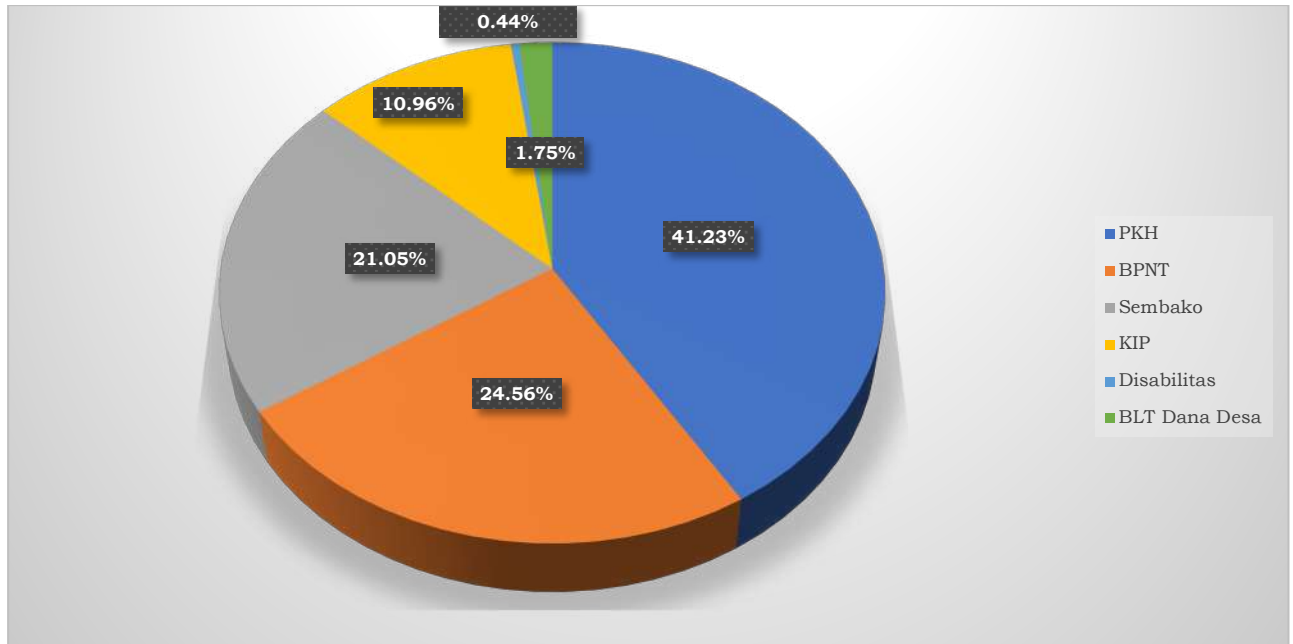
3.4.1 Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran dalam program bantuan sosial adalah hal yang sangat penting dalam upaya mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial. Ketepatan sasaran mengacu pada sejauh mana bantuan sosial yang diberikan sampai pada individu atau kelompok yang benar-benar membutuhkan, serta memastikan bahwa sumber daya yang terbatas digunakan secara efisien dan efektif. Dalam konteks Indonesia, bantuan sosial sering kali diberikan dalam bentuk tunai, sembako, atau program lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu.

Namun, dalam pelaksanaannya, seringkali terdapat tantangan dalam menentukan siapa yang benar-benar membutuhkan bantuan, sehingga dapat terjadi ketidaktepatan sasaran. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketepatan sasaran program ini, seperti kesalahan dalam pendataan, manipulasi data, atau kurangnya sistem yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, penguatan sistem data dan verifikasi menjadi krusial dalam memastikan bantuan sosial sampai pada orang yang tepat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sasaran program bantuan sosial adalah semua penduduk miskin yang masuk dalam DTKS. Jenis bantuan yang ditemukan di lokasi penelitian adalah 41,23 persen Program Keluarga Harapan (PKH); 24,56 persen Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), 21,05 persen sembako; 10,96 persen Kartu Indonesia Pintar (KIP), 1,75 persen bantuan disabilitas; dan 0,44 persen Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa).

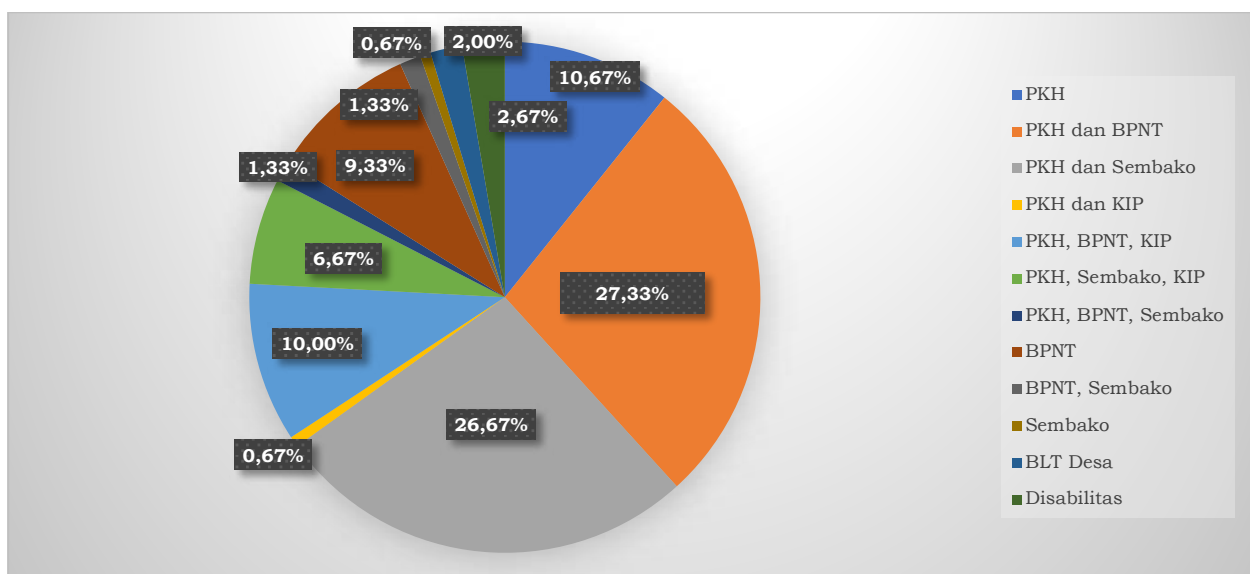
Gambar 3.11 Jenis Bantuan Sosial yang Tersedia



Sumber: Hasil Survei, 2024.

Responden yang diteliti tidak hanya mendapatkan satu jenis bantuan sosial, namun ada beberapa jenis bantuan sosial mengikuti keperluan masing-masing penerima. Jenis-jenis bansos yang diterima oleh responden dapat diklasifikasikan pada gambar berikut ini:

Gambar 3.12 Pengelompokan Bantuan Sosial yang Diterima

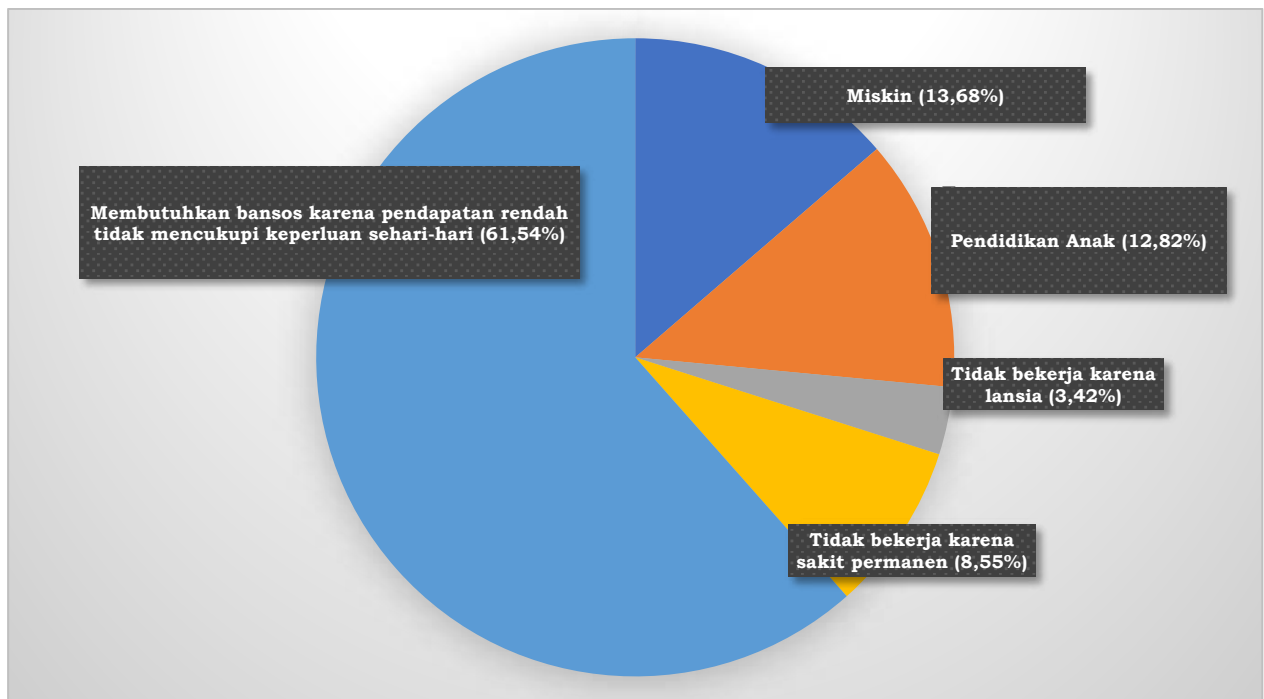


Sumber: Hasil Survei, 2024.

Sebagian besar responden menerima bantuan sosial dalam pengelompokan terbanyak adalah PKH dan BPNT; PKH dan Sembako; PKH; PKH, BPNT, dan KIP; dan BPNT.

Dari seluruh responden yang diwawancarai, diketahui semua telah masuk dalam DTKS dan menyatakan bahwa merasa sesuai dan layak mendapatkan bantuan sosial yang sudah diterima selama ini. Beberapa alasan yang dikemukakan dapat dilihat pada gambar berikut ini:

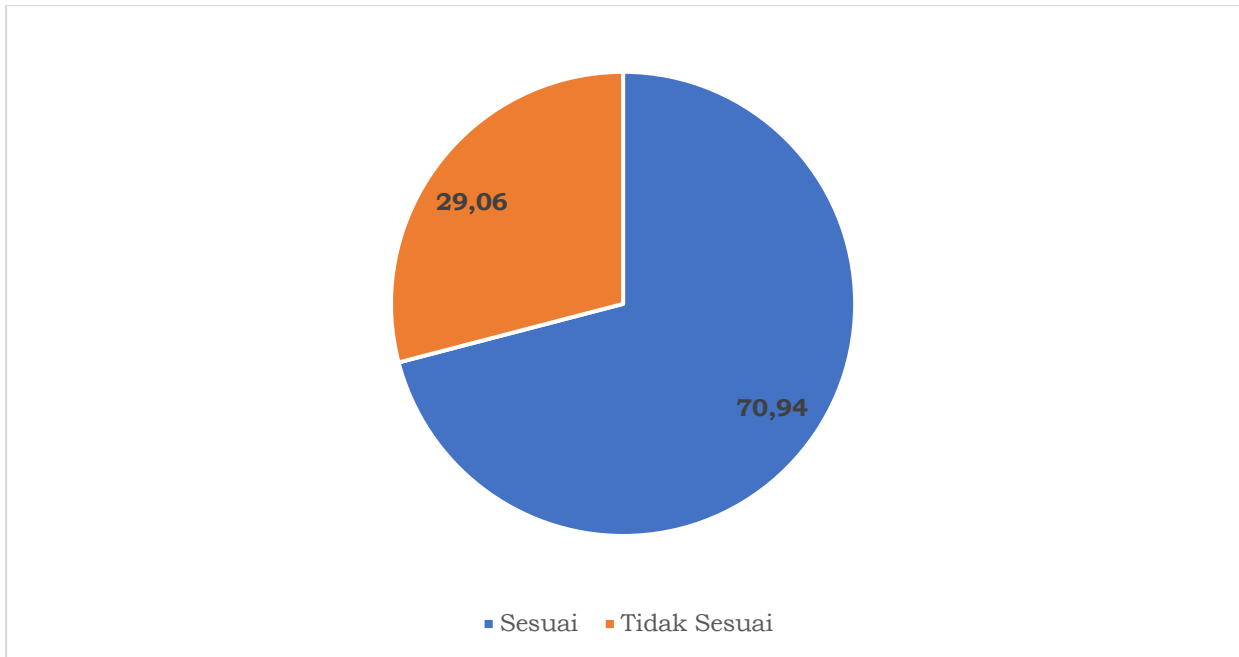
Gambar 3.13 Kelayakan Menerima Bantuan Sosial



Sumber: Hasil Survei, 2024.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa ada ketidaksesuaian antara bantuan sosial yang diterima dengan bantuan sosial yang diinginkan. Sebanyak 70,94 persen responden merasa bahwa bantuan sosial yang diterima sudah sesuai, namun sebanyak 29,06 persen responden (34 responden) merasa tidak sesuai.

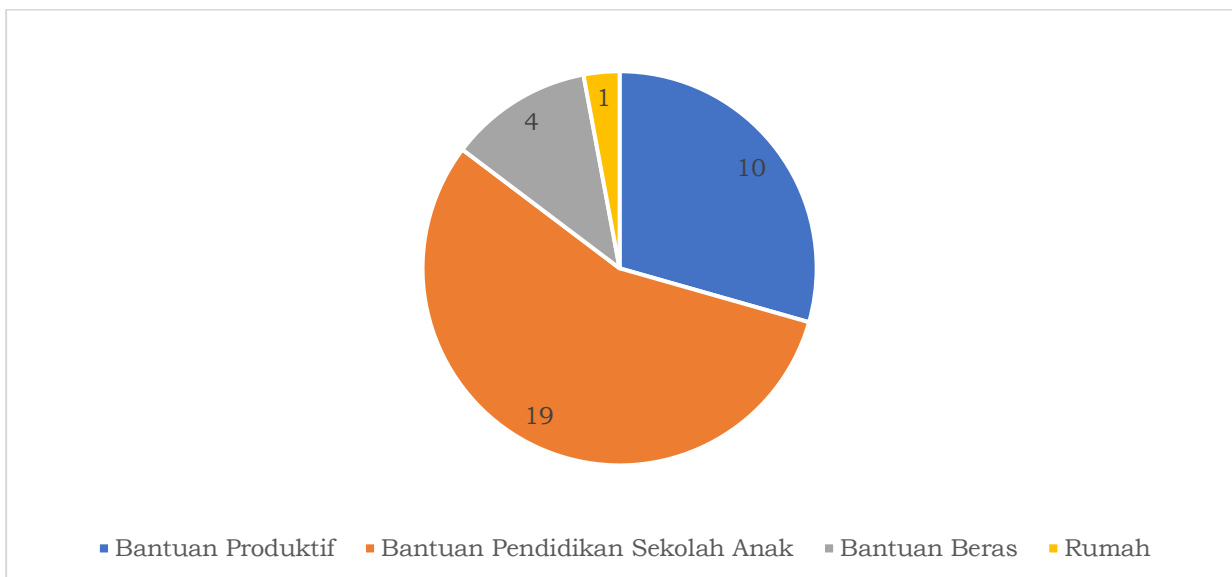
Gambar 3.14 Kesesuaian Bansos yang Diterima (Persen)



Sumber: Hasil Survei, 2024.

Ketidaksesuaian ini dikarenakan responden lebih memerlukan bantuan pendidikan sekolah anak, bantuan produktif, bantuan beras, dan bantuan rumah.

Gambar 3.15 Bantuan Sosial yang Diharapkan (Orang)



Sumber: Hasil Survei, 2024.

3.4.2 Sosialisasi Program

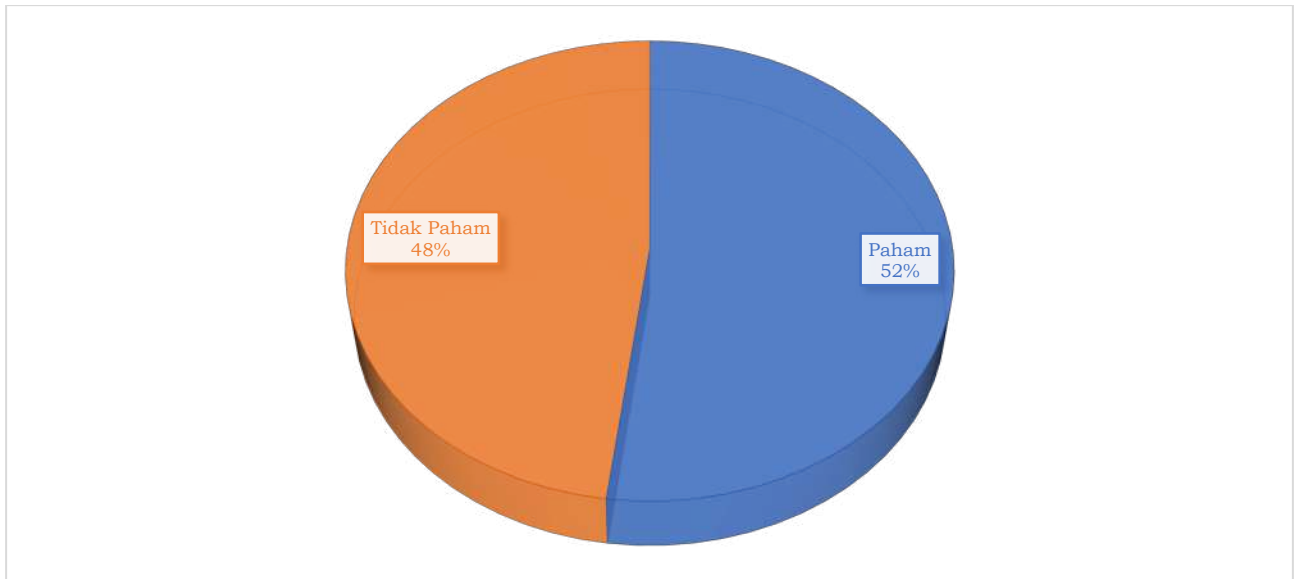
Sosialisasi program bantuan sosial merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memastikan bahwa masyarakat memahami tujuan, mekanisme, dan manfaat dari program bantuan sosial yang diberikan. Sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi yang jelas dan transparan tentang jenis bantuan yang tersedia, cara pendaftaran atau penerimaannya, serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Proses sosialisasi yang efektif akan membantu meminimalkan kesalahpahaman, kebingungan, atau bahkan penyalahgunaan dalam distribusi bantuan sosial.

Program bantuan sosial sendiri dirancang untuk membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan, seperti keluarga miskin, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan mereka yang terdampak bencana atau krisis. Dengan adanya sosialisasi yang baik, masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam mengikuti program ini, serta menghindari adanya penyelewengan atau ketidaktepatan sasaran penerima bantuan.

Sosialisasi juga berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan program bantuan sosial itu sendiri. Tanpa adanya pemahaman yang memadai, masyarakat mungkin tidak akan memanfaatkan program bantuan yang tersedia, atau bahkan merasa tidak diikutsertakan dalam program tersebut. Oleh karena itu, berbagai metode sosialisasi perlu diterapkan, seperti melalui media massa, media sosial, pertemuan langsung dengan masyarakat, hingga melibatkan tokoh masyarakat yang dipercaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengaku memahami jenis-jenis bantuan sosial yang diterima.

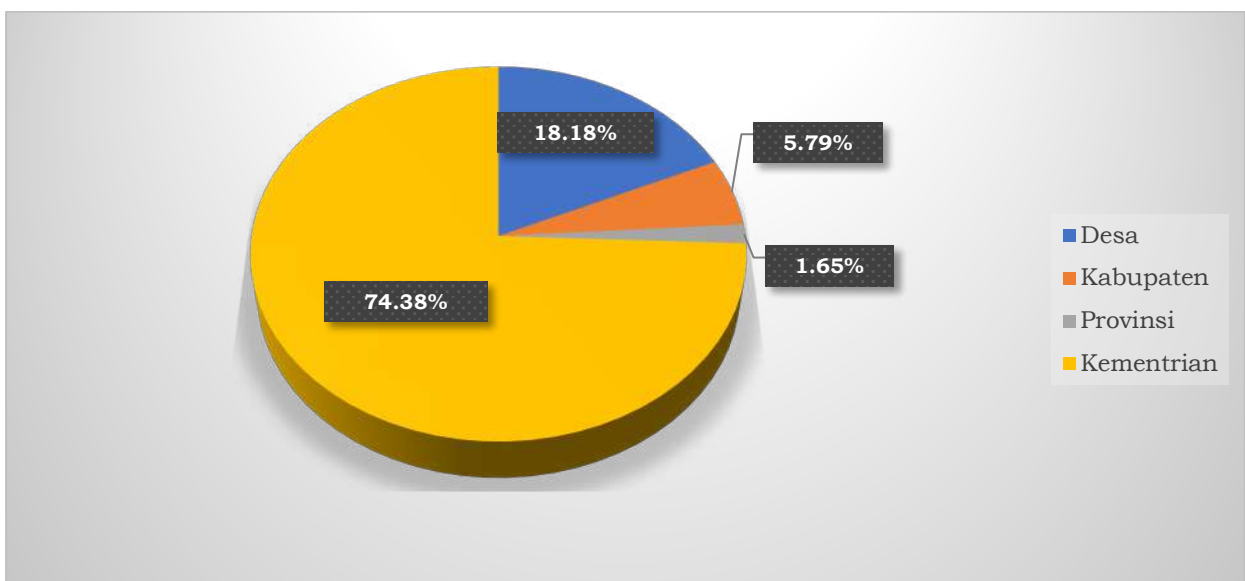
Gambar 3.16 Pemahaman Jenis Bansos



Sumber: Hasil Survei, 2024.

Namun ketika ditanyakan kembali darimana sumber bansos yang diterima, masih ada responden yang tidak paham sumber bansos yang mereka terima. Selain itu, kebanyakan responden mengetahui jenis-jenis bansos setelah mendapatkan bansosnya. Gambaran sumber bansos yang diketahui oleh responden adalah sebagai berikut:

Gambar 3.17 Sumber Bansos yang Diketahui oleh Responden

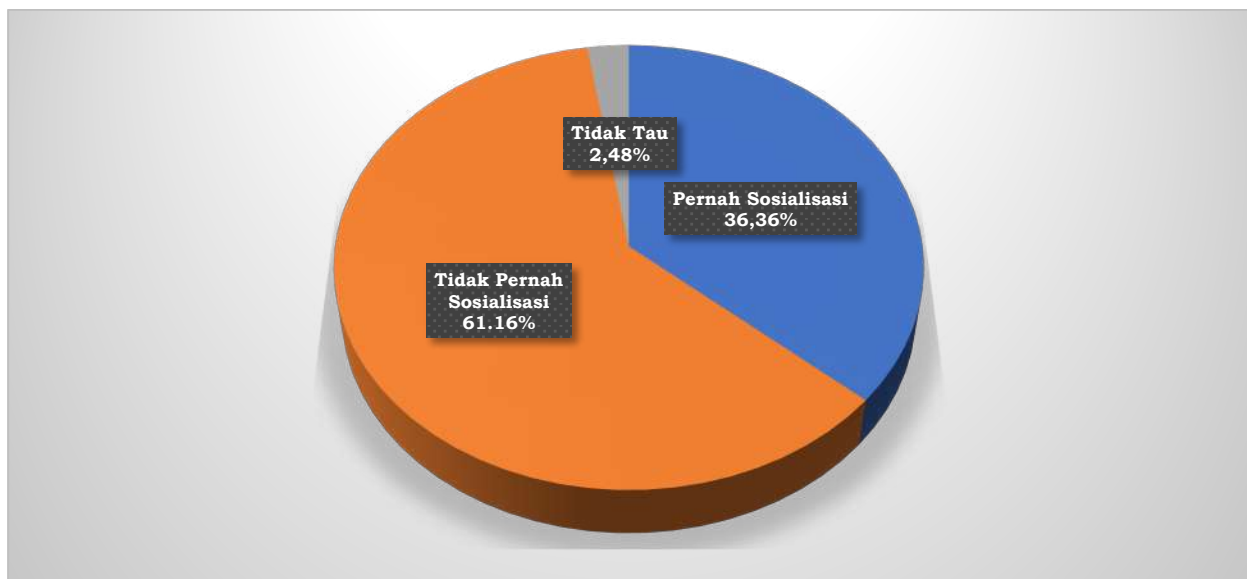


Sumber: Hasil Survei, 2024.

Masih ada responden yang berpikir bahwa sumber bantuan sosial yang diterima selama ini dari desa karena ketiadaan informasi yang menyeluruh tentang bansos. Jika kita membandingkan dengan jenis bansos yang sudah diterima oleh hampir sebagian responden, yang meliputi PKH, BPNT, Sembako, KIP, semuanya bersumber dari Kementrian, bukan dari desa ataupun provinsi dan kabupaten. Bansos yang berasal dari desa biasanya disalurkan dalam bentuk BLT Dana Desa, sedangkan dari Provinsi dan Kabupaten/Kota bansos yang bersifat insidentil dan bantuan kursi roda. Hanya 2 persen responden yang mendapatkan bantuan ini.

Ketidakhahaman responden dengan jenis dan sumber bansos yang diterima ini menandakan bahwa masih terbatasnya literasi masyarakat tentang bantuan sosial. Responden menyatakan masih sedikitnya sosialisasi bansos yang dilakukan oleh pemerintah, baik dari Dinas Sosial, petugas, atau aparatur desa. Gambaran pendapat ada dan tidaknya sosialisasi yang diterima oleh responden adalah sebagai berikut:

Gambar 3.18 Sosialisasi Bantuan Sosial



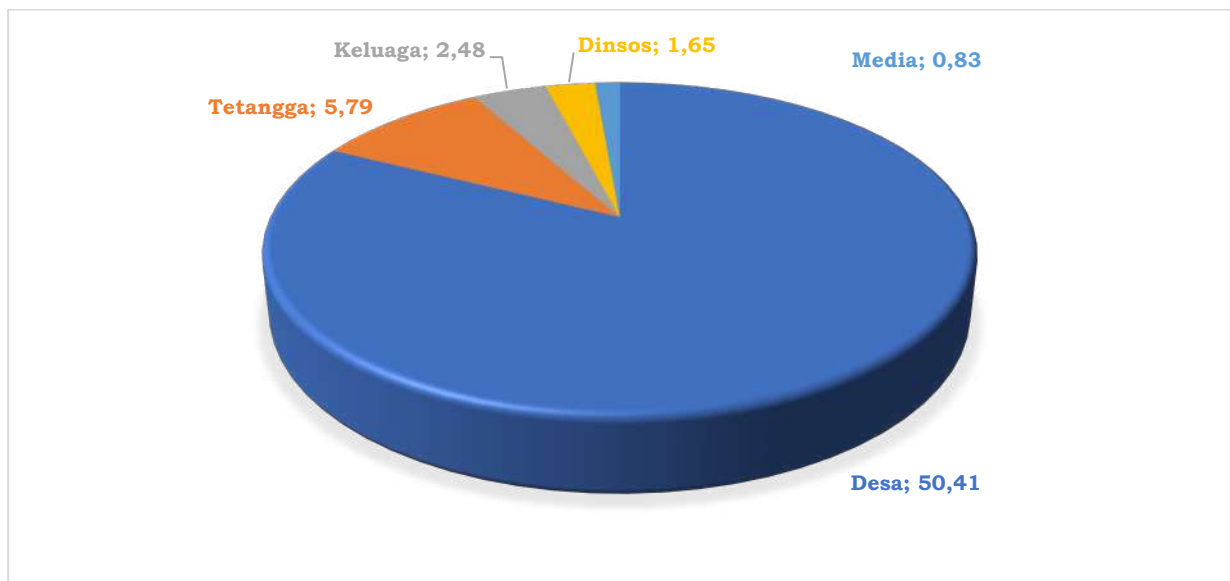
Sumber: Hasil Survei, 2024.

Sebagian besar responden menyatakan bahwa sosialisasi bansos tidak pernah dilakukan (61,16 persen) sehingga masyarakat mempunyai literasi bansos yang rendah dan menjadi persoalan bagi para penerimanya.

Ketidakhahaman dengan bansos mengakibatkan peluang keterikatan penerima bansos secara berterusan sehingga dikhawatirkan masyarakat penerima nyaman dengan bantuan sosial yang selama ini diterima dan sulit untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Masyarakat yang tidak mendapatkan sosialisasi bansos, mendapatkan informasi bansos kebanyakan dari desa (50,41 persen) dengan kualitas informasi yang sangat sedikit. Desa menginformasikan kalau ada bansos disediakan oleh Kementerian Sosial dan menyatakan bahwa beberapa masyarakat bisa mendapatkan bansos jika sudah terdata dalam DTKS. Hampir sebagian besar masyarakat memahami jenis-jenis bansos setelah mendapatkan bansos tersebut dengan informasi sekedarnya.

Gambar 3.19 Sumber Informasi Bansos (Persen)



Sumber: Hasil Survei, 2024.

Dalam mendapatkan bansos, pengetahuan umum yang dimiliki oleh masyarakat adalah menyediakan syarat untuk mendapatkan bansos yaitu memberikan fotocopy KTP dan KK juga surat persetujuan dari keuchik/reje setempat.

3.4.3 Tujuan Program

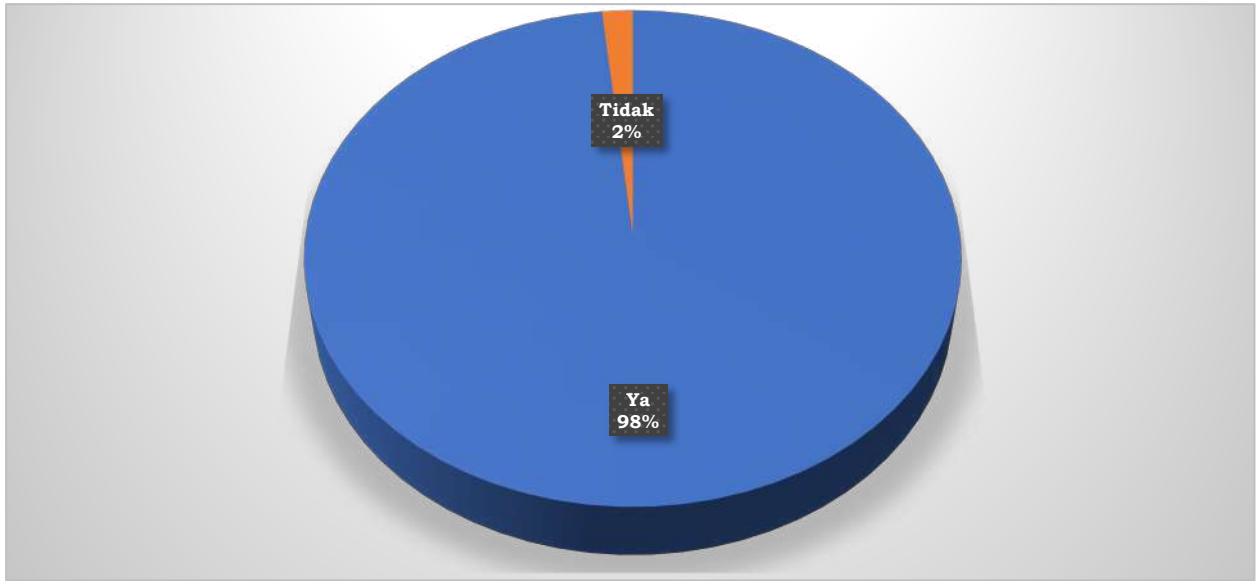
Tujuan program bantuan sosial adalah untuk memberikan gambaran mengenai maksud dan sasaran dari adanya bantuan yang disalurkan kepada masyarakat, terutama kelompok yang rentan dan membutuhkan. Program bantuan sosial bertujuan utama untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memberikan perlindungan bagi masyarakat yang terpinggirkan atau terdampak oleh berbagai kondisi seperti kemiskinan, bencana alam, atau krisis ekonomi.

Tujuan utama dari program bantuan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat yang kurang mampu, dengan memberikan akses terhadap sumber daya dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Melalui bantuan ini, diharapkan dapat membantu masyarakat untuk bertahan dan membaik secara ekonomi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka dan keluar dari kemiskinan.

Secara keseluruhan, program bantuan sosial tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan jangka pendek, tetapi juga sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat, menciptakan kesetaraan sosial, dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan untuk hidup yang layak. Program ini menjadi bagian penting dalam kebijakan pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan, yang dapat berkontribusi pada tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa sebanyak 98 persen responden menyatakan bahwa tujuan bansos dalam meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat tercapai. Hampir semua responden merasa terbantu dengan adanya bansos dalam memenuhi kebutuhan pokok dan biaya pendidikan sekolah anak-anaknya.

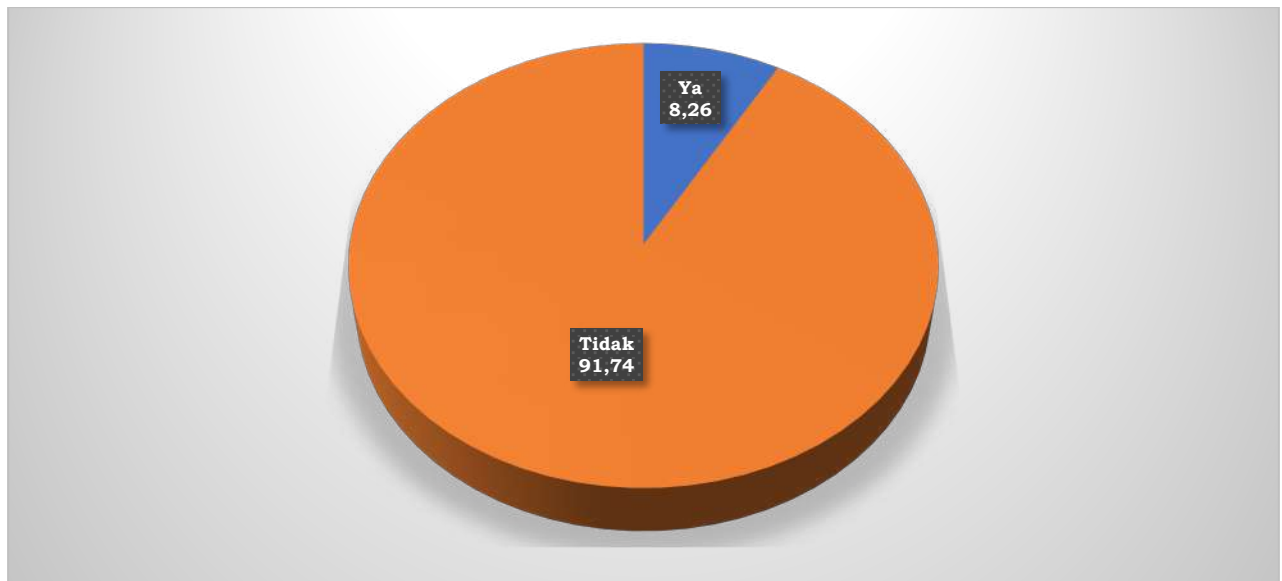
Gambar 3.20 Bansos dan Peningkatan Daya Beli



Sumber: Hasil Survei, 2024

Namun, untuk bisa keluar dari kemiskinan hanya 10 responden (8,26 persen) menjawab bansos bisa mengeluarkan dari kemiskinan melalui peningkatan biaya pendidikan sekolah anak. Sedangkan 111 responden (91,74 persen) lainnya pesimis bisa keluar dari kemiskinan karena jumlah bansos yang diberikan sangat sedikit. Bansos hanya bisa memberikan sedikit ketahanan dalam memenuhi pangan rumah tangga miskin. Namun, untuk keluar dari kemiskinan bukan dari bantuan pangan yang dilakukan melainkan dari program peningkatan pendapatan, salah satunya melalui investasi sumber daya manusia keluarga miskin, melalui akses pendidikan yang tersedia mulai dari ketersediaan fasilitas pendidikan dan kemampuan biaya untuk sekolah. Selain itu, program peningkatan keahlian dalam bentuk program padat karya yang bisa membuka peluang pendapatan keluarga miskin perlu ditambahkan.

Gambar 3.21 Bansos dan Kemiskinan (Persen)



Sumber: Hasil Survei, 2024.

3.4.4 Pemantauan Program

Pemantauan program bantuan sosial adalah bagian penting dalam rangka memastikan bahwa program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga terkait berjalan dengan baik, efisien, dan tepat sasaran. Pemantauan ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program, mengidentifikasi masalah atau hambatan yang mungkin muncul, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

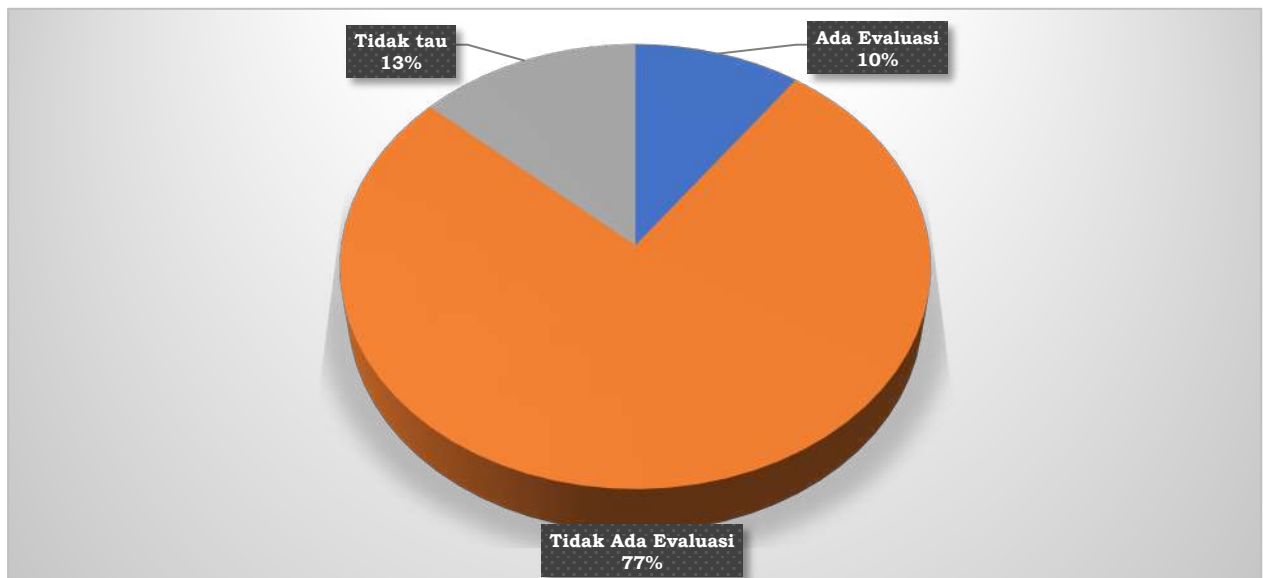
Bantuan sosial sendiri merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk mengurangi ketimpangan sosial, mengatasi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, banyak program bantuan sosial yang melibatkan sejumlah dana yang cukup besar, sehingga pemantauan yang tepat sangat diperlukan agar bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan.

Proses pemantauan ini mencakup berbagai aspek, antara lain, pemeriksaan administrasi, pengawasan distribusi bantuan, serta evaluasi dampak sosial dan ekonomi terhadap penerima manfaat. Selain itu,

pemantauan juga dapat melibatkan partisipasi masyarakat agar masyarakat dapat memberikan umpan balik terkait pelaksanaan program tersebut.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa program bansos hampir tidak pernah dilakukan evaluasi. Sebanyak 77 persen responden menyatakan bahwa program bansos tidak dilakukan evaluasi, hanya 10 persen responden mengatakan ada evaluasi, sedangkan 13 persen tidak tau apakah program bansos ada dilakukan evaluasi atau tidak. Ketiadaan evaluasi menyebabkan peluang perbaikan sebuah program menjadi semakin kecil sehingga dimungkinkan pencapaian tujuan program bisa saja tidak tercapai.

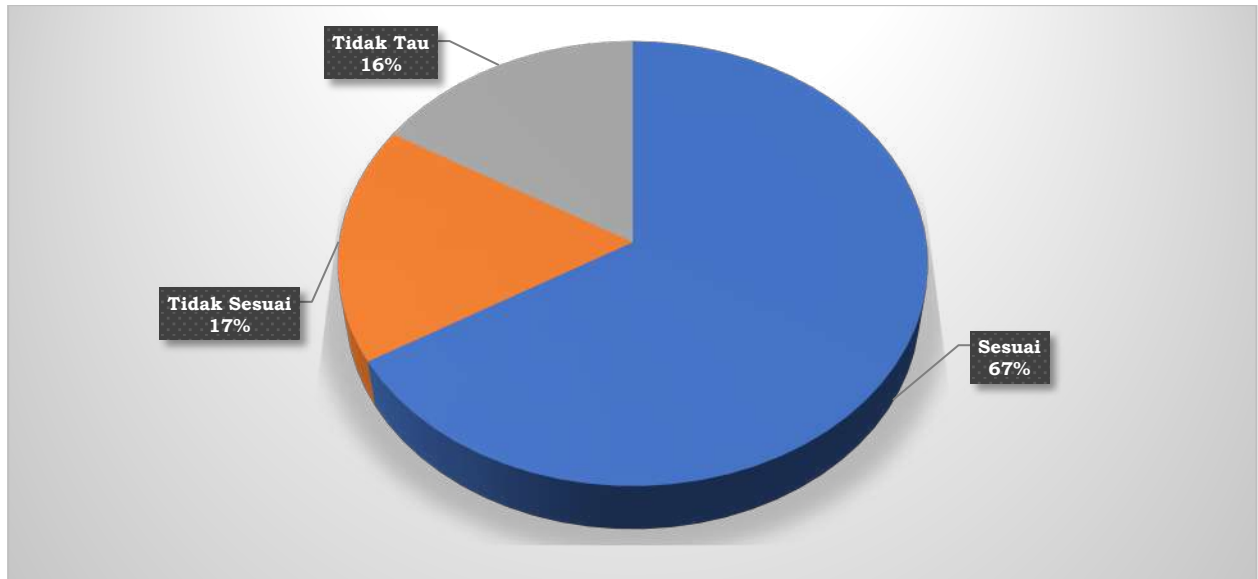
Gambar 3.22 Pengevaluasian Bantuan Sosial



Sumber: Hasil Survei, 2024.

Selanjutnya untuk kesesuaian penyaluran bansos dengan peraturan didapati bahwa 67 persen responden menyatakan bahwa penyaluran bansos sudah sesuai aturan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3.23 Kesesuaian Aturan Penyaluran Bansos



Sumber: Hasil Survei, 2024.

Namun ada 17 persen (21 orang) responden menyatakan bahwa terdapatnya ketidaksesuaian penyaluran bansos dan sebanyak 16 persen (20 orang) responden menyatakan ketidaktahuan antara pelaksanaan distribusi bansos dengan kriteria aturan penyaluran bantuan sosial. Aturan bansos dalam penelitian ini meliputi pengidentifikasian penerima; penerima bansos tepat sasaran; informasi bansos terjangkau; pengaduan bansos tersedia; dan ada tindak lanjut pengaduan bansos. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.9 Kesesuaian Penyaluran Bansos dengan Aturan (Orang)

No	Kriteria	Sudah Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Tau
1	Pengidentifikasian penerima	15	9	17
2	Penerima bansos tepat sasaran	14	18	9
3	Informasi bansos terjangkau	19	10	12
4	Pengaduan bansos tersedia	14	10	17
5	Ada tindak lanjut pengaduan	7	13	21

Sumber: Hasil Survei, 2024.

Responden menilai bahwa untuk kriteria pendidentifikasian penerima sudah sesuai, walaupun masih ada juga yang tidak tau bagaimana pengidentifikasian penerima untuk bansos tersebut. Kemudian untuk

penerima bansos, responden menilai bahwa adanya ketidaksesuaian antara kriteria penerima bansos dengan yang para penerima bansos di desa mereka. Selanjutnya untuk keterjangkauan informasi bansos, responden menilai bahwa mereka bisa mendapatkan akses informasi bansos. Dilanjutkan dengan ketersediaan pengaduan bansos, responden banyak yang tidak tau apakah ada tempat untuk mengadu mengenai penyalahgunaan bansos. Namun disisi lain, responden menjawab tidak ingin juga mengadu apabila ditemukan tidak tempatnya penerima bansos karena tidak ingin adanya konflik. Bansos dipandang sebagai sebuah rezeki jadi tidak ingin mengganggu rezeki orang lain. Terakhir untuk tindak lanjut pengaduan, juga sama dengan kriteria sebelumnya dimana responden tidak tau bagaimana tindak lanjut sebuah pengaduan bansos. Karena tidak pernah disampaikan atau diumumkan untuk penanganan sebuah pengaduan. Responden pun memilih untuk tidak mau mencampuri segala kebijakan bansos yang dilakukan oleh desa.

3.5 Hasil FGD dengan Aparatur Desa

3.5.1 Bantuan Sosial Program Desa

Program bantuan sosial (bansos) dari desa merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk mendukung masyarakat yang membutuhkan, khususnya di tingkat desa, dalam meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial, memberikan bantuan langsung kepada keluarga miskin, dan memastikan bahwa hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan dapat terpenuhi, terutama dalam kondisi ekonomi yang sulit.

Pada umumnya, bansos desa dirancang untuk memberikan bantuan langsung atau sumber daya lainnya kepada warga desa yang memenuhi kriteria tertentu, seperti mereka yang terdampak bencana alam, pengangguran, atau mereka yang berada dalam kategori keluarga miskin. Selain itu, bantuan ini juga mencakup dukungan untuk sektor-sektor penting

lainnya seperti pertanian, perikanan, dan usaha mikro, yang merupakan bagian dari kegiatan ekonomi utama di pedesaan.

Pemerintah desa melalui dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat dan daerah menjadi agen utama dalam pelaksanaan program bansos. Melalui transparansi dan akuntabilitas, diharapkan bahwa distribusi bantuan bisa lebih tepat sasaran dan mengurangi penyalahgunaan dana. Dengan adanya program bantuan sosial ini, diharapkan kesejahteraan sosial di tingkat desa dapat meningkat, dan masyarakat desa bisa lebih mudah bertahan dalam menghadapi tantangan ekonomi, serta mempercepat pembangunan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

Pemanfaatan dana desa dialokasikan untuk bansos desa merupakan bagian dari upaya penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar. Penurunan beban pengeluaran dapat dilakukan dalam 3 (tiga) skema kegiatan yaitu: (1) pemberian bantuan langsung tunai; (2) penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui padat karya tunia desa; atau (3) bantuan social lainnya. Bansos desa dialokasikan bagi masyarakat miskin, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, berupa makanan pokok dan makanan bergizi, vitamin, pakaian layak, dan alat bantu penyandang disabilitas.

Di tingkat desa, selain program bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari dana desa, ada sejumlah kebijakan dan program lain yang dapat diberikan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat ekonomi masyarakat desa. Beberapa kebijakan atau program yang sering dijalankan di tingkat desa untuk penerima bantuan sosial antara lain:

- 1. Program Keluarga Harapan (PKH)** yaitu program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Di desa, penerima PKH biasanya melibatkan keluarga dengan anggota yang masih sekolah atau ibu hamil, serta lansia atau penyandang disabilitas. Desa akan melakukan verifikasi dan pendataan calon penerima, serta memastikan bahwa penerima memenuhi syarat. Penerima PKH harus memenuhi beberapa syarat, seperti anak bersekolah, ibu hamil, atau lansia. Selain itu, penerima juga diwajibkan untuk mengikuti program-program kesehatan dan pendidikan yang ditetapkan.
- 2. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)** yaitu program bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk pangan, berupa kartu yang bisa digunakan untuk membeli bahan pangan tertentu di agen atau e-warung yang telah bekerja sama dengan pemerintah. Program ini biasanya dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan mengidentifikasi warga miskin yang berhak mendapatkan bantuan. Penerima bantuan diberikan kartu BPNT yang dapat digunakan untuk membeli sembako dengan harga yang sudah ditentukan. BPNT bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga miskin dan rentan miskin.
- 3. Program Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Ekonomi** yaitu dana desa juga digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan jangka panjang. Dana desa digunakan untuk pembangunan jalan desa, fasilitas air bersih, pembangunan rumah layak huni, atau pembentukan fasilitas usaha mikro (UMKM). Kebijakan ini tidak langsung memberikan bantuan sosial, tetapi bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, yang pada akhirnya dapat mengurangi angka kemiskinan. Sedangkan untuk sering mengembangkan program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal

usaha untuk UMKM, atau pengembangan produk desa, yang juga dapat dirasakan manfaatnya oleh warga miskin.

- 4. Bantuan Rumah Layak Huni (BSR)** yaitu bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin atau yang tinggal di rumah tidak layak huni untuk memperbaiki tempat tinggal mereka. Ini dapat meliputi perbaikan atap, dinding, atau fasilitas dasar seperti jamban dan air bersih. Pemerintah desa bekerja sama dengan pemerintah daerah atau melalui dana desa untuk mendata warga yang membutuhkan perbaikan rumah. Proses ini juga melibatkan partisipasi warga dalam perbaikan rumah mereka.
- 5. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)** yaitu program yang bertujuan untuk memberikan akses layanan kesehatan bagi keluarga miskin melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Di tingkat desa, program ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa keluarga miskin terdaftar dan memperoleh layanan kesehatan secara gratis atau dengan biaya rendah. Desa memiliki tugas untuk melakukan pendataan dan memastikan bahwa warga miskin atau yang membutuhkan terdaftar dalam program JKN. Selain itu, desa juga sering menyelenggarakan sosialisasi mengenai pentingnya jaminan kesehatan.
- 6. Program Padat Karya Tunai (PKT)** yaitu program ini melibatkan warga desa dalam pekerjaan fisik atau pembangunan infrastruktur yang dibiayai dengan dana desa, dengan imbalan tunai. Program ini sering digunakan untuk memberikan kesempatan kerja bagi warga desa yang menganggur. Warga yang bekerja dalam program ini akan dibayar sesuai dengan jam kerja mereka, dan uang yang diterima dapat membantu meningkatkan ekonomi keluarga. Selain menciptakan lapangan pekerjaan, program ini juga mendukung pembangunan infrastruktur desa yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
- 7. Bantuan Modal Usaha untuk UMKM Desa** yaitu program desa yang mengimplementasikan kebijakan bantuan modal usaha untuk warga yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bantuan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pemerintah desa dapat mengalokasikan dana desa untuk memberikan bantuan

modal usaha kepada warga yang ingin mengembangkan usaha mereka. Biasanya bantuan ini disertai dengan pelatihan atau pendampingan usaha.

- 8. Program Pendidikan dan Pelatihan** yaitu program dalam bentuk pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di desa. Ini dapat mencakup pelatihan keterampilan kerja, pelatihan pertanian, pelatihan usaha, hingga pendidikan nonformal. Pelatihan ini dapat diselenggarakan oleh pemerintah desa bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan, untuk meningkatkan keterampilan warga yang kurang mampu atau yang membutuhkan pekerjaan.
- 9. Bantuan Subsidi Biaya Pendidikan dan Beasiswa** yaitu bantuan pendidikan atau beasiswa diberikan kepada siswa yang kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Di beberapa desa, terdapat kebijakan bantuan pendidikan yang disalurkan melalui dana desa atau sumber lain. Pemerintah desa dapat memberikan bantuan kepada siswa yang berprestasi namun berasal dari keluarga miskin untuk membayar biaya pendidikan atau kebutuhan sekolah lainnya.
- 10. Program Perlindungan Sosial Lainnya** yaitu program-program selain yang telah disebutkan sebelumnya. Desa juga dapat menyelenggarakan program perlindungan sosial lain seperti bantuan untuk penyandang disabilitas, ibu hamil, atau lanjut usia. Desa melakukan pendataan dan verifikasi untuk memberikan bantuan khusus bagi warga yang memerlukan perhatian lebih, seperti bantuan alat bantu hidup, bantuan kesehatan, atau bantuan perawatan bagi lansia dan penyandang disabilitas.

Di tingkat desa, selain bansos dari dana desa, ada berbagai kebijakan dan program yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat. Program-program tersebut berfokus pada pemberian bantuan langsung maupun peningkatan kapasitas dan pemberdayaan ekonomi warga desa. Keberhasilan

kebijakan ini bergantung pada proses pendataan yang akurat, transparansi dalam penyaluran bantuan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam setiap program.

3.5.2 Sistem Pendistribusian

Sistem pendistribusian bantuan sosial (bansos) dari desa dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur untuk memastikan bantuan sampai kepada warga yang berhak. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam sistem pendistribusian bansos di tingkat desa:

1. **Perencanaan dan Penentuan Sasaran**, dimulai dengan (1) Identifikasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM): dimana setiap tahun, pemerintah desa melakukan pendataan untuk mengidentifikasi keluarga yang membutuhkan bantuan. Pendataan ini bisa dilakukan melalui musyawarah desa atau dengan menggunakan data yang sudah ada dari pemerintah, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Selanjutnya (2) Penentuan Kriteria Penerima Bantuan dimana pemerintah desa menentukan kriteria penerima bantuan yang umumnya meliputi warga yang berada dalam kategori miskin, rentan miskin, atau terdampak oleh bencana atau kondisi tertentu seperti pengangguran. Kriteria ini juga dapat mencakup sektor seperti pertanian, pendidikan, dan kesehatan.
2. **Pengalokasian Dana dan Anggaran**, dimulai dengan penentuan sumber Dana dimana untuk program bantuan sosial biasanya berasal dari dana desa yang dialokasikan setiap tahun oleh pemerintah pusat, serta anggaran daerah dan bantuan sosial lainnya. Anggaran ini harus disusun secara transparan dan diprioritaskan untuk warga yang membutuhkan. Selanjutnya pemerintah desa merencanakan anggaran untuk bansos ini dalam RAPBDes yang harus disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat.

3. **Penyaluran Bantuan**, dimulai dengan penyusunan mekanisme penyaluran dimana bantuan dapat disalurkan dalam berbagai bentuk, seperti uang tunai, bahan pokok, atau bantuan langsung lainnya. Untuk penyaluran uang tunai, pemerintah desa dapat bekerja sama dengan bank atau lembaga keuangan untuk mendistribusikan melalui rekening bank atau sistem tunai. Beberapa daerah menerapkan sistem elektronik dalam pendistribusian bantuan sosial untuk mengurangi potensi penyalahgunaan. Contohnya, penggunaan aplikasi atau sistem pembayaran elektronik yang memungkinkan warga untuk menerima bantuan dengan lebih transparan dan efisien.
4. **Penerimaan Bantuan oleh Warga**, dimulai dengan proses penyerahan bantuan setelah dana atau barang siap, pemerintah desa mengadakan acara penyerahan bansos kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Biasanya, penerima bansos harus menunjukkan identitas diri dan memenuhi persyaratan tertentu sebelum menerima bantuan. Semua proses penyaluran bantuan dicatat dengan baik dalam laporan administrasi desa untuk memastikan bahwa distribusi dilakukan secara adil dan tepat sasaran.
5. **Pemantauan dan Evaluasi**, dimulai dengan pemantauan dimana pemerintah desa melakukan pemantauan terhadap proses penyaluran bantuan untuk memastikan bahwa tidak ada penyelewengan atau penyalahgunaan dana. Ini dapat melibatkan laporan dari masyarakat atau audit internal. Selanjutnya dilakukan evaluasi dampak setelah bansos diberikan. Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur dampak dari bantuan yang diberikan, apakah tepat sasaran, dan apakah bantuan tersebut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.
6. **Transparansi dan Akuntabilitas**, dimulai dengan publikasi informasi dimana agar sistem pendistribusian bansos dapat dipertanggungjawabkan, pemerintah desa biasanya mempublikasikan daftar penerima bantuan melalui papan pengumuman atau melalui media sosial desa. Ini membantu mencegah penyalahgunaan dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan. Selanjutnya

pemerintah desa juga menyusun laporan tahunan mengenai penggunaan dana bansos yang dapat diakses oleh masyarakat dan lembaga terkait, untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi.

Dengan sistem yang terstruktur dan transparan ini, sistem pendistribusian bantuan sosial yang dilakukan diharapkan dapat diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan, serta mendukung pemerataan pembangunan dan kesejahteraan sosial di desa. Dari hasil wawancara dengan aparatur desa diketahui bahwa seluruh desa yang menjadi target responden melakukan pendistribusian bansos langsung dengan memberikan uang tunai kepada masyarakat yang terpilih menerima bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa.

3.5.3 Verifikasi Penerima Manfaat (*beneficiaries*) Bantuan Sosial

Verifikasi penerima manfaat (Keluarga Penerima Manfaat atau KPM) dalam program bantuan sosial (bansos) dari dana desa merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Proses verifikasi ini melibatkan beberapa langkah yang terstruktur agar bantuan tepat sasaran dan menghindari potensi penyalahgunaan. Berikut adalah tahapan umum dalam verifikasi penerima manfaat bansos dari dana desa:

- 1. Pendataan Awal**, dimulai dengan pemutakhiran data dimana Pemerintah desa melakukan pemutakhiran data setiap tahun untuk memastikan daftar penerima bantuan sesuai dengan kondisi terkini. Pendataan ini bisa dilakukan melalui musyawarah desa, survei lapangan, atau penggunaan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Selain DTKS, pemerintah desa juga bisa menggunakan data lain, seperti data kemiskinan yang berasal dari program-program sosial sebelumnya atau data lainnya yang relevan.

2. Penetapan Kriteria Penerima Bantuan, dimulai dengan penetapan Kriteria Umum dimana Pemerintah desa menentukan kriteria penerima bantuan, yang biasanya mencakup keluarga yang masuk dalam kategori miskin atau rentan miskin. Kriteria ini bisa meliputi:

- Kondisi ekonomi (pendapatan rendah, tidak memiliki pekerjaan tetap, atau usaha yang terganggu).
- Kondisi sosial (keterbatasan fisik atau mental), seperti lansia, cacat fisik permanen, dan sakit permanen baik fisik atau mental.
- Faktor lainnya, seperti rumah tidak layak huni atau terdampak bencana alam.

Pemerintah desa perlu memberikan prioritas kepada keluarga yang sangat membutuhkan, seperti ibu hamil, lansia, anak-anak, atau warga yang kehilangan pekerjaan akibat bencana atau kondisi ekonomi.

3. Verifikasi Lapangan, dimulai dengan survei atau kunjungan ke rumah dimana pemerintah desa atau petugas verifikasi akan melakukan survei atau kunjungan langsung ke rumah calon penerima manfaat untuk memverifikasi kondisi sosial dan ekonomi mereka. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diberikan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Petugas melakukan wawancara dengan kepala keluarga atau anggota keluarga untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kondisi ekonomi dan sosial mereka. Hasil wawancara ini akan menjadi dasar keputusan dalam menentukan kelayakan menerima bantuan. Beberapa dokumen seperti Kartu Keluarga (KK), KTP, surat keterangan miskin dari RT/RW, atau bukti lainnya akan dikumpulkan untuk mendukung proses verifikasi.

4. Musyawarah Desa, dimulai dengan proses musyawarah dimana setelah verifikasi lapangan, hasil pendataan dan verifikasi akan dibawa ke musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan warga. Dalam musyawarah

ini, daftar calon penerima manfaat akan dibahas untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Musyawarah desa juga bertujuan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan atau protes jika ada penerima yang dirasa tidak memenuhi syarat.

5. Penyusunan Daftar Penerima Bantuan, dimulai dengan finalisasi daftar penerima dimana setelah musyawarah desa, daftar penerima manfaat akan disusun secara final. Daftar ini harus mencakup informasi lengkap tentang identitas penerima bantuan dan jenis bantuan yang diterima. Pemerintah desa mempublikasikan daftar penerima bantuan kepada masyarakat melalui papan pengumuman atau media sosial desa untuk memastikan bahwa semua pihak mengetahui siapa saja yang menerima bantuan. Ini membantu mengurangi kemungkinan penyalahgunaan dan meningkatkan transparansi.

6. Pencairan dan Penyaluran Bantuan, dimulai dengan proses penyaluran dimana setelah verifikasi selesai, bantuan akan disalurkan kepada penerima manfaat sesuai dengan bentuk bantuan yang telah ditentukan (bantuan uang tunai, sembako, atau lainnya). Pemerintah desa akan memanfaatkan sistem yang sudah ada (seperti rekening bank, tunai, atau mekanisme lainnya) untuk menyalurkan bantuan ini. Penerima bantuan harus menunjukkan identitas diri mereka dan mengkonfirmasi penerimaan bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Pemantauan dan Evaluasi, dimulai dengan pemantauan dimana proses distribusi bantuan akan dipantau oleh pemerintah desa dan lembaga terkait untuk memastikan bantuan diterima oleh yang berhak. Hal ini juga termasuk memeriksa apakah ada potensi penyalahgunaan dalam proses distribusi. Setelah distribusi dilakukan, pemerintah desa melakukan evaluasi untuk menilai dampak bantuan sosial terhadap kesejahteraan penerima manfaat dan apakah bantuan tersebut berhasil mengurangi angka kemiskinan di desa tersebut.

8. Penyusunan Laporan dan Akuntabilitas, dimulai dengan Laporan Keuangan dimana pemerintah desa menyusun laporan keuangan yang rinci

mengenai penggunaan dana desa untuk bansos, yang akan diaudit oleh pihak yang berwenang. Laporan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan sosial disalurkan dengan benar dan akuntabel. Hasil penggunaan dana bansos dan evaluasi dampaknya juga harus dilaporkan kepada masyarakat agar program ini tetap transparan dan dapat dipercaya oleh warga desa.

Dari hasil penelitian, berdasarkan wawancara dengan keuchik dan aparat desa juga ditemukan bahwa bansos dari dana desa diprioritaskan kepada lansia, cacat fisik dan mental yang tidak masuk dalam DTKS. Dengan prioritas ini, diharapkan bantuan sosial dari dana desa selalu akan tepat sasaran dan efektif dalam membantu warga yang membutuhkan.

3.5.4 Dana Desa untuk Program Bansos

Alokasi dana desa yang layak untuk bantuan sosial (bansos) di Indonesia bergantung pada beberapa faktor, seperti kebutuhan masyarakat, jumlah penduduk miskin, dan skala program yang direncanakan. Meskipun tidak ada angka tetap yang secara resmi ditetapkan untuk bansos dari dana desa, ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam menentukan alokasi dana desa untuk bantuan sosial:

1. Anggaran Dana Desa

Dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2024, alokasi dana desa untuk seluruh Indonesia mencapai lebih dari Rp 70 triliun. Besaran dana desa yang diterima oleh masing-masing desa bervariasi, tergantung pada beberapa faktor, seperti jumlah penduduk, indeks kemajuan desa, dan tingkat kemiskinan desa. Setiap desa akan menerima alokasi yang berbeda, yang berkisar antara ratusan juta hingga miliaran rupiah per tahun.

2. Alokasi Dana Desa untuk Bantuan Sosial

Penggunaan dana desa ditujukan untuk berbagai tujuan, termasuk, pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan ekonomi desa, bantuan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan. Berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan (PMK) tentang pengelolaan dana desa, setidaknya 30% dari alokasi dana desa dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, yang termasuk di dalamnya segala bentuk bantuan untuk pengurangan pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Salah satu program pengurangan pengeluaran adalah dalam bentuk bantuan sosial kepada warga miskin, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Hal ini untuk memberikan program ketahanan kepada masyarakat miskin. Selain itu, dana desa juga bisa dialokasikan untuk program peningkatan pendapatan dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan terutama untuk masyarakat miskin. Sebagian besar dana desa bisa difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi. Hal ini sesuai dengan kebutuhan yang teridentifikasi dalam musyawarah desa.

3. Pengalokasian Berdasarkan Kebutuhan

Alokasi dana desa untuk bansos dapat dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM): Berdasarkan data kemiskinan dan hasil musyawarah desa, desa akan menentukan jumlah keluarga miskin yang memerlukan bantuan sosial.
- Tingkat Kemiskinan di Desa: Desa yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi akan mengalokasikan lebih banyak dana untuk membantu warganya melalui bantuan sosial.
- Prioritas Bantuan Sosial: Desa juga harus memprioritaskan bantuan sosial untuk kelompok rentan seperti ibu hamil, anak balita, lansia, dan penyandang disabilitas, yang membutuhkan perhatian khusus.

4. Tata Kelola dan Transparansi

Alokasi dana desa untuk bantuan sosial harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Dalam musyawarah desa, masyarakat dapat memberikan masukan terkait prioritas bantuan sosial, dan desa harus memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Misalnya, sebuah desa dengan jumlah penduduk sekitar 1.000 jiwa dan tingkat kemiskinan yang tinggi (misalnya 30%) dapat mengalokasikan dana

desa untuk bantuan pangan dan tunai dimana sejumlah keluarga miskin dapat diberikan bantuan pangan dan tunai, yang alokasinya bergantung pada harga sembako dan jumlah keluarga yang berhak. Selanjutnya bantuan untuk anak-anak dan ibu hamil dapat diberikan bantuan kesehatan atau pendidikan. Sangat penting juga bantuan untuk masyarakat yang produktif dalam bentuk

5. Pentingnya Proses Verifikasi dan Musyawarah Desa

Alokasi dana desa untuk bansos tidak hanya bergantung pada anggaran, tetapi juga pada hasil verifikasi dan pendataan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Musyawarah desa merupakan proses penting untuk menentukan besaran dan jenis bantuan sosial yang akan disalurkan kepada masyarakat, serta untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Sebagai kesimpulan, tidak ada angka tetap yang ditetapkan untuk alokasi dana desa bagi bantuan sosial karena setiap desa memiliki kebutuhan yang berbeda. Namun, umumnya sekitar 30% dari dana desa dapat dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat, termasuk bantuan sosial. Alokasi dana untuk bansos harus disesuaikan dengan jumlah keluarga miskin, tingkat kemiskinan, dan prioritas yang ditetapkan dalam musyawarah desa. Pengelolaan dana desa harus transparan dan tepat sasaran agar bantuan sosial dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

3.6 Hasil FGD dengan OPD Terkait

3.6.1 Dinas Sosial

Dinas Sosial adalah perangkat daerah yang secara umum memiliki tugas pokok kewajiban pemerintah dalam bidang kesejahteraan sosial antara lain, rehabilitasi sosial; jaminan sosial; pemberdayaan sosial; perlindungan sosial dan penanganan fakir miskin. Dapat dikatakan bahwa Dinas Sosial memiliki tugas untuk memfasilitasi pelaksanaan bantuan sosial baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Shafira dkk (2022) menyatakan Dinas Sosial merupakan sebuah unit pemerintahan

di bidang sosial yang mengurus suatu kegiatan profesional untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat guna meningkatkan dan memperbaiki serta menciptakan kondisi masyarakat yang jauh lebih baik. Dinas Sosial juga memiliki peranan untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Dinas Sosial selaku lembaga sosial memiliki tugas sebagai fasilitator yang memberikan layanan serta fasilitas yang baik kepada masyarakat.

Tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten/Kota di Aceh relatif sama dengan kewajiban yang diemban Dinas Sosial Provinsi Aceh yaitu melaksanakan tugas umum Pemerintah Aceh di bidang kesejahteraan, pemberdayaan, bantuan dan rehabilitasi sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dinas Sosial di Tingkat Kabupaten/kota memiliki peran strategis dalam pelaksanaan program bantuan sosial baik program pemerintah pusat maupun program daerah yang dibiayai melalui anggaran daerah. saat ini Dinas Sosial berperan aktif dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), mengelola data PBI-JK yang terkait erat pelaksanaan jaminan Kesehatan universal dengan BPJS Kesehatan.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu program perlindungan sosial yang diterapkan di Indonesia dengan tujuan membantu keluarga miskin untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pelaksanaannya, PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat dimana ada mekanisme yang harus dilalui agar calon penerima bantuan mendapatkan bantuan PKH. Mekanisme PKH dimulai dari perencanaan, penetapan calon peserta PKH, validasi data calon penerima manfaat PKH, penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, penyaluran bantuan sosial PKH, pendampingan PKH, peningkatan kemampuan keluarga, verifikasi komitmen KPM PKH, pemutakhiran data KPM PKH dan transformasi kepesertaan PKH.

Program BPNT merupakan transformasi dari program Bantuan Beras Keluarga Sejahtera. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Berbeda dengan program sebelumnya yang memberikan beras secara langsung, BPNT menyalurkan bantuan dalam bentuk uang elektronik melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dengan bantuan ini, penerima dapat membeli kebutuhan pokok di agen atau warung yang bekerja sama dengan Bank Himbara (Badan Usaha Milik Negara). Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat miskin mendapatkan akses pangan yang layak.

Dalam Pelaksanaan program bansos, Dinas Sosial dibantu oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di setiap kecamatan. Petugas TKSK merupakan penyelenggara kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan. Petugas TKSK berkewajiban berkoordinasi, memfasilitasi serta mengadministrasikan program bansos. Peran optimal TKSK dalam memberikan pemahaman dan informasi bansos menjadi kunci Kesesuaian sasaran program dan pada akhirnya dapat membawa masyarakat keluar dari kemiskinan.

Dari 6 (enam) kabupaten yang menjadi wilayah penelitian, ditemukan bahwa ke enam daerah tersebut tidak memiliki program bantuan sosial reguler yang menyerupai bantuan sosial yang dilaksanakan pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga tidak memiliki program untuk memperluas jangkauan bansos, melengkapi program pemerintah pusat serta menambah nilai bantuan sosial. Dengan kata lain, program bantuan sosial yang selama ini berjalan adalah program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Saat ini pemda memiliki program bansos insidentil yang dijalankan setiap tahun. Bansos insidentil disalurkan dalam berbagai bentuk seperti pemberian bantuan alat bantu kepada kelompok Disabilitas berupa kursi roda dan tongkat; bantuan tanggap darurat bencana; usaha ekonomi

produktif bagi masyarakat yang terdaftar dalam DTKS; dan bantuan kebutuhan masyarakat yang bersumber dari alokasi dana pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dewan. Keterbatasan anggaran membuat pemda tidak bisa menjalankan program bansos reguler yang bersumber dari APBD. Intervensi pengurangan kemiskinan di daerah masih mengandalkan program bansos pemerintah pusat yang terfokus untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk miskin.

Penyaluran bansos usaha ekonomi produktif dilakukan jamak dilakukan pada semester kedua tahun berjalan. Nilai bantuan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan jumlah proposal usaha yang diajukan masyarakat. Hal ini membuat seringkali jumlah bantuan usaha yang diterima tidak sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan masyarakat. Lebih lanjut, umumnya bantuan ekonomi produktif tanpa disertai dengan kegiatan pengawasan, pendampingan ataupun pelatihan bagi calon penerima manfaat. Walau para calon penerima minimal sudah memiliki embrio usaha, namun jumlah bantuan yang kurang memadai dan tanpa adanya peningkatan kemampuan usaha membuat embrio usaha sulit berkembang. Apalagi tanpa adanya evaluasi terhadap bantuan yang diberikan membuat pemerintah tidak memiliki informasi yang solid mengenai keberhasilan ataupun kegagalan dari bantuan usaha yang tersebut.

Khusus untuk bantuan yang berasal dari pokir anggota dewan, para penerima manfaat tidak sepenuhnya merupakan rumah tangga yang berada pada desil 1 dan 2. Irisan kepentingan politik dalam menjaga kesolidan dukungan suara serta memenuhi janji dan kebutuhan para pemilihnya membuat bansos pokir terkadang sampai pada rumah tangga yang berada pada desil 3 dan 4. Penyaluran bansos pokir disesuaikan dengan beberapa momen penting seperti menjelang bulan Ramadhan, lebaran Idul Fitri dan lebaran Idul adha. Bentuk barang yang disalurkan disesuaikan dengan kebutuhan menjelang perayaan hari besar seperti beras, gula, sirup dan kain sarung.

Tiadaanya program bansos reguler yang dijalankan oleh pemda serta sasaran bantuan insidental yang tidak fokus pada rumah tangga miskin yang berada di desil 1 dan 2 membuat pengeluaran bansos daerah tidak mampu memberikan dampak signifikan dalam pengentasan kemiskinan. selain itu, minimnya pendampingan bagi KPM penerima bantuan modal usaha menbiat Dinas Sosial tidak memiliki informasi yang memadai mengenai keberhasilan atau kegagalan usaha dari KPM modal usaha. Hal ini menambah permasalahan yang menghambat efektivitas program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

Selain menjaga daya beli, pemerintah pusat juga berupaya untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin. Salah satu dengan meluncurkan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA). Program PENA adalah kegiatan membangun jiwa kewirausahaan, meningkatkan kemampuan berwirausaha keluarga miskin, kelompok rentan, kelompok terpencil, dan/atau korban bencana. Melalui Program ini, diharapkan KPM bisa memiliki usaha yang berkelanjutan sehingga mengurangi ketergantungan terhadap bansos. Pada akhirnya kesejahteraan KMP dapat tercapai dan memiliki kemampuan sosial ekonomi yang mandiri.

KPM yang menjadi sasaran program PENA adalah KPM yang memiliki kriteria tertentu seperti kesiapan untuk Berdikari dan suatu saat dapat terlepas dari ketergantungan terhadap program bansos; mempunya embrio usaha yang berpotensi untuk berkembang; KPM memiliki keinginan dan semangat untuk meningkatkan kesejahteraan; dan memenuhi berbagai kriterian lain yang ditetapkan oleh Kementerian social. Mekanisme PENA dilaksanakan dalam 5 (lima) tahapan yaitu asesmen KPM untuk menilai kelakan KPM menjalajnkkan program PENA; penyusunan proposal oleh KPM dan didampingi oleh tenaga yang disiapkan oleh kemensos; penetapan KPM, pelaksanaan program PENA serta pemantauan dan evaluasi kemajuan program. Kepada KPM yang memenuhi persyaratan akan diberikan bantuan

dalam beberapa bentuk seperti bantuan usaha, pelatihan dan/atau pendampingan.

Walau merupakan program yang cukup baik dan mumpuni dalam mengangkat kesejahteraan KPM, namun program PENA di wilayah penelitian tidak berjalan sesuai harapan. Jumlah KPM program PENA amat minim. Dari 6 (enam) daerah, hanya Kabupaten Bireuen, Pidie Jaya dan Bener Meriah yang ada KPM program PENA. KMP PENA di Pidie Jaya sebanyak 18 keluarga sedangkan di Bener Meriah ada 2 KPM. Perkembangan usaha KPM PENA di Bireuen cukup baik dimana beberapa KPM yang awalnya hanya mampu memproduksi 1 (satu) jenis barang, setelah mendapatkan pendampingan telah mampu meningkatkan ragam dan produk dagangannya. Saat ini Dinas Sosial Bireuen masih melakukan pendampingan dan evaluasi keberhasilan usaha dari para KPM tersebut. Salah satu kendala yang cukup menghambat perkembangan usaha KPM adalah Lokasi usaha yang terletak cukup jauh dari pusat kegiatan Kabupaten Bireuen.

Sementara itu, tidak ada KPM PENA di kabupaten lainnya. Para keluarga miskin enggan mengajukan diri sebagai calon penerima KPM karena khawatir akan kehilangan bansos regular. Masyarakat KPM bansos regular masih mengharapkan bansos secara berkelanjutan, sementara jika mereka ikut program PENA maka hanya akan mendapatkan bansos PENA sekali saja. Hal ini mengindikasikan adanya ketergantungan KPM terhadap bansos yang diterima selama ini.

3.6.2 Baitul Mal

Baitul Mal merupakan salah satu lembaga yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Aceh dalam bidang agama Islam. Baitul Mal dibentuk dan berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya (ZiWaH), serta pengawasana perwalian berdasarkan Syariat Islam di Aceh.

Untuk menjalankan fungsinya tersebut dengan baik maka Baitul mal harus bersifat independen dan terbebas dari pengaruh pihak manapun.

Dana umat dalam Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) yang dikelola oleh Baitul Mal umumnya bersumber dari belanja pemerintah daerah maupun lembaga vertical yang bersifat sukarela. Dana ZIS yang bersumber dari belanja pemerintah Provinsi Aceh dikumpulkan dan disalurkan oleh Baitul Mal Aceh sedangkan dana ZIS dari belanja pemerintah kabupaten/kota dikelola oleh Baitul Mal kabupaten/kota masing-masing. Sementara peran swasta dan individu belum begitu signifikan bagi penerimaan ZISWAF Aceh.

Dalam penyaluran dana zakat, Baitul Mal Aceh dan Kabupaten/Kota memiliki program/kegiatan yang sama namun sumber dana ZIS yang berbeda. Program/kegiatan zakat disusun berdasarkan asnaf/senif zakat, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Untuk dana infaq yang terkumpul, Baitul Mal menyalurkan pada beberapa program/kegiatan seperti

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2. Investasi.
3. Penyertaan modal.
4. Kemaslahatan umat.
5. Biaya operasional.

Penyaluran dana ZISWAF kepada penerima manfaat di daerah penelitian memiliki perbedaan yang cukup besar. Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah mengutamakan calon penerima bantuan dari kelompok masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan sosial yang disalurkan melalui Dinas Sosial. Sementara di daerah lain, belum ada upaya untuk memeriksa atau memastikan irisan penerima bantuan dari Baitul Mal dan Dinas Sosial. Hal ini menjadi pertanda walau pemanfaatan dana ZISWAF diyakini telah tersalur pada pihak yang berhak menerima, namun kontribusi

langsung untuk mengurangi ketergantungan rumah tangga penerima bansos menjadi kurang terukur.

Terlepas dari sulitnya mengukur dampak langsung Baitul Mal dalam mengurangi ketergantungan keluarga penerima manfaat (KPM) bansos, Baitul Mal berusaha agar bantuan yang diberikan memiliki dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, Baitul Mal berusaha mendistribusikan dana ZIS sesuai peruntukan dan menjangkau para penerima manfaat lebih banyak. Oleh sebab itu Baitul Mal berkewajiban untuk mengelola dana ZIS secara transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, ZIS dimasukkan dalam golongan penerimaan pendapatan asli daerah sehingga administrasi keuangan dana ZIS mengikuti aturan keuangan yang berlaku.

Masuknya dana ZIS dalam bagian PAD memunculkan beberapa implikasi. Sebagai bagian dari PAD, maka jumlah dana ZIS yang terkumpul menjadi target yang harus direalisasikan oleh daerah. Untuk mencapai target tersebut, pemda menetapkan aturan yang mewajibkan setiap belanja daerah yang bersumber dari APBK harus membayar infaq kepada Baitul Mal. Pembayaran infaq dari proyek yang dibiayai APBK masih menjadi sumber utama yang sangat dominan dari jumlah dana ZIS yang terkumpul. Baitul Mal juga menerima pembayaran ZIS dari perusahaan swasta dan perseorangan, namun jumlahnya sangat sedikit. Hal ini dikarenakan pihak non pemerintah lebih memilih untuk menyalurkan ZIS langsung kepada para mustahiq.

Untuk penyaluran bantuan, Baitul Mal juga mengikuti aturan yang berlaku. Diantaranya dengan menetapkan target jumlah calon mustahiq dan target jumlah dana yang akan disalurkan. Target tersebut menjadi arah sekaligus indikator kinerja Baitul Mal. Penyaluran bantuan menggunakan metode transfer langsung dari rekening pemerintah kepada rekening mustahiq. Untuk penyaluran bantuan modal usaha dilakukan dengan menyediakan barang-barang yang dibutuhkan baik sebagai modal usaha

maupun dalam bentuk barang jualan. Baitul Mal berusaha keras untuk tidak menyalurkan bantuan modal usaha dalam bentuk dana kontan guna menghindari potensi penyelewengan bantuan.

Walau pengelolaan dana ZIS sudah cukup baik, terdapat kendala yang cukup mengganggu kebermanfaatan dari dana tersebut. Selayaknya anggaran pemerintah, penyaluran bantuan dana ZIS harus melalui proses amprahan yang membutuhkan waktu hingga beberapa hari. Hal ini membuat pemanfaatan dana ZIS untuk orang yang sangat membutuhkan bantuan dana kontan menjadi berkurang. Contoh yang menjadi bukti hambatan terjadi pada keluarga pasien yang membutuhkan perawatan dan dirujuk ke Banda Aceh. Keputusan rumah sakit daerah merujuk pasien dapat keluar kapan saja. Baitul Mal menyediakan dana untuk membantu biaya pendamping pasien. Namun, tidak semua pasien bersedia dirujuk untuk berobat ke Banda Aceh karena terkendala dana. Hal ini menjadi potensi memburuknya kondisi pasien karena tidak mendapatkan perawatan yang sesuai. Idealnya dana ZIS untuk pasien atau pendamping pasien dapat dicairkan kapan saja segera setelah surat rujukan diterbitkan oleh rumah sakit daerah.

Selain kondisi di atas, pengelolaan dana ZIS sudah cukup baik. Seperti yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah. Di Aceh Tengah, penyaluran zakat diutamakan untuk asnaf fakir dan miskin. Saat ini penerima zakat dari asnaf fakir uzur sebanyak 300 jiwa dengan nilai zakat sebesar Rp. 500.000/jiwa/tahun. Asnaf miskin saat ini sebanyak 300 jiwa dan berpotensi akan bertambah karena jumlah calon mustahiq yang diusulkan oleh Baitul Mal gampong sudah mencapai sekitar 1.000 jiwa. Besaran zakat yang diterima oleh asnaf miskin juga sebesar Rp. 500.000/jiwa/tahun.

Bagi siswa yang tergolong miskin, Baitul Mal menyalurkan dana ZIS kepada 100 siswa pada setiap jenjang pendidikan dengan besaran dana yang berbeda. Bagi siswa SD/MI mendapat Rp. 500.000/orang/tahun, Siswa

SMP/MTs mendapatkan bantuan pendidikan sebesar Rp. 750.000/orang/tahun dan untuk jenjang SMA/MA sebesar Rp.1.000.000/orang/tahun.

Baitul Mal juga memberikan bantuan pendidikan bagi warga Kabupaten Aceh Tengah yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tinggi. Bagi mahasiswa yang kuliah di Aceh Tengah, akan mendapatkan bantuan penulisan skripsi sebesar Rp. 3.000.000/mahasiswa. Bagi penduduk Aceh Tengah yang melanjutkan pendidikan di luar Kabupaten, masuk dalam asnaf Ibnu Sabil dan mendapatkan bantuan berbeda berdasarkan jenjang pendidikan. Bagi mahasiswa S1, Baitul Mal menyalurkan bantuan sebesar Rp. 5.000.000/orang. Mahasiswa S2 mendapatkan bantuan sebesar Rp. 15.000.000/orang sedangkan untuk mahasiswa S3 mendapatkan bantuan sebesar Rp. 25.000.000/orang. Untuk penguatan pendidikan agama, Baitul Mal memberikan bantuan tahfiz sebesar Rp.2.500.000/tahun.

Bagi penduduk Aceh Tengah yang sedang tertimpa musibah juga akan menerima bantuan dari Baitul Mal. Bagi pasien yang dirujuk untuk mendapatkan bantuan biaya pendamping sesuai tingkat rujukan. Bagi pasien yang dirujuk di Aceh Tengah, Baitul Mal menyalurkan bantuan sebesar Rp. 1.000.000/pasien. Bagi pasien yang dirujuk ke Banda Aceh akan menerima bantuan senilai Rp. 3.000.000/pasien dan jika harus dirujuk hingga ke rumah sakit di Jakarta maka Baitul Mal memberikan bantuan sebesar Rp. 5.000.000. bagi keluarga yang tertimpa musibah bencana alam, Baitul Mal Aceh Tengah memberikan dana tanggap darurat sebesar Rp. 2.000.000/KK ditambah dana tanggap darurat dari Baitul Mal Aceh sebanyak Rp. 3.000.000/KK.

Selain mengelola dana ZIS, Baitul Mal sedang mempersiapkan diri untuk dapat mengelola dan mengembangkan potensi wakaf. Pada tahun 2024, Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota telah mengikuti pelatihan SDM untuk pengembangan wakaf. Selain itu, Baitul Mal juga mulai

menyusun draft acuan organisasi dalam pengaturan wakaf, diharapkan ketika sudah ada objek wakaf yang harus dikelola maka baitul mal sudah siap untuk menjalankan amanah tersebut.

Salah satu bentuk persiapan Baitul Mal untuk mengelola wakaf adalah dengan mulai mnegumpulkan informasi mengenai praktik wakaf yang telah berjalan. Saat ini wakaf masyarakat umumnya dikelola oleh Baitul Mal Gampong/Desa dan dimanfaatkan untuk kemakmuran masjid gampong. Oleh sebab itu Baitul Mal berencana melakukan pendataan mengenai wakaf yang sudah ada. Selanjutnya Baitul Mal akan berusaha untuk melakukan sertifikasi terhadap aset wakaf tersebut. Hal ini perlu dilakukan untuk menjamin keberlangsungan aset wakaf dan menghindarkan aset wakaf dari potensi masalah kepemilikan aset wakaf tersebut.

3.6.3 Bappeda

Tidak adanya program bansos reguler yang dibiayai oleh Dana APBK tidak bermakna bahwa pemerintah daerah lepas tangan dalam pengentasan kemiskinan. Untuk mengatasi kendala minimnya anggaran untuk pengentasan kemiskinan, pemerintah daerah berupaya melakukan beberapa inovasi kebijakan yang dianggap akan cukup mampu menekan angka kemiskinan.

Kabupaten Bener Meriah pernah melahirkan kebijakan bantuan sosial buat petani. Program ini merupakan upaya perwujudan misi keempat RPJMD Kabupaten Bener Meriah yang sangat terkait erat dengan tata kelola perkebunan dan pertanian di Bener Meriah. Bantuan sosial petani bertujuan untuk menciptakan tata kelola pertanian secara terpadu dan berkelanjutan agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan hasil pertanian dan perkebunan secara terus menerus tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani, Bentuk dari program bantuan sosial adalah pemberian stimulus dalam peningkatan produktivitas komoditi

unggulan. Program bantuan sosial ini diberi nama bantuan sosial Kartu Petani Mulia.

Program Kartu Petani Mulia diperuntukan bagi para petani yang terdaftar pada basis data terpadu (BDT) untuk kategori desil 1, 2, dan 3 dan atau sistem informasi penyuluh pertanian di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Petani yang masuk dalam daftar BTD maupun di Kementerian Pertanian akan diverifikasi kembali oleh Camat, Reje, Petue dan Imem Kampung serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Hasil verifikasi tersebut akan divalidasi oleh Dinas Pertanian dan Pangan. Untuk penyaluran dana bansos, pemerintah Kabupaten Bener Meriah akan bekerja sama dengan perbankan atau instansi lainnya.

Pemanfaatan bansos KPM oleh petani hanya untuk transaksi pembiayaan sarana produksi pertanian dimana pemegang KPM dapat melaksanakan transaksi pada penyedia jasa sarana produksi yang telah bekerja sama dengan bank. Nilai bansos KPM yang akan disalurkan besar Rp. 900.000,- untuk setiap pemegang KPM. Program KPM memiliki keunggulan yang cukup unik. Jika penerima bansos meninggal dunia maka bansos dapat dialihkan kepada ahli waris yang bersangkutan sesuai dengan surat keterangan dari reje kampung yang bersangkutan.

Program bansos KPM yang direncanakan oleh Pemda Bener Meriah terlihat sangat baik dan telah dipersiapkan dengan baik. Namun sangat disayangkan akibat minimnya anggaran yang tersedia di pemda Bener Meriah, menyebabkan hingga saat ini program KPM belum dijalankan.

Pemda Pidie Jaya berupaya melakukan inovasi kebijakan demi menekan angka kemiskinan. Pada tahun 2023, melalui peraturan Bupati Nomor 52 Pemda Pidie Jaya meluncurkan program “Tupong Saka” sebagai inovasi kebijakan dalam pengentasan kemiskinan di Pidie Jaya. melalui program tupong saka, Pemda Pidie Jaya akan melakukan intervensi indikator utama penyebab kemiskinan pada satu titik fokus, lokus yang sama dan

rumah tangga sasaran yang sama. Pelaku intervensi menyebar pada banyak struktur pemerintahan seperti SKPK, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Gampong, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan stakeholder terkait.

Pemda Pidie Jaya menggunakan pendapatan sebagai indikator utama kemiskinan. Penetapan pendapatan sebagai indikator utama karena merupakan faktor yang sering dinyatakan sebagai penyebab sebuah keluarga terjebak dalam kemiskinan. Berdasarkan tingkat pendapatan, sebuah keluarga dapat dikategorikan dalam kelompok sangat miskin, miskin, dan rentan miskin. Dengan menetapkan lokus, titik fokus serta rumah tangga sasaran yang sama sebagai tujuan intervensi bersama, diharapkan faktor penyebab kemiskinan yang melekat pada rumah tangga sasaran dapat terlepas dan rumah tangga tersebut terbebas dari kemiskinan.

Penetapan sasaran penerima manfaat merujuk pada DTKS atau Data P3KE atau Regsosek tahun terakhir pada desil 1, desil 2 dan desil 3. Apabila ada rumah tangga yang memenuhi kriteria penerima manfaat tupong saka namun tidak terdaftar dalam ketiga sumber data maka rumah tangga dimaksud dapat menjadi calon penerima program setelah adanya keterangan dari keuchik dan rekomendasi camat mengenai kelayakan rumah tangga sebagai calon penerima bantuan.

Agar dapat menjangkau calon penerima manfaat dengan tepat, program tupong Saka menetapkan 5 (lima) kriteria, yaitu:

1. Penduduk kabupaten Pidie Jaya (dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) minimal 10 tahun;
2. Usia kepala keluarga minimal 35 tahun dan maksimal 50 tahun pada saat ditetapkan sebagai penerima calon penerima program;
3. Kepala keluarga memiliki/ pernah memiliki usaha dan/atau memiliki bakat dasar/ skill dan dibuktikan dengan dokumen (foto/peralatan usaha/sertifikat atau lainnya);

4. Sudah berkeluarga minimal 8 tahun (dibuktikan dengan buku nikah) dan memiliki tanggungan minimal 2 orang (dibuktikan dengan kartu keluarga); dan
5. Satu kriteria khusus lainnya dari pelaksana program yaitu penilaian mengenai karakter kepala rumah tangga yang harus taat beribadah, jujur, pekerja keras, tanggung jawab, serta taat pada ketentuan yang berlaku.

Peraturan Bupati mengenai Program Tupong diterbitkan pada tanggal 19 Desember 2023 dimana proses penyusunan Qanun APBK 2024 sudah mendekati masa pengesahan oleh DPRK Pidie Jaya. Diharapkan dukungan optimal APBK untuk pelaksanaan program ini dapat terlaksana pada tahun 2025.

Sedangkan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya mencoba memperkuat peran SKPK dalam pengentasan kemiskinan di Aceh Barat Daya. Peran pemerintah diterjemahkan ke dalam memberikan anggaran khusus pada 14 (empat belas) SKPK, dengan 29 Program, 37 Kegiatan, 87 sub kegiatan. Upaya ini mendapatkan alokasi anggaran hingga lebih dari 137 miliar rupiah. Pemanfaatan anggaran difokuskan pada pengentasan kemiskinan ekstrem. Namun jika ditinjau dari penggunaan anggaran, alokasi anggaran cukup banyak untuk belanja rutin saja, sebaliknya belanja modal atau belanja yang langsung ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat relatif kecil. Hal ini tentu saja tidak dapat mengurangi angka kemiskinan.

Untuk mengatasi minimnya anggaran, pemda Aceh Barat Daya berusaha menjalin komunikasi dan mengajak perusahaan yang beroperasi disana untuk berpartisipasi. Optimalisasi peran perusahaan dilakukan dengan memanfaatkan dana *Coorporation Social Responsibility* (CSR) untuk membiayai pelatihan tenaga kerja lokal sesuai dengan skil yang dibutuhkan oleh perusahaan dimaksud. Diharapkan setelah selesai mengikuti pelatihan maka para peserta dapat direkut menjadi tenaga kerja di perusahaan tersebut.

Upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bireuen juga menghadapi kendala anggaran. Kabupaten Bireuen juga tidak bisa menyediakan program bansos reguler yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan. agar tetap bisa melaksanakan program pengentasan kemiskinan, Pemda Bireuen memanfaatkan sebagian dana insentif fiskal untuk membiayai program bansos daerah.

Terakhir Kabupaten Nagan Raya juga memiliki bansos yang sama dengan kabupaten lainnya di seluruh Indonesia yang bersifat rutin dari Kementerian Sosial dari dana APBN. Nagan Raya juga tidak memiliki bansos yang spesifik yang berasal dari APBD, namun beberapa program yang membantu masyarakat miskin telah ada di setiap OPD dengan target sasaran yang belum merujuk pada satu data. Beberapa OPD terus bekerjasama untuk membantu masyarakat miskin, seperti yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Baitul Mal Nagan Raya. Jika ada keperluan dadakan, seperti mengantar pasien rujukan atau keberangkatan ke suatu universitas di luar kota yang memerlukan biaya, selama masuk dalam DTKS, pihak Dinas Sosial akan langsung koordinasi dengan Baitul Mal untuk bisa memberikan dana insidental. Meskipun koordinasi ini masih dalam lingkup kecil, namun perlu terus diintensifkan dan diperbesar dengan OPD lainnya yang berkaitan dengan bagaimana bansos yang diberikan bisa memandirikan keluarga-keluarga miskin.

3.7 Potensi Jebakan Kemiskinan (*Poverty Trap*)

Indikator-indikator jebakan kemiskinan sangat beragam dan sering kali saling terkait. Faktor-faktor biofisik dan geografis yang merugikan, seperti kualitas tanah yang buruk, akses yang terbatas terhadap sumber daya alam, dan paparan terhadap bencana alam, dapat menghambat kemajuan ekonomi dan menyulitkan seseorang untuk berinvestasi pada sumber daya yang dibutuhkan untuk melepaskan diri dari lingkaran kemiskinan (Sachs & McCord, 2008). Selain itu, kurangnya akses terhadap pendidikan, kesehatan,

dan layanan dasar lainnya dapat semakin memperburuk situasi, menjebak individu dalam lingkaran setan kekurangan (Lwanga-Ntale & McClean, 2004).

3.7.1. Kondisi Geografis dan Ketersediaan Fasilitas Publik

3.7.1.1 Kondisi Geografis

Kondisi geografis sebuah daerah memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan pola kehidupan masyarakat, perkembangan ekonomi, dan kebijakan pembangunan di wilayah tersebut. Setiap daerah memiliki karakteristik geografis yang unik, seperti letak, topografi, iklim, sumber daya alam, dan kondisi alam lainnya yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Kondisi geografis ini dapat menjadi keuntungan atau tantangan tergantung pada bagaimana daerah tersebut memanfaatkan atau menghadapinya.

Kondisi geografis pertama dalam penelitian ini adalah pemahaman tentang kondisi geografis sebuah daerah akan sangat membantu dalam merencanakan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan potensi dan tantangan yang ada. Pemanfaatan kondisi geografis yang optimal dapat membawa kemajuan, namun jika tidak dikelola dengan baik, potensi tersebut bisa menjadi hambatan. Oleh karena itu, kondisi geografis menjadi salah satu faktor yang tidak bisa diabaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan suatu daerah.

Hubungan antara kondisi geografis dan kemiskinan sangat erat karena faktor-faktor geografis dapat mempengaruhi akses terhadap sumber daya, infrastruktur, dan peluang ekonomi. Wilayah yang terpencil atau terisolasi (seperti daerah pegunungan, pulau-pulau kecil, atau kawasan yang sulit dijangkau transportasi) sering kali kesulitan dalam mengakses pasar, pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur penting lainnya. Hal ini membatasi peluang ekonomi dan meningkatkan tingkat kemiskinan. Sebaliknya, wilayah yang terhubung baik dengan pusat-pusat ekonomi dan memiliki infrastruktur yang baik (seperti akses jalan yang memadai,

pelabuhan, dan bandara) lebih mudah mengakses peluang ekonomi, yang dapat mengurangi kemiskinan.

Secara keseluruhan, kondisi geografis dapat berperan sebagai faktor penentu dalam tingkat kemiskinan, namun faktor ini harus dipahami bersama dengan faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan pemerintah untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap.

Kondisi geografis kedua dalam penelitian ini adalah kualitas tanah memiliki pengaruh langsung terhadap kemampuan masyarakat, terutama petani, untuk menghasilkan pangan dan pendapatan yang cukup. Tanah yang subur dan dikelola dengan baik dapat mendukung keberlanjutan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup. Sebaliknya, tanah yang buruk atau terdegradasi akan membatasi peluang ekonomi, meningkatkan kerentanannya terhadap bencana alam, dan memperburuk kondisi kemiskinan. Untuk itu, pengelolaan tanah yang berkelanjutan sangat penting dalam upaya mengurangi kemiskinan, khususnya di wilayah yang bergantung pada pertanian.

Tanah yang subur dan kaya akan unsur hara mendukung pertumbuhan tanaman yang lebih baik dan menghasilkan hasil pertanian yang melimpah. Ini berarti petani dapat memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan memiliki sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sebaliknya, tanah yang miskin atau terdegradasi (misalnya tanah yang tererosi, kurang unsur hara, atau tercemar) akan menghasilkan hasil pertanian yang rendah. Petani yang mengandalkan tanah untuk mata pencaharian mereka akan mengalami kesulitan dalam menghasilkan pendapatan yang memadai, yang dapat memperburuk tingkat kemiskinan mereka.

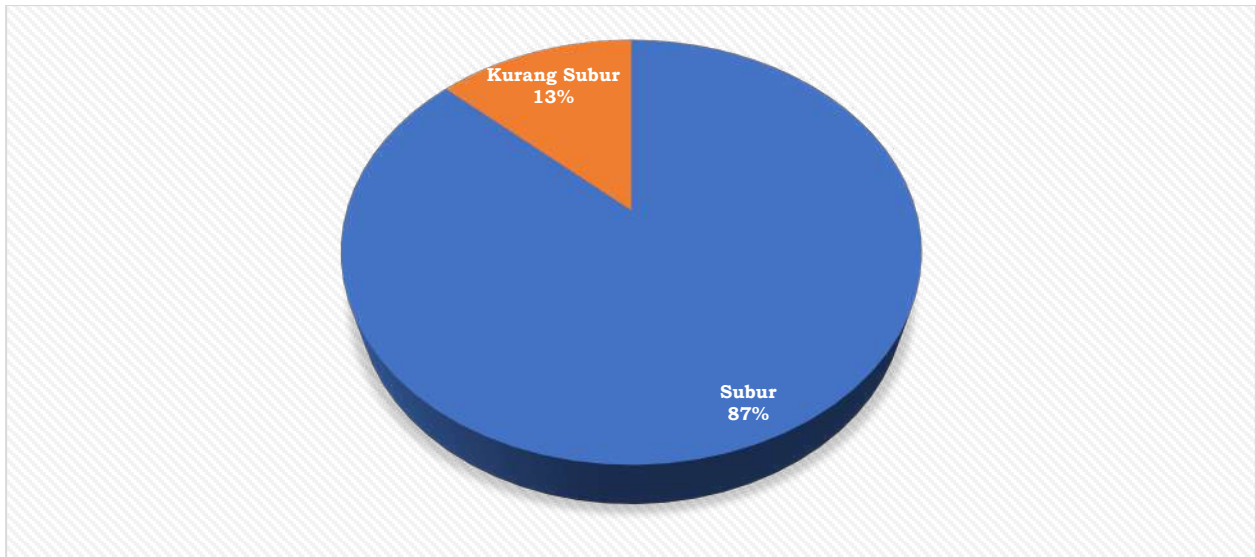
Di banyak daerah pedesaan, terutama di negara berkembang, masyarakat sering bergantung pada pertanian subsisten—jenis pertanian yang menghasilkan cukup pangan untuk konsumsi keluarga, tetapi dengan

sedikit surplus untuk diperdagangkan. Kualitas tanah yang buruk mengurangi hasil pertanian, membuat keluarga petani kesulitan untuk mencukupi kebutuhan dasar mereka. Jika hasil pertanian tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga dan tidak ada akses ke sumber pendapatan lain, kemiskinan akan semakin parah.

Kualitas tanah yang baik mendukung hasil pertanian yang lebih baik, yang memungkinkan petani untuk memasarkan produk mereka ke pasar dengan harga yang kompetitif. Ini memberikan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan. Sebaliknya, petani yang memiliki tanah yang buruk atau kurang subur mungkin tidak dapat menghasilkan surplus yang cukup untuk dijual, membatasi pendapatan mereka dan memperburuk kemiskinan. Kualitas tanah yang buruk dapat menyebabkan kelangkaan pangan, yang tidak hanya mempengaruhi petani tetapi juga masyarakat yang bergantung pada pasokan pangan lokal. Kekurangan pangan dapat menyebabkan harga pangan meningkat, mengurangi daya beli, dan meningkatkan angka kemiskinan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di 6 kabupaten di Aceh ditemukan bahwa 87 persen responden menganggap bahwa kualitas tanah di desanya adalah subur. Artinya masyarakat mempunyai potensi tanah yang bisa dijadikan sumber pendapatan mereka yang umumnya berasal dari pertanian.

Gambar 3.24 Kualitas Tanah



Sumber: Hasil Survei, 2024.

Kondisi geografis ketiga dalam penelitian ini adalah akses terhadap sumber daya alam (SDA) memainkan peran yang sangat penting dalam upaya mengurangi kemiskinan di banyak negara, terutama di negara berkembang. Sumber daya alam, yang meliputi segala kekayaan yang ada di bumi seperti tanah, air, hutan, mineral, dan energi, merupakan salah satu aset utama yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, meskipun sumber daya alam melimpah di banyak wilayah, banyak masyarakat yang masih hidup dalam kemiskinan karena terbatasnya akses mereka terhadap sumber daya ini.

Beberapa faktor yang memperburuk hubungan antara akses SDA dan kemiskinan antara lain adalah ketidakmerataan pembagian kekayaan alam, peraturan yang tidak mendukung hak akses masyarakat terhadap tanah atau sumber daya lainnya, serta eksploitasi berlebihan terhadap SDA yang merusak lingkungan. Selain itu, kebijakan pembangunan yang tidak inklusif dan konflik sumber daya juga dapat memperburuk kemiskinan, terutama di daerah-daerah yang kaya akan SDA.

Dengan demikian, pengelolaan akses yang adil dan berkelanjutan terhadap sumber daya alam adalah langkah penting untuk memerangi

kemiskinan. Pemanfaatan SDA yang bijak, inklusif, dan berbasis pada prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dan memastikan bahwa mereka memperoleh manfaat yang adil dari sumber daya alam yang ada. Pendahuluan ini akan membahas hubungan antara akses SDA dan kemiskinan, tantangan yang dihadapi dalam distribusi SDA, serta pentingnya kebijakan yang mendukung pengurangan kemiskinan melalui pengelolaan SDA yang adil dan berkelanjutan.

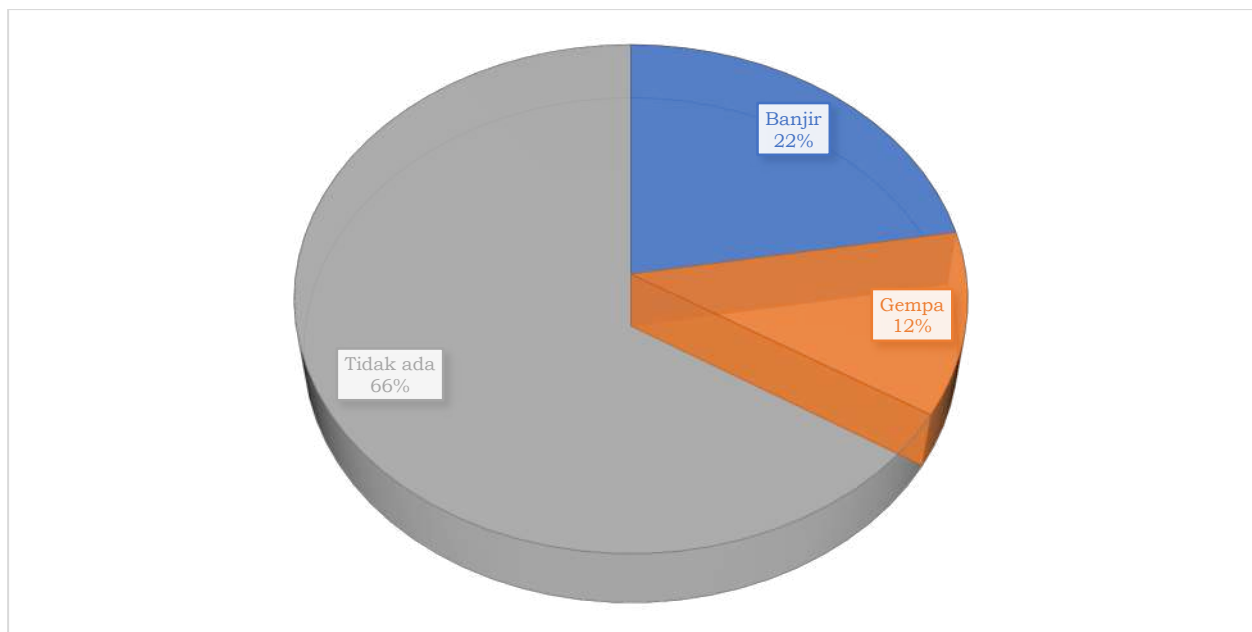
Wilayah yang kaya sumber daya alam (misalnya tambang, hutan, atau tanah yang subur) cenderung memiliki potensi ekonomi yang lebih besar. Wilayah ini sering kali memiliki peluang untuk pengembangan sektor pertanian, industri, atau pariwisata yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Sebaliknya, wilayah yang miskin sumber daya alam cenderung menghadapi kesulitan dalam menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, yang dapat memperburuk tingkat kemiskinan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa masyarakat miskin yang menjadi target responden menyatakan ketidaktahuan dengan berbagai akses SDA yang ada terutama untuk asset yang dimiliki desa. Namun, sebagian responden mengelola tanah negara dalam mendapatkan pendapatannya.

Kondisi geografis keempat dalam penelitian ini adalah wilayah yang rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau kekeringan dapat menghambat pembangunan ekonomi dan memperburuk kemiskinan. Misalnya, daerah rawan banjir mungkin kehilangan tanaman atau infrastruktur penting, yang menyebabkan kerugian ekonomi besar. Wilayah dengan iklim yang ekstrim, seperti daerah yang sangat panas atau dingin, juga mungkin menghadapi tantangan dalam pertanian dan kehidupan sehari-hari, yang mengarah pada tingkat kemiskinan yang lebih tinggi.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa 66 persen responden menyatakan tidak ada bencana di desa mereka, sedangkan 22 persen responden menyatakan desa mereka rentan dengan bencana banjir yang terkadang menghancurkan lahan pertanian masyarakat. Sedangkan 12 persen responden menyatakan bahwa bencana alam yang sering dialami adalah gempa yang merusak perumahan yang dimiliki dan beberapa infrastruktur desa lainnya. Belum ada langkah yang konkrit dari pemerintah untuk mitigasi bencana yang kerap terjadi di desa mereka.

Gambar 3.25 Bencana Alam



Sumber: Hasil Survei, 2024.

3.7.1.2 Ketersediaan Fasilitas Publik

Ketersediaan dan akses fasilitas publik sangat penting untuk menciptakan kesempatan yang lebih baik bagi masyarakat untuk keluar dari kemiskinan. Infrastruktur yang baik, pendidikan, kesehatan, air bersih, dan energi merupakan elemen kunci yang memungkinkan individu dan keluarga untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, mengembangkan keterampilan, memperoleh pekerjaan yang lebih baik, dan mengakses peluang ekonomi. Ketika fasilitas publik terbatas atau tidak merata, masyarakat miskin akan lebih kesulitan dalam mengatasi tantangan kehidupan dan keluar dari siklus

kemiskinan. Investasi dalam penyediaan fasilitas publik yang merata dan terjangkau merupakan langkah penting dalam upaya mengurangi kemiskinan.

Fasilitas publik pertama adalah pendidikan yang merupakan kunci untuk memutus siklus kemiskinan. Tanpa akses yang memadai ke pendidikan, anak-anak dan orang dewasa sulit untuk memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Fasilitas pendidikan yang dekat dan terjangkau (sekolah dasar, menengah, dan tinggi) memberikan peluang untuk mengembangkan keterampilan dan meningkatkan peluang kerja. Sebaliknya, kurangnya fasilitas pendidikan atau jarak yang jauh ke sekolah dapat menghalangi anak-anak dari keluarga miskin untuk bersekolah, memperburuk tingkat buta huruf dan rendahnya pendapatan keluarga. Sekolah yang berkualitas dan terjangkau memberikan kesempatan bagi generasi berikutnya untuk mengakses pekerjaan yang lebih baik, mengurangi tingkat kemiskinan secara jangka panjang.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa untuk ketersediaan fasilitas pendidikan, hampir semua desa mempunyai fasilitas pendidikan untuk berbagai tingkatan, yaitu tingkat dasar, menengah pertama, dan menengah akhir. Jika ada desa yang tidak mempunyai fasilitas pendidikan tersebut, maka masyarakat mempunyai akses ke desa-desa terdekat.

Tabel 3.10 Ketersediaan Fasilitas Pendidikan (Persen)

No	Ketersediaan Fasilitas Pendidikan	Ya	Tidak
1	Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah	72.73	27.27
2	Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah	29.67	60.33
3	Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah	21.49	78.51

Sumber: Hasil Survei, 2024

Fasilitas publik kedua adalah layanan kesehatan yang terjangkau dan mudah diakses sangat penting untuk mencegah dan mengobati penyakit sehingga masyarakat bisa tetap terus sehat dalam mencari pendapatan sehari-hari. Tanpa akses yang memadai ke fasilitas kesehatan, orang-orang di wilayah miskin mungkin kesulitan mengatasi masalah kesehatan, yang

pada gilirannya dapat memengaruhi produktivitas mereka dan memperburuk kondisi ekonomi. Di banyak daerah miskin, kurangnya puskesmas dan rumah sakit yang dekat dan memadai dapat memperburuk kemiskinan, karena keluarga tidak dapat mengakses perawatan medis yang diperlukan, mengakibatkan biaya pengobatan yang tinggi atau bahkan kematian akibat penyakit yang tidak diobati.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa responden mempunyai akses dan fasilitas kesehatan yang cukup walau belum sepenuhnya memadai. Hanya ada 19,83 persen desa yang mempunyai dokter; 82,64 persen yang mempunyai bidan; 33,88 persen mempunyai perawat; 54,55 persen mempunyai puskesmas pembantu; 29,75 persen mempunyai puskesmas; dan 19,01 persen mempunyai rumah sakit. Namun, masyarakat di seluruh penelitian mengaku tidak mempunyai kesulitan dalam akses pelayanan kesehatan walaupun di desa mereka tidak ada. Akses kemudahan pelayanan kesehatan ke desa lain yang mempunyai rumah sakit dan dokter sangat mudah dilakukan.

Tabel 3.11 Ketersediaan Fasilitas Kesehatan (Persen)

No	Ketersediaan Fasilitas Kesehatan	Ya	Tidak
1	Dokter	19,83	80,17
2	Bidan	82,64	17,36
3	Perawat	33,88	66,12
4	Puskesmas Pembantu	54,55	45,45
5	Puskesmas	29,75	70,25
6	Rumah Sakit	19,01	80,99

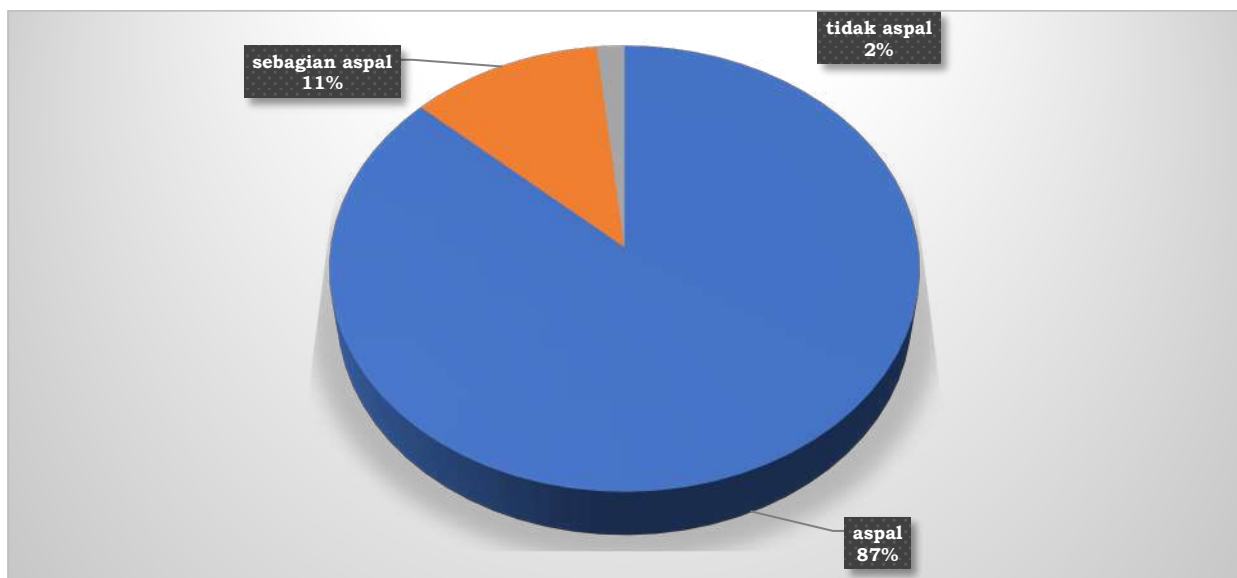
Sumber: Hasil Survei, 2024

Fasilitas publik ketiga adalah infrastruktur transportasi yang baik sangat penting untuk meningkatkan akses ke pasar kerja, pendidikan, dan layanan publik lainnya. Jalan yang rusak atau kurangnya akses transportasi publik membuat perjalanan menjadi sulit, terutama di daerah pedesaan atau daerah terpencil. Jika masyarakat tidak dapat dengan mudah mengakses pasar kerja atau pusat ekonomi, mereka akan kesulitan untuk mencari pekerjaan dan mengembangkan usaha mereka. Hal ini mengarah pada stagnasi ekonomi di kalangan masyarakat miskin. Keterhubungan antar

wilayah yang baik dengan transportasi publik atau infrastruktur jalan yang memadai dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan mereka.

Hasil penelitian menemukan bahwa seluruh responden menyatakan bahwa tidak ada transportasi publik yang menghubungkan antar wilayah, namun masyarakat mempunyai akses sarana transportasi sendiri. Sedangkan untuk infrastruktur jalan, hampir sebagian desa (87 persen) telah mempunyai jalan aspal. Hanya beberapa desa yang belum aspal dan sebagian jalan beraspal yaitu di Desa Uteun Bunta dan Alue Udeueng, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen. Hal ini disebabkan karena struktur tanah yang membuat jalan rusak sehingga memerlukan bantuan dari pihak kabupaten atau provinsi dalam memperbaiki jalan tersebut. Usaha untuk menggunakan anggaran dana desa sudah dilakukan namun setelah diperbaiki, menjadi rusak kembali. Selain itu, masyarakat desa sangat memerlukan jalan tersebut untuk keterhubungan wilayah dengan desa lain dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat desa.

Gambar 3.26 Infrastruktur Jalan



Sumber: Hasil Survei, 2024

Fasilitas publik keempat adalah akses terhadap energi (seperti listrik) sangat penting dalam kehidupan sehari-hari untuk mendukung aktivitas

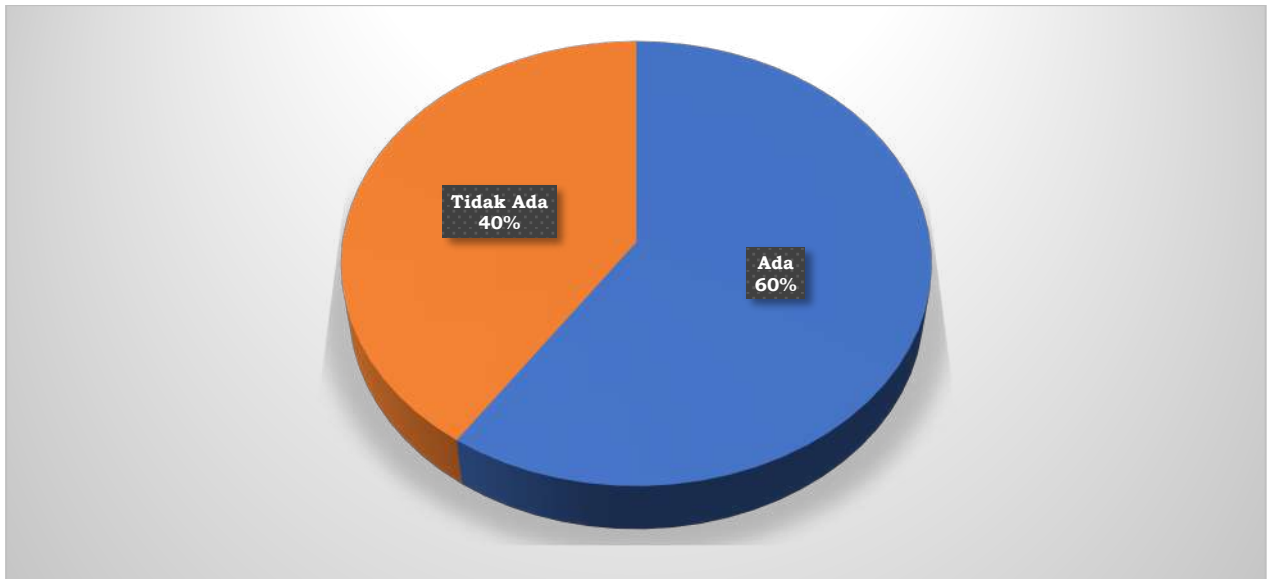
rumah tangga, pendidikan, dan usaha ekonomi. Tanpa listrik, banyak pekerjaan yang sulit dilakukan, seperti belajar, bekerja di malam hari, atau menjalankan usaha kecil. Wilayah yang tidak memiliki akses ke listrik atau energi terbarukan cenderung terisolasi dari perkembangan teknologi, yang bisa membatasi peluang kerja dan pengembangan usaha. Ini dapat memperburuk kemiskinan karena orang tidak memiliki alat atau sumber daya untuk meningkatkan produktivitas.

Dari hasil penelitian, seluruh responden telah mempunyai akses PLN sehingga masyarakat bisa melakukan aktifitas ekonomi tanpa harus terkendala dengan penerangan.

Fasilitas publik kelima adalah ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Hal ini menyangkut kebutuhan dasar untuk menjaga kesehatan. Di banyak daerah miskin, keterbatasan akses air bersih atau sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit menular, yang berdampak pada produktivitas dan meningkatkan beban ekonomi keluarga miskin. Kondisi sanitasi yang buruk di lingkungan permukiman dapat menyebabkan penyakit seperti diare, yang pada gilirannya mengurangi kapasitas orang untuk bekerja atau bersekolah. Ini memengaruhi pendapatan keluarga dan memperburuk kemiskinan.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa untuk akses air bersih, responden menyatakan sebanyak 60 persen mempunyai akses air bersih melalui jaringan air bersih yang dibuat oleh PDAM atau lembaga swadaya masyarakat yang bekerjasama dengan pemerintah desa untuk keperluan minum, mandi, mencuci, dan keperluan sehari-hari. Sedangkan 40 persen lainnya mendapatkan air bersih dari sungai, sumur, yang belum disterilisasikan sehingga dikhawatirkan bisa menyebabkan gangguan kesehatan lainnya. Karenanya diperlukan bantuan penyediaan fasilitas air bersih yang memudahkan masyarakat mengakses air bersih yang ada.

Gambar 3.27 Ketersediaan Air Bersih



Sumber: Hasil Survei, 2024.

Fasilitas publik keenam adalah akses terhadap perumahan. Perumahan yang layak adalah faktor penting dalam kualitas hidup dan kesejahteraan. Tanpa rumah yang aman, sehat, dan terjangkau, masyarakat miskin berisiko mengalami masalah kesehatan, kecelakaan, atau kekurangan ruang untuk bekerja dan belajar. Ketersediaan rumah dengan harga terjangkau dan perumahan yang dibangun dengan baik dapat memberikan kestabilan ekonomi dan sosial bagi keluarga, yang mendukung mobilitas sosial dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa sebagian responden telah mempunyai akses perumahan, dengan berbagai kategori, yaitu rumah sendiri (81,82 persen), rumah tumpangan (6,61 persen), dan sewa (11,57 persen). Rumah-rumah yang ditempati juga ada yang layak, kurang layak, dan tidak layak. Untuk rumah yang kurang layak adalah rumah yang hanya mempunyai 2 kamar dimana jumlah tanggungan anggota keluarga adalah 7 orang. Selanjutnya juga rumah yang tidak layak adalah rumah yang tidak mempunyai fasilitas MCK dimana untuk keperluan MCK bergantung pada aliran sungai. Karenanya bantuan perumahan yang layak perlu segera dipenuhi untuk menjaga stabilitas dari rumah tangga miskin. Bantuan untuk perumahan ini bisa bekerjasama dengan Dinas Perkim dan Baitul Mal.

3.7.2 Tata Kelola dan Implementasi Desa untuk Bansos

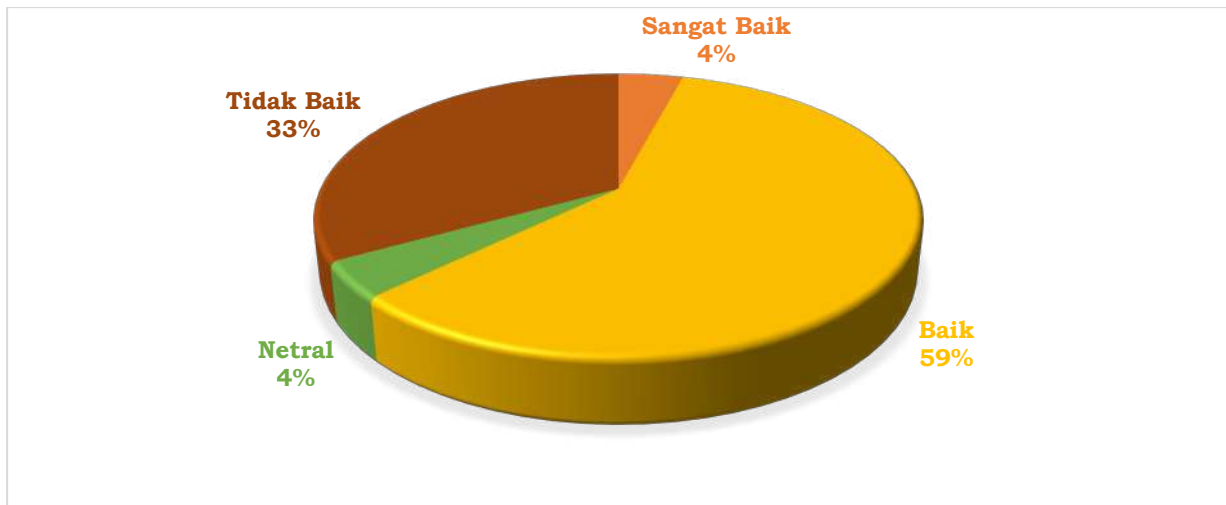
Tata kelola bantuan sosial (bansos) yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan yang disalurkan tepat sasaran, efektif, efisien, dan berkelanjutan. Ada beberapa prinsip utama yang harus diterapkan dalam tata kelola bansos untuk memastikan bahwa program tersebut dapat memenuhi tujuan utamanya, yaitu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan. Berikut adalah prinsip-prinsip penting dalam tata kelola bantuan sosial.

3.7.2.1 Transparansi

Prinsip Transparansi dalam tata kelola bansos mengacu pada keterbukaan informasi mengenai seluruh proses bantuan sosial, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya harus memiliki akses yang jelas terhadap informasi mengenai siapa yang berhak menerima bantuan, jenis bantuan yang diberikan, dan bagaimana proses distribusinya. Transparansi bertujuan mengurangi potensi penyalahgunaan dan meningkatkan akuntabilitas. Masyarakat dapat mengawasi jalannya program dan memastikan bahwa dana bansos digunakan dengan benar. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memberikan laporan berkala tentang penggunaan dana bansos, serta menyediakan platform untuk pengaduan dan umpan balik masyarakat. Penerapan prinsip transparansi dalam bansos sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dana, menghindari praktik korupsi, serta memastikan bahwa bantuan sosial sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa 59 persen responden berpendapat bahwa prinsip transparansi dalam pengelolaan bantuan sosial dianggap sudah baik, sedangkan 33 persen berpendapat tidak baik, 4 persen berpendapat sangat baik dan 4 persen lainnya netral.

Gambar 3.28 Prinsip Transparansi dalam Tata Kelola Bansos



Sumber: Hasil Survei, 2024.

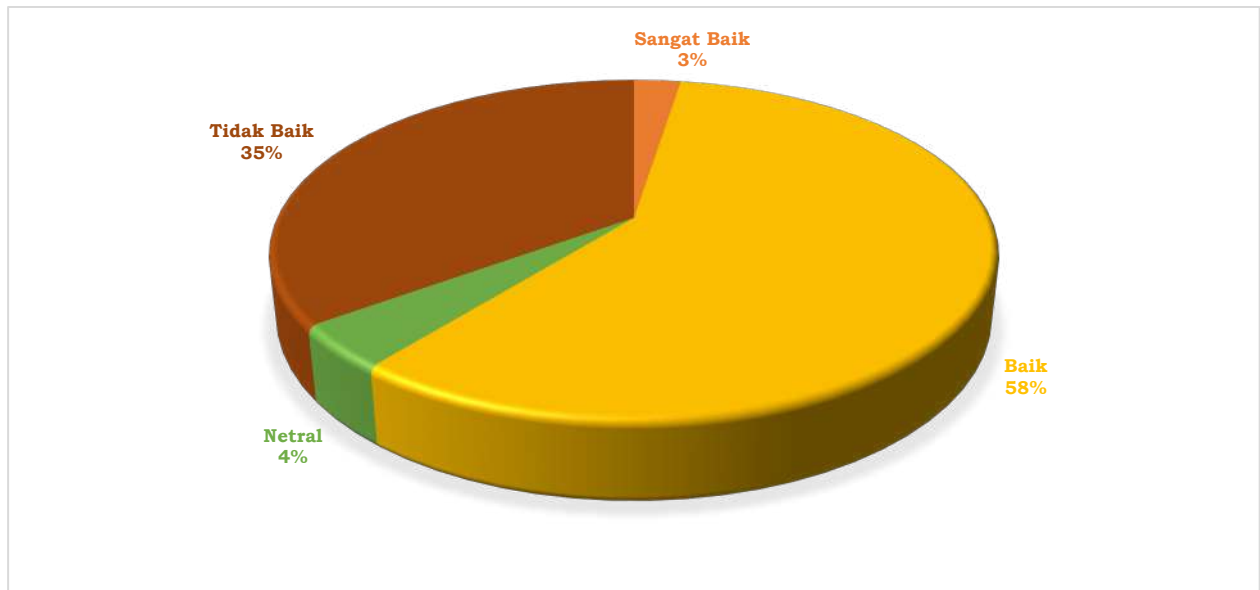
3.7.2.2 Partisipatif

Prinsip partisipasi menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program bansos. Masyarakat yang menjadi sasaran penerima bantuan harus diberi ruang untuk menyuarakan kebutuhan mereka dan memberi masukan mengenai cara bantuan disalurkan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas bantuan sosial dengan memastikan bahwa program tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, masyarakat dilibatkan dalam proses pemetaan penerima manfaat melalui musyawarah atau survei, serta diberikan saluran untuk memberikan umpan balik mengenai program bansos.

Prinsip partisipatif dalam tata kelola dan implementasi dana bantuan sosial (bansos) merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program bantuan sosial. Dalam konteks tata kelola dana bansos, prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa program bantuan sosial dapat menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan, serta meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan dalam distribusi dana.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa 58 persen responden berpendapat bahwa prinsip partisipasi dalam pengelolaan bantuan sosial dianggap sudah baik, sedangkan 35 persen berpendapat tidak baik, 4 persen lainnya netral dan 3 persen berpendapat sangat baik.

Gambar 3.29 Prinsip Partisipasi dalam Tata Kelola Bansos



Sumber: Hasil Survei, 2024.

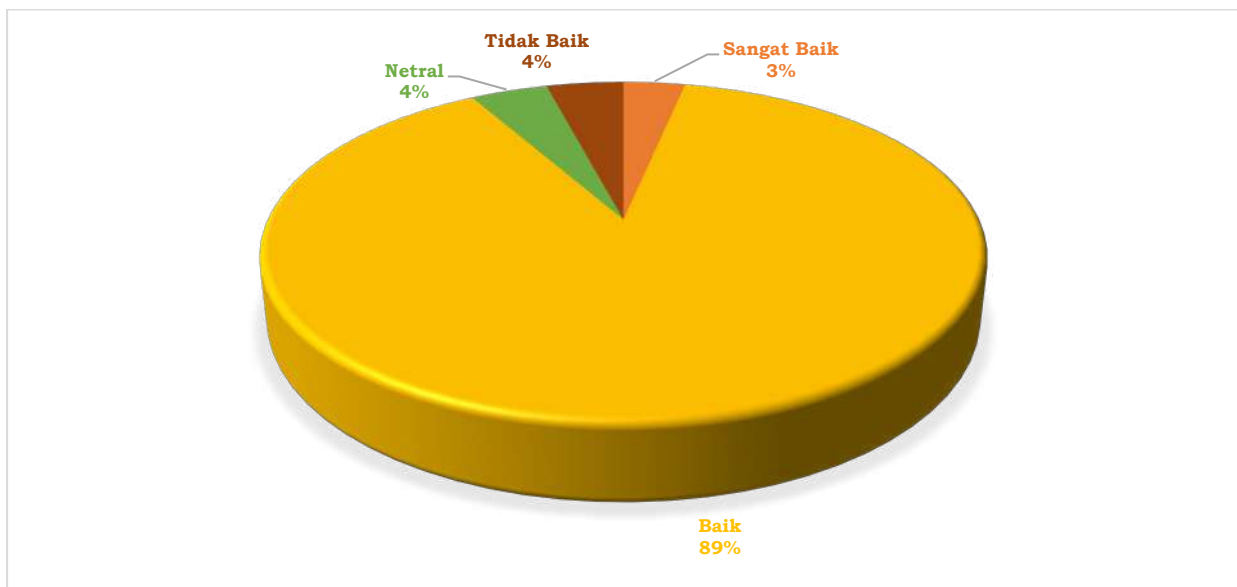
3.7.2.3 Kepentingan Umum

Prinsip kepentingan umum menegaskan bahwa tujuan utama dari bantuan sosial adalah untuk kepentingan masyarakat luas, terutama dalam upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Prinsip kepentingan umum dalam pengelolaan dana bantuan sosial (bansos) mengutamakan bahwa tujuan dari program bantuan sosial adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang rentan atau miskin. Prinsip ini menekankan bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil dalam pelaksanaan bansos harus mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat banyak, tanpa membedakan golongan, suku, agama, atau status sosial. Penerapan prinsip kepentingan umum dalam bansos memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar mencapai sasaran yang tepat dan memberikan

manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya mereka yang paling membutuhkan.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa 89 persen responden berpendapat bahwa prinsip kepentingan dalam pengelolaan bantuan sosial dianggap sudah baik, sedangkan 4 persen berpendapat tidak baik, 4 persen lainnya netral, dan 3 persen berpendapat sangat baik.

Gambar 3.30 Prinsip Kepentingan Umum dalam Tata Kelola Bansos



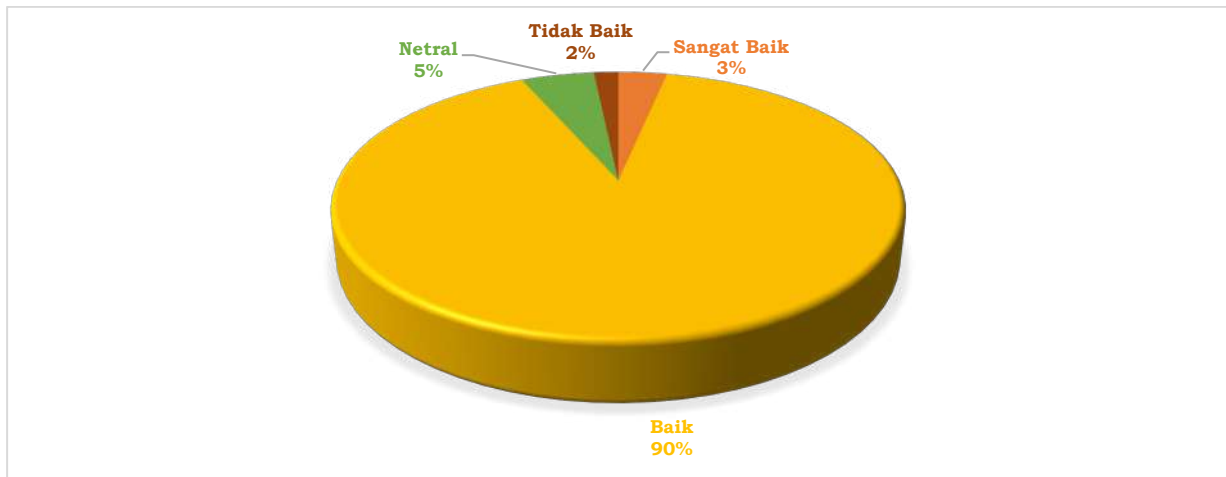
Sumber: Hasil Survei, 2024.

3.7.2.4 Kebaikan

Prinsip kebaikan, dalam konteks pengelolaan dana bantuan sosial (bansos), mengacu pada upaya untuk memaksimalkan manfaat sosial bagi masyarakat dan memastikan bahwa program bansos memberikan dampak positif yang menyeluruh bagi kesejahteraan penerima bantuan. Prinsip ini berfokus pada pemanfaatan dana bansos untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu menciptakan kebaikan bersama, mengurangi kesenjangan sosial, serta membantu individu atau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa 90 persen responden berpendapat bahwa prinsip kebaikan dalam pengelolaan bantuan sosial dianggap sudah baik, sedangkan 2 persen berpendapat tidak baik, 5 persen lainnya netral dan 3 persen berpendapat sangat baik.

Gambar 3.31 Prinsip Kebaikan dalam Tata Kelola Bansos



Sumber: Hasil Survei, 2024.

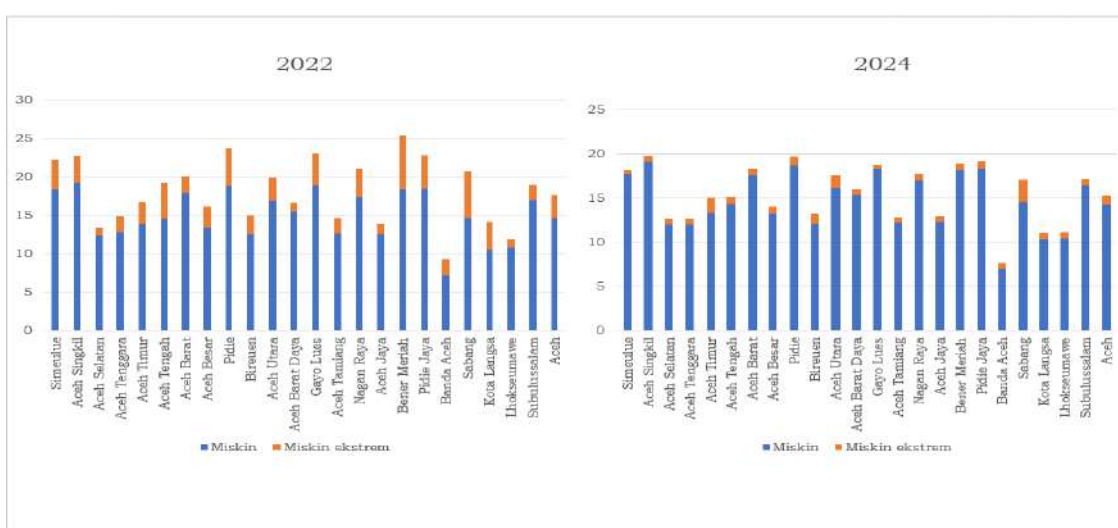
Prinsip-prinsip dalam tata kelola bantuan sosial tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan sosial yang disalurkan dapat memberikan dampak yang positif, tepat sasaran, dan berkelanjutan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang paling membutuhkan. Penerapan prinsip-prinsip ini; transparansi, partisipasi, kepentingan umum, kebaikan; akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi program bansos, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga penyelenggara bantuan sosial.

3.7.3 Potensi Jebakan Kemiskinan

Banyaknya bansos yang disalurkan oleh pemerintah sepanjang 2022 – 2024 cukup mampu mengubah struktur penduduk miskin di Aceh. Bansos yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat miskin ekstrem menyebabkan tingkat pendapatan mereka meningkat dan keluar dari status miskin ekstrem. Namun demikian, terlihat bansos yang ada hanya mampu

“mengangkat” masyarakat miskin ekstrem pindah ke status miskin. Besarnya bansos belum cukup mampu mengeluarkan penduduk dari kemiskinan. Sulitnya membawa penduduk Aceh keluar dari kemiskinan mengindikasikan penduduk miskin Aceh telah masuk dalam perangkap jebakan kemiskinan akut yang membuat mereka seperti tidak mampu lagi mengubah nasib dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera.

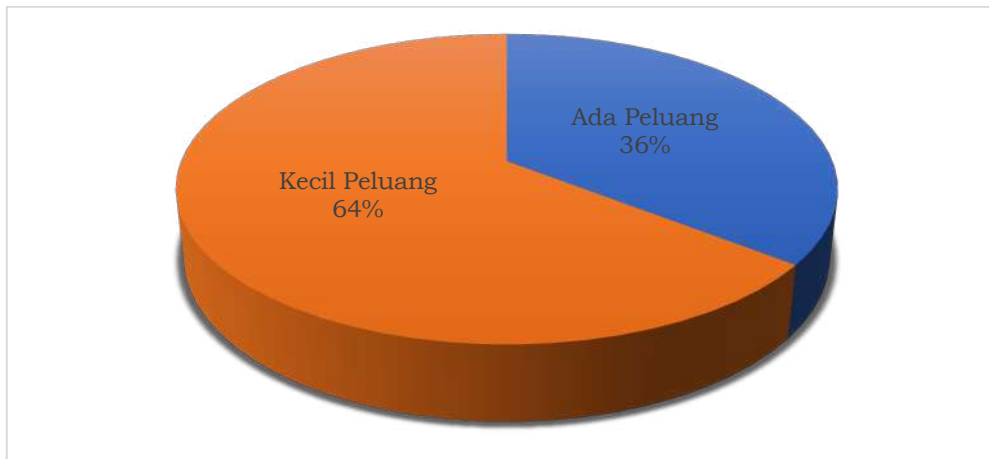
Gambar 3.32 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2022 dan 2024



Sumber: BPS Aceh, 2024

Pemerintah daerah dan gampong harus menyadari adanya jebakan kemiskinan yang menjerat penduduk miskin di Aceh. Walau pemerintah telah berusaha membuka akses masyarakat kepada berbagai fasilitas publik, namun kebijakan tersebut belum efektif mengatasi kemiskinan Aceh. Penduduk miskin sulit keluar dari kemiskinan disebabkan kombinasi beberapa faktor yang melekat telah menyulitkan mereka untuk terbebas dari kemiskinan.

Gambar 3.33 Potensi Poverty Trap



Sumber: Hasil Survey, 2024

Kombinasi antara kepemilikan lahan dan tingkat pendidikan merupakan faktor penting yang cukup berperan untuk membawa penduduk miskin keluar dari jebakan kemiskinan. Secara umum, diyakini rumah tangga miskin yang mempunyai lahan produktif berpeluang lebih besar keluar dari kemiskinan jika dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak memiliki lahan. Demikian juga penduduk miskin yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi sering dipandang lebih berpeluang terlepas dari kemiskinan.

Hasil survei menunjukkan hanya sekitar 36 persen responden yang memiliki kegiatan produktif seperti memiliki lahan pertanian atau pekebunan serta memiliki usaha kecil. Sementara ada sekitar 64 persen responden yang tidak memiliki lahan maupun kegiatan usaha. Dari keseluruhan responden yang memiliki kegiatan produktif responden tersebut, hanya 2,38 yang berpendidikan sarjana, dan 23,81 persen merupakan lulusan pendidikan menengah atas. Kondisi yang relatif sama terjadi pada kelompok responden yang tidak memiliki lahan/usaha dimana hanya 1,27 responden yang berpendidikan sarjana dan 20,25 persen lulusan SMA sederajat. Mayoritas penduduk miskin yang menjadi responden berpendidikan rendah baik yang memiliki lahan/usaha maupun yang tidak memiliki lahan/usaha. Berdasarkan temuan ini, diyakini jebakan kemiskinan eksis di Aceh.

Tabel 3 12 Distribusi responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Kepemilikan Lahan/Usaha

Tingkat Pendidikan	Responden yang memiliki lahan/usaha	Responden yang tidak memiliki lahan/usaha
S1	2,38	1,27
SMA/SMK/MAN	23,81	20,25
SMP/MTs	33,33	25,32
SD/MI	28,57	40,51
Tidak tamat SD/MI	11,90	12,66
Total	100,00	100,00

Sumber: Hasil Survey, 2024

Untuk melepaskan penduduk miskin dari jebakan kemiskinan, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota harus fokus pada 2 (dua) hal yaitu peningkatan SDM penduduk miskin melalui berbagai pelatihan, pendampingan dan insentif usaha lainnya. Pemerintah juga perlu untuk memberi kesempatan sekolah bagi penduduk miskin yang masih berada pada usia sekolah. Pemerintah juga perlu membuka peluang bagi penduduk miskin untuk memiliki lahan atau kegiatan usaha produktif agar penduduk miskin dapat berwirausaha sesuai dengan skil yang dimiliki.

Intervensi terhadap penduduk miskin harus dilakukan secara menyeluruh, tepat sasaran, dan memanfaatkan seluruh sumber anggaran yang ada. Program pemerintah daerah sebaiknya diarahkan pada kegiatan pelatihan dan pendampingan usaha yang (akan) dijalankan oleh masyarakat miskin. Jika intervensi pemerintah dapat berjalan secara konsisten maka masyarakat miskin tersebut akan lebih berdaya dan dalam jangka menengah akan dapat keluar dari jebakan kemiskinan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, beberapa hal umum yang dapat disimpulkan adalah efektifitas bantuan sosial terhadap masyarakat miskin dianalisis berdasarkan indikator ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Selanjutnya dianalisis potensi jebakan kemiskinan yang membuat masyarakat miskin tidak bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Karakteristik responden rata-rata dalam penelitian ini adalah berjenis kelamin perempuan, pendidikan lulusan SD/MI, status perkawinan adalah kawin, pekerjaan adalah ibu rumah tangga, petani sawah dan kebun, tidak mempunyai keahlian khusus, mempunyai tanggungan rata-rata 3 orang, mempunyai pendapatan rata-rata sebelum menerima bansos adalah Rp. 2.104.507,- dengan pengeluaran rata-rata adalah Rp. 2.124.676,-. Setelah menerima bansos pendapatan meningkat menjadi Rp. 2.447.561,- dan pengeluaran menjadi Rp. 2.134.056,-. Penambahan pendapatan setelah menerima bansos meningkat jauh lebih besar daripada pengeluaran setelah menerima bansos.

Hasil kesimpulan efektivitas bansos terhadap masyarakat miskin dan potensi jebakan kemiskinan secara lebih detail dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan indikator ketepatan sasaran program ditemukan bahwa bantuan sosial yang diberikan telah sampai pada individu atau kelompok yang memerlukan. Jenis bantuan adalah PKH, BPNT, Sembako, KIP, dan Disabilitas. Namun ada juga masyarakat yang merasa bahwa bantuan sosial yang mereka terima tidak sesuai dengan apa yang diperlukan. Bantuan yang diharapkan adalah bantuan yang produktif sehingga bisa mendapatkan pendapatan yang lebih banyak. Selain itu responden juga menginginkan bantuan pendidikan yang lebih banyak untuk keperluan anak-anak sekolah.

2. Berdasarkan indikator sosialisasi program, responden mengaku paham dengan bansos yang diterima yang berasal dari Kementerian Sosial tapi pemahaman ini terjadi setelah mereka mendapatkan bantuan, bukan sebelumnya. Selanjutnya dikatakan tidak ada sosialisasi yang dilakukan mengenai bansos sehingga masyarakat merasa bahwa literasi bansos yang mereka peroleh masih sangat minim.
3. Berdasarkan indikator tujuan program, masyarakat merasakan bahwa tujuan program untuk peningkatan daya beli masyarakat sudah terpenuhi, terutama untuk keperluan bahan pokok kebutuhan sehari-hari dan juga tambahan untuk pendidikan walau belum sepenuhnya mencukupi. Namun responden menilai bahwa program bansos yang selama ini mereka dapatkan belum bisa memberikan kekuatan untuk keluar dari kemiskinan karena jumlah bantuan yang diberikan masih sangat sedikit jumlahnya dan terkadang bisa saja terhenti tiba-tiba tanpa mereka tau penyebabnya. Masyarakat merekomendasikan agar bantuan sosial bisa diberikan lebih banyak kepada keperluan pendidikan sekolah karena hal itu merupakan investasi di masa mendatang yang bisa mengeluarkan dari kemiskinan. Selain itu, masyarakat juga meminta bansos yang produktif sehingga jika ada masyarakat yang mempunyai keahlian lain, bisa menjadi pendapatan potensial di masa mendatang.
4. Berdasarkan indikator pemantauan program, masyarakat menyatakan tidak ada pengevaluasian program bansos yang dilakukan oleh Pihak dinas sosial atau desa. Pertemuan hanya bersama petugas TKSK untuk program bansos saja. Selain itu, masyarakat menilai bantuan sosial yang disalurkan selama ini masih belum sepenuhnya transparan dan partisipatif.
5. Potensi jebakan kemiskinan dilihat dari kondisi geografis, ketersediaan fasilitas publik, akses sumber daya alam, dan bencana alam. Dari semua indikator tersebut didapati bahwa kondisi geografis di pedesaan dan perkotaan, untuk seluruh akses fasilitas publik bisa dijangkau dengan baik. Akses sumber daya alam juga bisa didapat oleh seluruh masyarakat.

6. Pemerintah desa memiliki peranan penting dalam pengentasan kemiskinan terutama bagi penduduk miskin yang tidak menjadi penerima bansos dari Kementerian Sosial. Selanjutnya optimalisasi pemanfaatan dana desa dapat dilakukan dengan memperpanjang rantai perputaran uang di desa, membuka akses masyarakat untuk mendapatkan barang kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau, dan mengembangkan embrio usaha penduduk desa.
7. Bantuan sosial oleh pemerintah daerah dilaksanakan melalui Dinas Sosial dan Baitul Mal. Namun pemerintah daerah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai program bansos regular yang dapat memperluas jangkauan atau menambah nilai bansos dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah menjalankan program bansos insidental untuk berbagai program seperti bantuan modal usaha dan alat bantu bagi disabilitas. Bantuan modal usaha yang disalurkan melalui dinas social umumnya merupakan bagian dari realisasi dana pikir anggota dewan sedangkan bansos yang dikelola Baitul Mal bersumber dari dana infaq dan sedekah. Bantuan modal usaha tidak disertai dengan program pendampingan yang intensif serta tidak disertai dengan evaluasi kegiatan usaha.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

1. Menetapkan satu sumber data yang berkaitan dengan target sasaran program bansos dan terus berkoordinasi lintas instansi bersama dengan lembaga sosial dan masyarakat untuk meningkatkan ketepatan sasaran dalam setiap program bantuan sosial yang dilaksanakan.
2. Memberikan sosialisasi program bantuan sosial yang yang efisien dan efektif untuk meningkatkan literasi bansos kepada masyarakat sehingga masyarakat paham apakah program bansos yang ada berhak diterima ataupun tidak.

3. Mendesain jenis bantuan sosial yang lebih banyak bisa meningkatkan peningkatan daya beli seperti bantuan pendidikan dan penciptaan program padat karya yang bisa meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Bantuan sosial dapat disalurkan dalam bentuk peningkatan kapasitas berusaha bagi rumah tangga miskin baik dalam peningkatan skil, modal usaha dan akses pasar, diutamakan bagi yang telah memiliki embrio usaha
4. Bersama instansi terkait, perlu dilakukan evaluasi berkelanjutan untuk bantuan sosial baik untuk bantuan yang bersumber dari APBK, dana desa atau sumber lainnya. Hal ini untuk menjaga keefektifan bansos kepada masyarakat miskin. Perlu ada akses penerima bansos *by name by address* sehingga diketahui lamanya
5. Meminimalkan jebakan dan kantong-kantong kemiskinan dengan penyediaan fasilitas publik yang memadai.
6. Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk kegiatan yang secara langsung mengurangi beban masyarakat miskin dan peningkatan kemampuan usaha melalui beberapa program seperti menyediakan pangan murah, menggerakkan kegiatan ekonomi melalui usaha milik desa, serta melaksanakan pelatihan usaha. Karenanya pemerintah desa perlu menyusun program kegiatan dengan memanfaatkan potensi ekonomi desa secara berjenjang dan melibatkan seluruh pelaku ekonomi ada di desa.
7. Melakukan efisiensi belanja daerah yang tidak fokus dan tidak secara langsung berdampak pada pengentasan kemiskinan. Hasil efisiensi dimanfaatkan untuk membiayai program yang secara langsung dapat menurunkan angka kemiskinan. Hal ini bisa dilakukan dengan menyediakan standar kegiatan pendampingan usaha bagi penerima manfaat bantuan usaha. Hal ini untuk menjamin kegiatan pendampingan berjalan secara terencana, terukur dan memberikan dampak positif bagi pengembangan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Abegaz, B. (2023). *The Impact of Economic Fluctuations on Poverty: A Sectoral Approach*. *World Development*, 151, 153-164.
- Atkinson, A. B. (2015). *Inequality: What Can Be Done?* Harvard University Press.
- Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2019). *Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty*. Public Affairs.
- Bawa, K. S., & Jha, R. S. (2023). *Seasonal poverty in agricultural economies: Vulnerabilities and coping strategies*. *Environmental Economics and Policy Studies*, 25(2), 189-202.
- Chambers, R. (2006). *Poverty: Concepts and Contexts*. Cambridge University Press.
- Das, A., & Joshi, A. (2023). *Seasonal Poverty and Climate Change: Impacts on Rural Communities*. *Climate Change Economics*, 14(1), 77-90.
- Duflo, E., Dupas, P., & Kremer, M. [2015]. *Education and Health: New Evidence for the Developing World*. *Annual Review of Economics*, 7, 1-25.
- Duflo, E., et al. (2013). *The Impact of the National Rural Employment Guarantee Scheme in India*. *Journal of Development Economics*, 102, 91-104.
- Filmer, D. (2008). *Poverty and Education*. World Bank Policy Research Working Paper No. 4438.
- Galbraith, J. K. (1967). *The New Industrial State*.
- Guo, T., & Liu, K. (2022). *Digital Inclusion and Poverty Traps: Evidence from Rural Economies*. *Development Economics*, 58(2), 190-205.
- Gupta, S. (2024). *The Impact of Seasonal Employment on Poverty: Insights from Rural Economies*. *World Development*, 131, 99-110.
- Gupta, R. K. (2022). *Natural Disasters and the Onset of Accidental Poverty: A Case Study*. *Natural Hazards Review*, 23(4), 101-110.
- Handley, G., et al. (2014). *Cash Transfer Programs and Poverty Reduction: Evidence from Kenya*. *World Development*, 64, 272-287.
- Harrington, M. (1962). *The Other America: Poverty in the United States*.

- Jansen, M. G. L. (2023). *Unexpected Economic Shocks and the Rise of Accidental Poverty*. *Journal of Economic Inequality*, 58(2), 245-259.
- Jencks, C. (1972). *Inequality: A Reassessment of the Effect of Family and Schooling in America*. Basic Books.
- Marx, K. (1867). *Das Kapital*, Volume I.
- Lewis, McNamara, R. (1973). *Address to the Board of Governors of the World Bank*. World Bank Group.
- Nguyen, N. K. D. (2024). *Reducing Cyclical Poverty through Social Protection Policies*. *Journal of Poverty*, 28(1), 102-118.
- Pradhan, M., et al. (2020). *Evaluating the Effectiveness of Social Protection Programs in Indonesia*. *Journal of Development Economics*, 146, 45-57.
- Prebisch, R. (1950). *The Economic Development of Latin America and Its Principal Problems*.
- Ravallion, M., & Datt, G. (2002). *Why has economic growth been more pro-poor in some countries than others?*. *Journal of Development Economics*, 68(1), 5-28).
- Ravallion, M., & Chen, S. (2007). *China's (Uneven) Progress Against Poverty*. *Journal of Development Economics*, 82(1), 1-42.
- Reardon, D. A. (2022). *Reducing Seasonal Poverty: The Role of Social Protection and Economic Diversification*. *Global Food Security*, 30, 110-121.
- Robb, A., & Harris, R. E. C. (2023). *Breaking the Poverty Trap with Microfinance and Small Business Investment*. *Journal of Development Studies*, 60(5), 789-803.
- Sachs, J. D. (2005). *The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time*. Penguin Press.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Sharma, A., & Kumar, R. (2023). *Accidental Poverty and Informal Sector Workers: Risks and Policy Responses*. *World Development*, 145, 47-59.
- Skoufias, E. (2001). *PROGRESA: Mexico's Experiment with Conditional Cash Transfers*. *World Bank Policy Research Working Paper No. 2612*.
- Soares, F. V., et al. (2010). *The Impact of Bolsa Família: Evaluating the Program's Effectiveness*. *Journal of Development Economics*, 93(2), 316-328.

Stark, O. (2022). *Poverty and Economic Cycles in Developing Economies*. *Journal of Development Economics*, 121, 54-66.

Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and its Discontents*. W.W. Norton & Company.

Thorbecke, E. (2023). *The Role of Social Transfers in Breaking Poverty Traps*. *Journal of Development Economics*, 176, 38-50.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Pembangunan Ekonomi: Teori dan Kebijakan*. Jakarta: Erlangga.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Economic Development* (11th ed.). Addison-Wesley.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Pearson Education.

Wilson, W. J. [(1996). *When Work Disappears: The World of the New Urban Poor*. Vintage Books.

Wilson, S. T. (2024). *The Economic Consequences of Sudden Health Crises on Households*. *Health Economics*, 33(3), 212-224.

World Bank. (2019). *World Development Report 2019: The Changing Nature of Work*. World Bank Group.

World Bank. (2020). *Poverty and Shared Prosperity 2020: Reversals of Fortune*. World Bank Group.

<https://sdgs.un.org/2030agenda>

<https://asean.org/our-communities/economic-community/>

https://strategicplan.undp.org/?_gl=1*y8z118*_gcl_au*NTEyNDY3Nzc0LjE3MzMyNTMzMjc.*_ga*MTA5NDU5NzQwOS4xNzMzMjUzNDA2*_ga_3W7LPK0WP1*MTczMzI1MzQyOC4xLjEuMTczMzI1NDYxOC41Ny4wLjA

https://tnp2k.go.id/download/75711WP%2048_Measurement%20of%20Poverty%20Line%20in%20Indonesia-Theoretical%20Review%20and%20Proposed%20Improvements.pdf

<https://sdgs.bappenas.go.id/product/ran-2021-2024-lampiran-i-rencana-aksi-nasional/>

<https://sdgs.bappenas.go.id/product/ran-2021-2024-lampiran-i-program-kegiatan-pemerintah/>

<https://sdgs.bappenas.go.id/literasi/laporan/>

<https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2023/11/Laporan-tahunan-SDGs-2023.pdf>

<https://dinsos.asahankab.go.id/detailpost/pkh-itu-apa-sih>

<https://www.antaraneews.com/berita/4212894/pengertian-bansos-jenis-dan-tujuannya#:~:text=Bansos%20atau%20bantuan%20sosial%20adalah,tunai%2C%20barang%2C%20atau%20layanan.>

<https://kemensos.go.id/program-pena-menjadi-solusi-untuk-mengatasi-kemiskinan-ekstrem>

<http://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.econstor.eu/bitstream/10419/224417/1/gbfr2019-24-1-071.pdf>

<http://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.econstor.eu/bitstream/10419/224417/1/gbfr2019-24-1-071.pdf>

<https://indonesia.go.id/kategori/editorial/4524/perkukuh-komitmen-pengentasan-kemiskinan?lang=1>

<https://djp.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2830-memahami-kembali-strategi-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-sebagai-sumber-penerimaan-negara.html>

<https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-kejar-target-penurunan-angka-kemiskinan-dan-kemiskinan-ekstrem-di-indonesia>

<https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8618/indonesia-di-jalan-menuju-sdgs-2030-#:~:text=Komitmen%20Indonesia%20dalam%20mengejar%20target,di%20kawasan%20Asia%20dan%20dunia.>

<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5955/berhasil-naik-dari-posisi-102-ke-75-di-tahun-2023-menko-airlangga-saya-optimis-indonesia-capai-sdgs-tahun-2030#:~:text=Jakarta%2C%2011%20September%202024&text=%E2%80%9CDalam%20kurun%20waktu%204%20tahun,posisi%20102%20di%20tahun%202019.>

<https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2023/11/Laporan-tahunan-SDGs-2023.pdf>

<https://www.ptsmi.co.id/sdg-indonesia#:~:text=SDG%20membantu%20Indonesia%20dalam%20mengatasi,dasar%20seperti%20pendidikan%20dan%20kesehatan.>

<https://www.tempo.co/iklan/capaian-sdgs-indonesia-paling-progresif-818309>



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ACEH

JALAN TGK. H. MOHD. DAUD BEUREU-EH NO. 26

TELP. (0651) 21440 - FAX. 33654

WWW.BAPPEDA.ACEHPROV.GO.ID

EMAIL: BAPPEDA@ACEHPROV.GO.ID